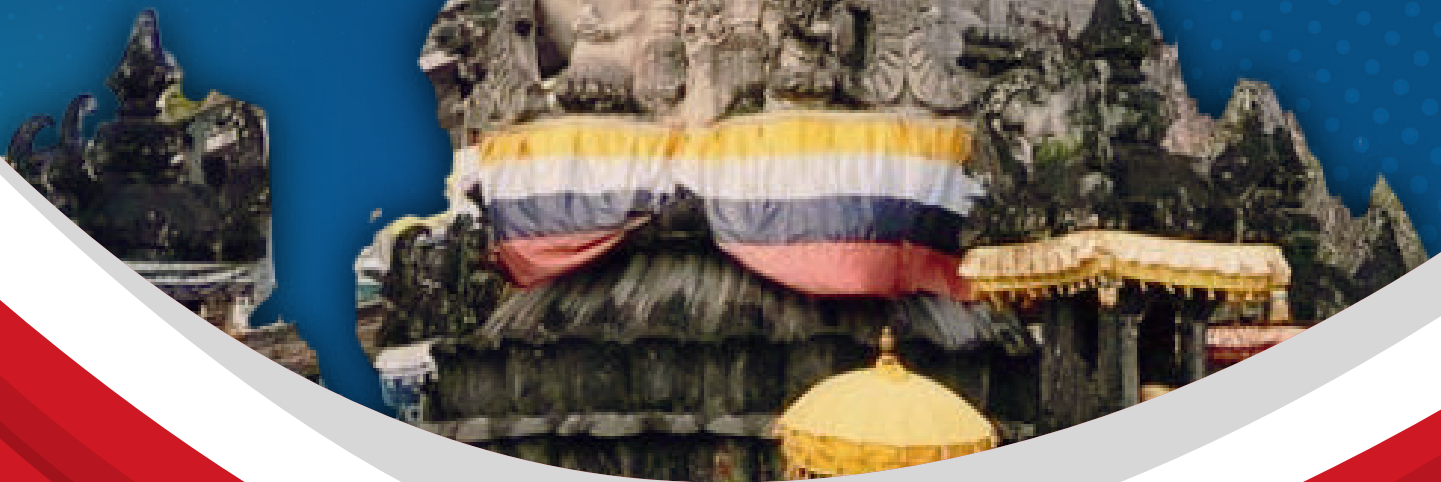




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, saya menyampaikan Kata Pengantar untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini. Laporan ini menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanah masyarakat, mengarah pada upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Tahun 2024 adalah periode yang penuh tantangan dan peluang, dan laporan ini memaparkan berbagai kegiatan, inisiatif, dan hasil yang telah dicapai selama tahun berjalan. Melibatkan kolaborasi antarinstitusi, partisipasi masyarakat, dan sinergi dengan sektor swasta, laporan ini mencerminkan semangat kerja sama yang erat demi kemajuan bersama.

Selain itu, laporan ini juga mengulas berbagai kebijakan dan program yang diimplementasikan untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Adanya evaluasi dan analisis mendalam diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas upaya yang telah dilakukan serta memberikan pandangan untuk perbaikan ke depan.

Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparatur pemerintah, mitra kerja, serta masyarakat yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini menjadi sumber inspirasi dan panduan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan.

Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang holistik tentang capaian, kendala, dan rekomendasi untuk perbaikan. Semoga laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 ini memberikan manfaat dan menjadi dasar bagi perencanaan yang lebih efektif guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan.

Semarang, 27 Maret 2025
BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	18
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	110
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	 113
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	113
2.2 Akuntabilitas Kinerja	113
 BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	 187
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	188
4.1 Urusan Pendidikan.....	189
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	190
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	191
4.1.3 Realisasi.....	193
4.1.4 Alokasi Anggaran	197
4.1.5 Dukungan Personil.....	202
4.1.6 Pemasalahan dan Solusi	204
4.2 Urusan Kesehatan	206
4.2.1 Dinas Kesehatan.....	206
4.2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	206
4.2.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.	207
4.2.1.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	209
4.2.1.4 Alokasi Anggaran.....	213
4.2.1.5 Dukungan Personil	214
4.2.1.6 Permasalahan dan Solusi	214
4.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Klungkung	215
4.2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	216
4.2.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.	217
4.2.2.3 Realisasi	221
4.2.2.4 Alokasi Anggaran.....	229
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	232
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	235
4.3.2 Target Mencapai Standar Pelayanan Minimal.....	236
4.3.3 Realisasi.....	236
4.3.4 Alokasi Anggaran	237
4.3.5 Dukungan Personil.....	238
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	240
4.3.7 Alokasi Anggaran	242
4.3.8 Dukungan Personil.....	243
4.3.7 Permasalahan dan Solusi	245

4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	246
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	246
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	246
4.4.3	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	247
4.6.4	Alokasi Anggaran	247
4.4.5	Dukungan Personil	247
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	248
4.5	Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	248
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	248
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	255
4.6	Bidang Urusan Sosial.....	261
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	263
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	264
4.6.3	Realisasi	265
4.6.4	Alokasi Anggaran	267
4.6.5	Dukungan Personil	268
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	268
4.7	Program dan Kegiatan	268
4.7.1	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2024	268
4.7.2	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	273
4.7.3	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum	274
4.7.4	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Rakyat.....	267
4.7.5	Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	268
4.7.6	Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	276
4.7.7	Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung terkait SPM Tahun 2024 .	278

BAB V	PENUTUP	279
--------------	----------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Klungkung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klungkung diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan/kekhususan daerah, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemberian otonomi luas kepada Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui



Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024 ini disusun. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, ruang lingkup Laporan ini meliputi: (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas: (a) capaian kinerja makro, (b) capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan (c) capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; dan (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Adapun sistematika penulisan dalam LPPD Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

- (1) Bab I : Pendahuluan;
- (2) Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (3) Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- (4) Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- (5) Bab V : Penutup.

b. Data Geografis Wilayah

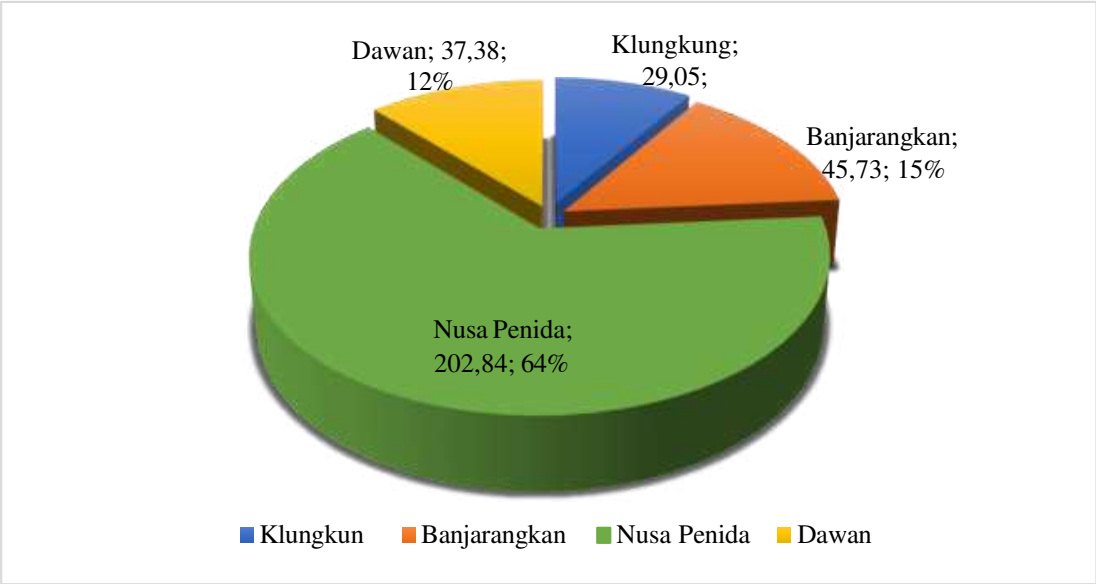
Kondisi geografis Kabupaten Klungkung disajikan dalam bentuk informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, topografi, geologi, dan klimatologi.

1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Wilayah Kabupaten Klungkung secara administratif seluas kurang lebih 31.500 hektare atau 315 Km², batas wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

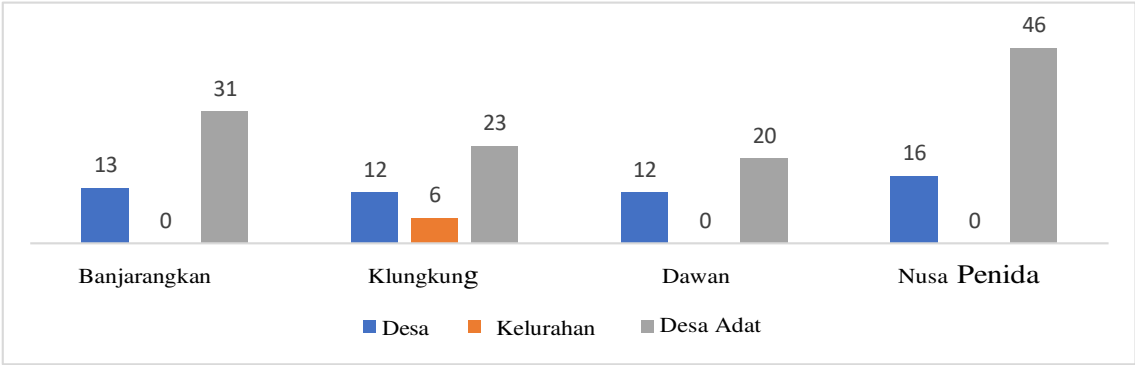
- Sebelah Utara : Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem
- Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem dan Selat Lombok
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli dan Selat Badung

Secara administrasi Kabupaten Klungkung terbagi dalam 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Dawan terletak di Pulau Bali (Klungkung Daratan) dan 1 (satu) kecamatan terletak di Kepulauan Nusa Penida yaitu Kecamatan Nusa Penida.

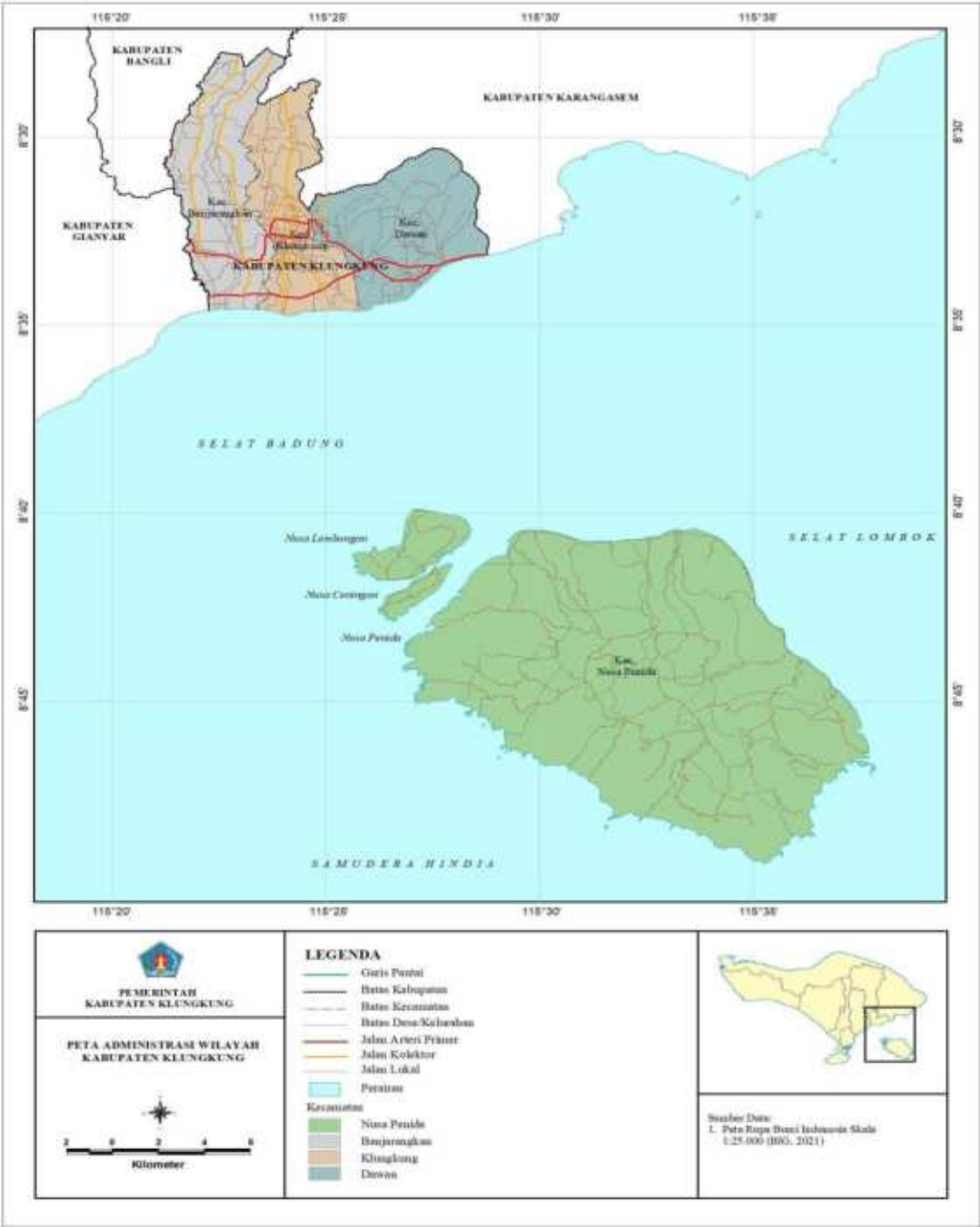


Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2024
Gambar 1.1. Luas Wilayah Kabupaten Klungkung per Kecamatan

Kabupaten Klungkung secara administrasi juga terbagi dalam 53 (lima puluh tiga) desa dan 6 (enam) kelurahan serta memiliki 120 desa adat.



Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2024
Gambar 1.2. Jumlah Desa, Kelurahan dan Desa Adat per Kecamatan

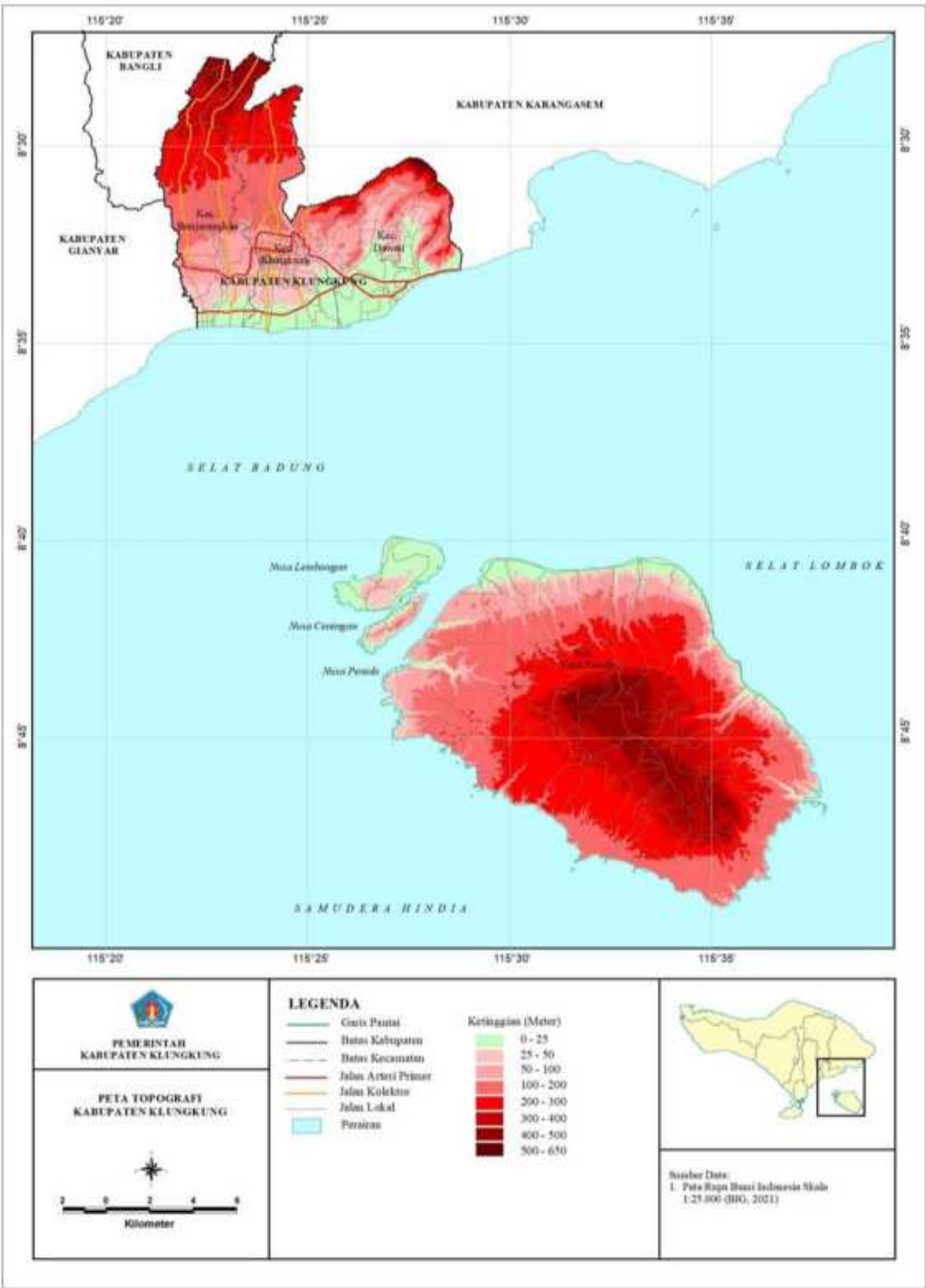


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Tahun 2024

Gambar 1.3. Wilayah Administrasi dan Batas Wilayah Kabupaten Klungkung

2. Topografi

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Klungkung terletak pada ketinggian 0–625 m dpl. Wilayah Kecamatan Banjarangkan mempunyai ketinggian 0–450 m dpl, Kecamatan Klungkung pada ketinggian 0–430 m dpl dan Kecamatan Dawan pada ketinggian 0–625 m dpl. Sedangkan Kecamatan Nusa Penida berada pada ketinggian 0–530 m dpl.

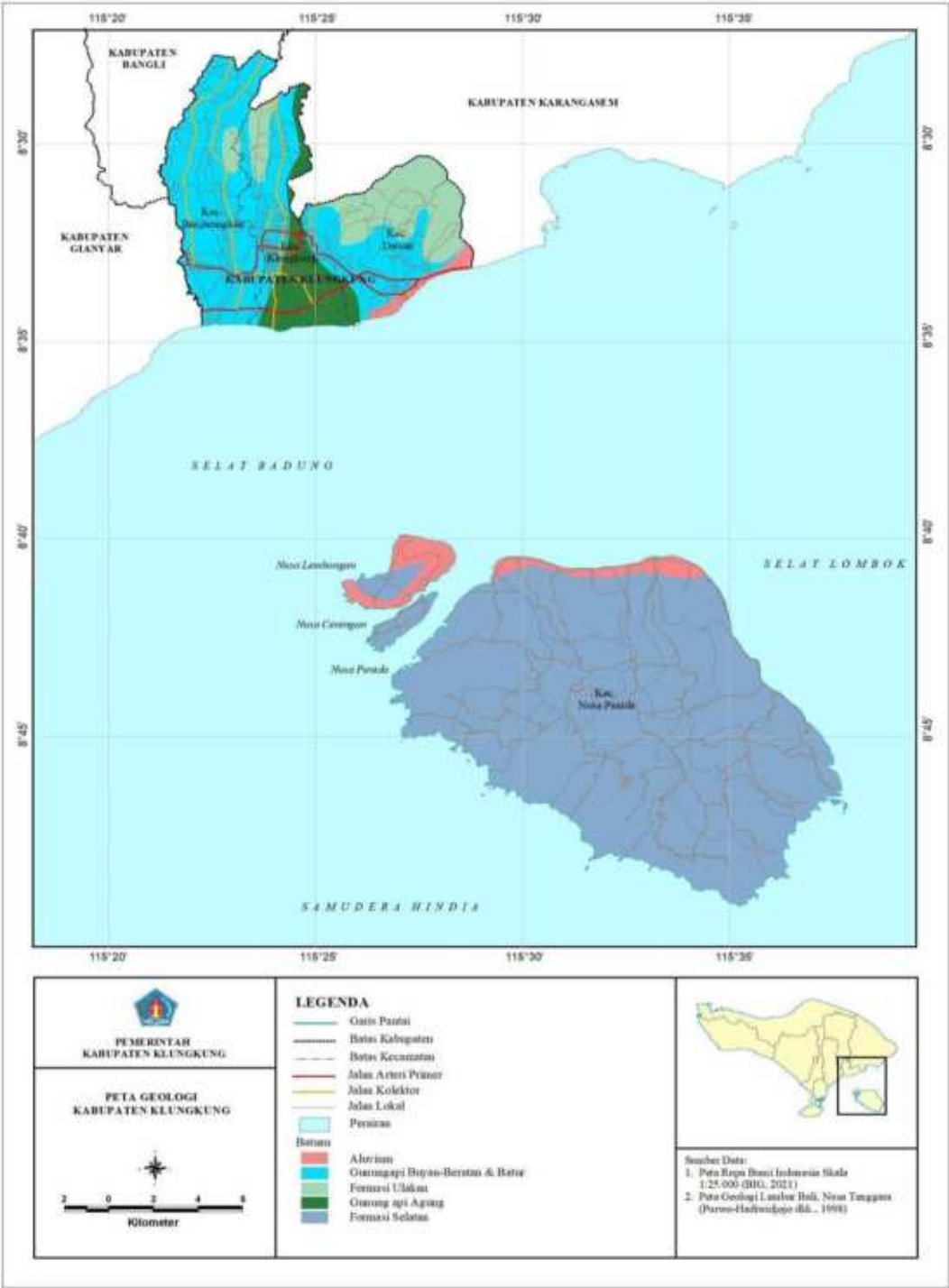


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Tahun 2024

Gambar 1.4. Peta Topografi Kabupaten Klungkung

3. Geologi

Secara geologi wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam peta di bawah ini:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Tahun 2024

Gambar 1.5. Peta Geologi Wilayah Kabupaten Klungkung

Formasi geologi wilayah Kabupaten Klungkung meliputi batuan produk gunung api yang mendominasi wilayah Klungkung daratan dan batuan sedimen yang mendominasi wilayah kepulauan Nusa Penida. Batuan di wilayah Klungkung daratan terdiri atas empat jenis yaitu:



- 1) Batuan Gunung api Kelompok Buyan-Beratan dan Batur, terdiri dari breksi gunung api dan lava, setempat tuf. Sebarannya sangat luas, meliputi sebagian besar wilayah Klungkung daratan kecuali sekitar daerah pengaliran Tukad Unda dan daerah pantai Kusamba- Pesinggahan.
- 2) Batuan Gunung api Gunung Agung, terdiri dari aglomerat, tuf, lava, lahar dan ignimbrit; sebagai hasil kegiatan Gunung Agung yang masih aktif. Sebarannya di sepanjang daerah pengaliran Tukad Unda terutama di sekitar muara sungai.
- 3) Formasi Ulakan, berupa breksi gunungapi, lava, tuf dan sisipan batuan sedimen gampingan. Terdapat di daerah perbukitan Kecamatan Dawan, Banjarangkan dan Klungkung.
- 4) Endapan aluvium berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai dan pantai. Batuan ini terdapat di daerah pantai Kusamba – Pesinggahan.

Sementara itu, formasi geologi Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan didominasi oleh Formasi Selatan terutama tersusun atas batugamping terumbu, setempat napal, sebagian berlapis, berhablur-ulang dan berfosil. Pesisir utara Nusa Lembongan, Nusa Ceningan dan Pulau Nusa Penida juga ditemukan formasi lain yaitu endapan aluvium.

4. Klimatologi

Secara umum kondisi cuaca dan iklim di Kabupaten Klungkung sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti interaksi laut-atmosfer, aktivitas konvergensi, pertemuan massa udara dari belahan bumi utara dan selatan, tumbuhnya pusat tekanan rendah dan pengaruh kondisi lokal setempat. Berdasarkan data rata-rata curah hujan bulanan, wilayah Kabupaten Klungkung memiliki pola curah hujan monsun yang ditandai dengan pergantian arah angin permukaan sekitar enam bulan sekali. Pola monsun terjadi akibat proses sirkulasi udara yang berganti arah setiap enam bulan sekali yang melintas di wilayah Indonesia, yang dikenal dengan monsun barat dan monsun timur. Monsun barat umumnya menimbulkan banyak hujan (musim hujan) yang terjadi sekitar bulan Januari, dan monsun timur umumnya menyebabkan kondisi kurang hujan (musim kemarau) yang terjadi sekitar bulan Agustus.

Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson, wilayah Provinsi Bali dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tipe iklim yaitu tipe C untuk wilayah Kecamatan Banjarangkan dan Klungkung di bagian hulu, tipe D untuk wilayah Kecamatan



Banjarangkan dan Klungkung di bagian hilir dekat pantai, dan Kecamatan Dawan, dan tipe F untuk wilayah Kecamatan Nusa Penida. Tipe iklim F ini termasuk daerah kering dengan perbandingan antara rata-rata bulan kering dan bulan basah berkisar 167% - 300%.

Jumlah curah hujan tahunan di Kabupaten Klungkung berdasarkan pencatatan di stasiun Geofisika Denpasar pada periode 2019-2023 berfluktuatif dengan angka berkisar 1025 – 3352 mm, tertinggi pada tahun 2021 dan terendah 2019. Jumlah hari hujan berkisar 79 – 176 hari. Jumlah curah hujan tahun 2023 adalah 1708 mm dengan jumlah hari hujan 128 hari. Rata-rata curah hujan bulanan di atas 100 mm yang merupakan bulan basah pada tahun 2023 terjadi selama 5 bulan, yaitu Januari, Februari, April, Juli, dan Desember. Kondisi ini sangat berbeda dengan tahun 2022 dimana bulan basah hanya terjadi selama 8 bulan.

Tabel 1.1.
Rata-rata curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Klungkung
Tahun 2019-2023

Bulan	2019		2020		2021		2022		2023	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
Januari	244	16	237	10	857	30	367	24	288	23
Februari	142	15	142	15	507	25	274	18	424	24
Maret	355	17	302	11	261	19	316	18	69	13
April	40	7	56	11	90	9	104	8	208	16
Mei	9	7	189	15	1	1	69	5	29	9
Juni	4	1	106	16	231	11	56	13	43	6
Juli	4	4	124	13	9	6	14	6	233	9
Agustus	11	2	41	8	102	7	40	12	9	4
September	10	1	140	6	152	10	129	9	2	2
Oktober	0	0	189	17	123	9	616	25	-	1
November	18	1	208	12	470	19	238	19	89	9
Desember	188	8	214	21	549	16	323	19	315	12
Jumlah	1025	79	1948	155	3352	162	2546	176	1708	128

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung, Tahun 2024

Kelembaban udara rata-rata tahun 2023 adalah 78,8%, lebih tinggi dibandingkan tahun tahun 2022 yaitu 73,1%. Dalam periode 2019-2023, kelembaban udara tertinggi terjadi tahun 2023 dan terendah tahun 2022. Kelembaban udara rata-rata bulanan tahun 2023 berkisar 76,8 – 82,2%. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Februari sedangkan terendah pada bulan Maret.



Tabel 1.2.
Kelembaban udara rata-rata di Kabupaten Klungkung
Tahun 2019-2023

Bulan	Kelembaban Udara (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	77,0	75,4	82,2	73,6	79,6
Februari	76,3	77,1	78,7	73,1	82,2
Maret	79,6	78,0	75,1	73,0	76,8
April	78,5	81,0	68,5	71,7	81,0
Mei	77,0	80,3	68,3	70,5	77,5
Juni	75,8	72,0	72,5	72,5	78,1
Juli	76,5	78,4	68,9	71,9	80,0
Agustus	76,5	74,1	71,9	70,9	78,3
September	77,1	75,4	71,1	72,2	77,0
Oktober	74,6	75,4	72,9	78,3	77,6
November	73,9	74,9	77,5	75,0	79,1
Desember	74,2	75,3	76,4	74,4	78,0
Rata-rata	76,4	76,5	73,7	73,1	78,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung,
Tahun 2024

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2024 berjumlah 222.763 jiwa yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 111.350 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 111.413 jiwa. Jumlah penduduk Tahun 2024 meningkat sebanyak 2.272 jiwa dari jumlah penduduk Tahun 2023 yang berjumlah sebesar 220.491 jiwa. Adapun gambaran jumlah penduduk Kabupaten Klungkung di Tahun 2024 adalah sebagaimana diuraikan dalam gambar di bawah ini.

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Nusa Penida	32.809	32.336	65.145
2	Banjarangkan	23.561	23.472	47.033
3	Klungkung	33.225	33.760	66.985
4	Dawan	21.755	21.845	43.600
	Jumlah	111.350	111.413	222.763

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, 2024 (Data Agregat Kependudukan Berdasarkan data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024.



Sedangkan jumlah penduduk per kecamatan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3.
Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Total	Persentase Penduduk
1	Nusa Penida	65.145	29,42 %
2	Banjarangkan	47.033	21,07 %
3	Klungkung	66.985	29,98 %
4	Dawan	43.600	19,53 %
	Jumlah	222.763	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas maka jumlah penduduk tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Klungkung sebanyak 66.985 jiwa (29,98 %) dan yang terendah pada Kecamatan Dawan yaitu sebesar 43.600 jiwa (19,53%).

d. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat Daerah Tipe B;
- 2. Sekretariat DPRD Tipe C;
- 3. Inspektorat Daerah Tipe B;
- 4. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- 3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan;
- 8) Dinas Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 10) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pertanahan dan bidang kehutanan;
- 12) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 14) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;



- 15) Dinas Ketenagakerjaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
 - 16) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - 17) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - 18) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan bidang perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub bidang kebakaran;
5. Badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan keuangan;
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang bencana;
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - 6) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6. Kecamatan terdiri atas:
- 1) Kecamatan Banjarangkan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Dawan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Klungkung Tipe A;
 - 4) Kecamatan Nusa Penida Tipe A.

Sedangkan Unit Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan adalah sebagai berikut:



- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari:
 1. Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal terdiri dari:
 - a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 2. Satuan Pendidikan NonFormal sejenis yaitu UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari:
 1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dawan I;
 2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dawan II;
 3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung I;
 4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Klungkung II;
 5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan I;
 6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarangkan II;
 7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida I;
 8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida II;
 9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Nusa Penida III;
 10. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A.
- (3) UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
 1. UPTD Pengelolaan Pasar Kelas A; dan
 2. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Kelas A.
- (4) UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu UPTD Persampahan Kecamatan Nusa Penida Kelas B;
- (5) UPTD pada Dinas Kebudayaan yaitu UPTD Museum Semarajaya Kelas A;
- (6) UPTD pada Dinas Perhubungan yaitu UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Kelas A;
- (7) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan Kelas A;
- (8) UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yaitu UPTD Perbenihan Perikanan Kelas A;
- (9) UPTD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Nusa Penida Kelas B;



- (10) UPTD pada Dinas Pariwisata yaitu UPTD Pengelolaan Wisata Nusa Penida Kelas A;
- (11) UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B.

e. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Berdasarkan urusan pemerintah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Klungkung tersebar dalam berbagai sektor utama yang menjadi tanggung jawab daerah, dapat dilihat dan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.4.
Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Rincian ASN Kabupaten Klungkung						
Keadaan Tahun 2024						
No	Nama Perangkat Daerah	Usuran Pemerintahan / Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1	5	9	15
2	Bagian Hukum	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1	6	3	10
3	Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1	6	4	11
4	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1	34	4	39
5	Bagian Umum	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	8	5	20	33
6	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2	2	5	9
7	Bagian Organisasi	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1	4	6	11
8	Sekretariat DPRD	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3	5	22	30
9	Inspektorat Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7	38	5	50
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan	Unsur Penunjang Urusan	21	13	37	71



	Pendapatan Daerah	Pemerintahan				
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	12	10	27
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	6	21	11	38
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	6	6	10	22
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7	10	7	24
15	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3	4	2	9
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	13	55	14	82
17	Dinas Kesehatan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	20	641	70	732
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7	9	11	27
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	11	42	26	79
20	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	14	1845	62	1921
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	6	14	8	28
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7	10	16	33
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	4	9	7	20
24	Dinas Kebudayaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	8	11	15	34
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	6	11	9	26
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	11	21	26	58
27	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7	14	82	103
28	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	10	14	29
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3	16	8	27
30	Dinas Perhubungan	Unsur Penunjang Urusan	17	8	56	81



		Pemerintahan				
31	Dinas Ketenagakerjaan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	6	11	7	24
32	Dinas Pariwisata	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	9	17	28	54
33	Dinas Pertanian	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5	61	11	77
34	Rumah Sakit Umum Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	6	419	58	483
35	Kecamatan Klungkung	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	36	0	18	54
36	Kecamatan Banjarangkan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	7	0	13	20
37	Kecamatan Dawan	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	9	0	6	15
38	Kecamatan Nusa Penida	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	8	0	11	19
Jumlah			298	3395	731	4425

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Klungkung, Tahun 2024

f. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Capaian Pendapatan Asli Daerah yang optimal dan akuntabel merupakan tujuan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah:

Pada Tahun 2024, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.503.277.038.108,50 terealisasi sebesar 98,15% atau terealisasi sebesar Rp 1.475.397.199.846,00. Pendapatan Transfer dengan anggaran sebesar Rp 1.081.388.941.920,00 mencapai realisasi sebesar Rp 1.055.513.821.150,00 atau sebesar 97,61% sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 733.414,00 realisasi mencapai Rp 38.670.951,26.

Belanja Daerah:

Total realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.459.500.695.815,15



yaitu sebesar 93,12% dari anggaran sebesar Rp 1.567.318.080.332,00. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp 1.230.291.594.636,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp 1.144.377.695.972,62 atau 93,02%, Belanja Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp 127.138.663.123,00 mencapai realisasi sebesar Rp 110.769.585.761,53 atau 87,13%, Belanja Tidak Terduga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.431.583.355,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp 8.623.938.455,00 atau 64,21%, dan pada Belanja Transfer dengan jumlah anggaran sebesar Rp 196.456.239.218,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 195.729.475.636,00 atau 99,63%.

Tabel 1.5.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Klungkung
Tahun 2024

PEMERINTAHAN KAB. KLUNGKUNG					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)					
TAHUN ANGGARAN 2024					
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024					
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.503.277.038.108,50	1.475.397.199.846,00	98,15	1.370.586.084.745,33
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	421.887.362.774,50	419.844.707.744,74	99,52	350.536.512.385,33
4.1.01	Pajak Daerah	122.254.605.651,00	146.225.262.033,00	119,61	113.695.107.806,00
4.1.02	Retribusi Daerah	251.048.726.542,00	255.862.677.733,24	101,92	47.649.857.636,55
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.671.274.487,00	8.671.274.486,87	100,00	7.602.949.070,93
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39.912.756.094,50	9.085.493.491,63	22,76	181.588.597.871,85
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	421.887.362.774,50	419.844.707.744,74	99,52	350.536.512.385,33
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.081.388.941.920,00	1.055.513.821.150,00	97,61	1.019.842.353.796,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	814.284.713.000,00	806.903.478.118,00	99,09	818.590.718.389,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	267.094.228.920,00	248.610.343.032,00	93,08	201.251.635.307,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	733.414,00	38.670.951,26	5.272,73	207.218.574,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	733.414,00	37.949.626,26	5.174,38	199.960.479,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah	0,00	721.325,00	0,00	7.258.095,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	733.414,00	38.670.951,26	5.272,73	207.218.574,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.503.277.038.108,50	1.475.397.199.846,00	98,15	1.370.586.084.745,33
5	BELANJA DAERAH	1.567.318.080.332,00	1.459.500.695.815,15	93,12	1.355.627.177.837,47
5.1	BELANJA OPERASI	1.230.291.594.636,00	1.144.377.695.972,62	93,02	1.043.731.802.665,44
5.1.01	Belanja Pegawai	608.336.972.682,00	585.626.292.596,00	96,27	532.237.023.471,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	456.647.038.367,00	399.227.196.959,62	87,43	390.939.219.129,44
5.1.03	Belanja Bunga	3.901.156.702,00	3.560.246.411,00	91,26	3.432.910.119,00
5.1.05	Belanja Hibah	157.637.326.885,00	152.310.504.006,00	96,62	112.552.519.446,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.769.100.000,00	3.653.456.000,00	96,93	4.570.130.500,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.230.291.594.636,00	1.144.377.695.972,62	93,02	1.043.731.802.665,44
5.2	BELANJA MODAL	127.138.663.123,00	110.769.585.761,53	87,13	186.360.556.196,77
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.436.079.953,00	4.342.837.851,00	51,48	1.458.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.978.314.572,00	26.097.257.905,00	90,06	19.547.281.141,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.459.027.041,00	26.211.817.189,53	80,75	119.708.395.962,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.080.861.893,00	49.008.011.016,00	94,10	42.368.269.276,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.581.343.100,00	4.570.180.000,00	99,76	3.917.785.979,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	603.036.564,00	539.481.800,00	89,46	817.365.838,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	127.138.663.123,00	110.769.585.761,53	87,13	186.360.556.196,77
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.431.583.355,00	8.623.938.445,00	64,21	2.940.474.524,26
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.431.583.355,00	8.623.938.445,00	64,21	2.940.474.524,26
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	13.431.583.355,00	8.623.938.445,00	64,21	2.940.474.524,26
5.4	BELANJA TRANSFER	196.456.239.218,00	195.729.475.636,00	99,63	122.594.344.451,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.051.305.035,00	20.325.541.454,00	96,55	15.455.999.451,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	175.404.934.183,00	175.403.934.182,00	100,00	107.138.345.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	196.456.239.218,00	195.729.475.636,00	99,63	122.594.344.451,00
	JUMLAH BELANJA	1.567.318.080.332,00	1.459.500.695.815,15	93,12	1.355.627.177.837,47
	SURPLUS/DEFISIT	(64.041.042.223,50)	15.896.504.030,85	(24,82)	14.958.906.907,86
6	PEMBIAYAAN DAERAH	64.041.042.223,50	66.293.225.136,63	103,52	55.874.539.707,64
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.950.446.615,50	70.951.504.950,63	100,00	55.874.539.707,64
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.833.446.615,50	70.834.504.950,63	100,00	55.808.039.707,64
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	66.500.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.950.446.615,50	70.951.504.950,63	100,00	55.874.539.707,64
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempatnya	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	64.041.042.223,50	66.293.225.136,63	103,52	55.874.539.707,64
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	82.189.729.167,48	0,00	70.833.446.615,50

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Klungkung, Tahun 2024

Untuk data Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat atau diakses melalui link:

<https://bit.ly/UraianUrusanOrganisasiProgramKegiatanDanSubKegiatan>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Klungkung, Tahun 2024



Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data kondisi eksisting, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu- isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas. Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu- isu penting dalam penyusunan RPJMD Teknokratik Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029. Isu strategis juga merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu- isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal dimasa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan dirumuskan berupa tantangan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Setiap indikator TPB yang diproyeksikan tidak mencapai target nasional dan/atau target global, indikator yang diproyeksikan mencapai target tetapi kecenderungannya tidak membaik, dan indikator yang belum dilaksanakan sebagaimana hasil analisis pencapaian TPB dilakukan perumusan permasalahan yang menjadi tantangan dalam pencapaiannya. Adapun permasalahan disajikan pada gambar berikut ini.



Tabel 1.6.
Permasalahan pelaksanaan dan pencapaian indikator TPB
di Kabupaten Klungkung

No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
1	Tujuan 1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun	
1.3.1b	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	• Literasi tentang pentingnya mengikuti Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di kalangan pekerja masih rendah • Mereka yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan tidak mengetahui manfaat program jaminan sosial, seperti jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja • Sebagian pekerja merasa bahwa penghasilannya tidak cukup untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan ada kebutuhan yang lebih penting. • Ketaatan perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya dalam Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan masih rendah
1.3.1c	Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang disantuni	• Data penyandang disabilitas kelompok miskin dan rentan masih belum valid
1.3.1d	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial	• Akurasi penargetan, fragmentasi program, dan alokasi pengeluaran untuk perlindungan sosial yang rendah atau kurang memadai. • Struktur tata kelola terdesentralisasi menimbulkan tantangan dalam mengkoordinasikan dan memberikan layanan perlindungan sosial secara seragam di berbagai wilayah. • Belum terintegrasinya bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi • Koordinasi, integrasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan antar pemerintah dan antar perangkat daerah belum berjalan optimal • Kemitraan dengan sektor bukan pemerintah dalam pelaksanaan program perlindungan sosial belum optimal
1.4.1c	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS	• Perubahan paradigma kependudukan dimana pembatasan jumlah anak kurang menjadi prioritas dalam keluarga.



1.5.1e	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	• Tinggi dan beragamnya ancaman bencana (bencana alam, bencana geologi, bencana meteorologi) • Dukungan kebijakan dan regulasi daerah tentang penanggulangan bencana masih belum memadai yang selaras dengan strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana nasional • Penerapan aturan teknis pelaksanaan fungsi BPBD belum optimal • Penerapan aturan dan mekanisme Forum Penguran Risiko Bencana (PRB) belum optimal • Penerapan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan belum optimal • Fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif dalam pengurangan risiko bencana di daerah masih terbatas
2	Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	• Masih terdapat keterbatasan akses secara ekonomi bagi sebagian individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup • Adanya ketidakpahaman individu/rumah tangga tentang pola konsumsi dengan energi yang cukup • Pemanfaatan sumber pangan lokal semakin menurun
2.2.2c	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan	• Pengetahuan individu/rumah tangga tentang pola konsumsi dengan energi yang cukup belum merata • Tingkat keanekaragaman pangan masih rendah • Pemanfaatan sumber pangan lokal semakin menurun • Perubahan pola konsumsi mengarah pada kegemaran terhadap makanan instan cenderung meningkat • Ketersediaan ikan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat masih terbatas • Kesadaran masyarakat mengkonsumsi ikan masih rendah
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian	• Infrastruktur pertanian masih yang belum memadai • Rendahnya penerapan teknologi budidaya di lapangan, tingkat kesuburan tanah terus menurun, eksplorasi potensi genetik tanaman yang masih belum optimal. • Penggunaan pupuk yang tidak semestinya, bibit unggul dan metode perawatan yang belum optimal diaplikasikan pada petani karena lemahnya sosialisasi teknologi, sistem pembinaan dan lemahnya modal usaha petani itu sendiri. • Penerapkan usaha pertanian konvensional, sebagian besar bersifat subsisten dan kurang inovatif seperti kecenderungan untuk menggunakan input pupuk kimia secara terus menerus, jangan menggunakan rotasi tanaman, kehilangan pasca panen masih tinggi dan menggunakan air irigasi yang tidak efisien. • Penerapan sistem agribisnis di Tingkat petani masih rendah • Luas lahan garapan petani sangat terbatas
2.4.1*	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan belum dilaksanakan	• Pemerintah daerah belum menemukan skema yang tepat tentang insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



3	Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	
3.1.1*	Angka Kematian Ibu	• Masalah kesehatan yang mempengaruhi proses kehamilan, persalinan maupun masa nifas (penyebab non obstetric) masih dominan, disamping karena perdarahan, hipertensi, dan infeksi • Kesadaran gizi ibu hamil masih belum merata • Masih ditemukan kasus di mana perempuan yang melahirkan sudah dalam keadaan darurat sehingga tidak tertolong nyawanya. • Berbagai faktor risiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil yaitu kondisi pada saat hamil ibu mengalami berbagai penyulit seperti hipertensi, perdarahan, anemia, diabetes, • infeksi, penyakit jantung dan lain-lain.
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	• Pengetahuan ibu bersalin ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih atau di fasilitas Kesehatan belum merata



3.1.2a	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas Kesehatan	Jarak tempat tinggal ibu yang jauh dari fasilitas kesehatan dan kurangnya pengetahuan ibu bersalin dan/atau keluarganya tentang manfaat bersalin ditolong tenaga kesehatan terlatih di faskes.
3.2.1*	Angka Kematian Balita	- Kesadaran gizi ibu hamil masih merata, sebagai salah satu faktor bayi lahir berat badan rendah. - Gangguan kesehatan pada balita seperti pneumonia, penyakit bawaan, diare, dan komplikasi neonatal, dan infeksi lainnya
3.2.2a	Angka Kematian Bayi	- Kesadaran gizi ibu hamil masih merata, sebagai salah satu faktor bayi lahir berat badan rendah. - Pneumonia, penyakit bawaan, diare, dan komplikasi neonatal - Pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya pemberian perawatan antenatal serta perawatan bayi baru lahir belum merata, dan deteksi secara dini masalah kesehatan secara umum yang menyertai kehamilan belum optimal - Gangguan kesehatan pada bayi seperti pneumonia dan infeksi lainnya, dan adanya gangguan perinatal yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.
3.3.1a	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	- Kesadaran masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS belum merata - Bali sebagai destinasi pariwisata internasional tergolong rawan terhadap penyebaran HIV - Meningkatnya risiko penularan HIV karena pergaulan bebas
3.3.2a	Insiden Tuberkulosis	- Belum optimalnya pelibatan dan kontribusi fasyankes dalam jejaring layanan tuberkulosis dan pelaporan tuberkulosis - Indikator tuberkulosis belum menjadi indikator utama dalam penilaian mutu akreditasi di fasyankes - Belum optimalnya pelaporan tuberkulosis dari fasyankes khususnya fasyankes swasta.
3.4.1c	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	- Perilaku dan pola makan yang tidak sehat - Anak-anak kurang bergerak dan olahraga - Kebiasaan jajan di luar atau tren makanan dan minuman tinggi kalori
3.5.1e	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	- Kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba bagi kesehatan belum merata - Bali sebagai destinasi pariwisata internasional tergolong rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba - Meningkatnya pergaulan bebas
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern	- Perubahan paradigma kependudukan dimana pembatasan jumlah anak kurang menjadi prioritas dalam keluarga. - Kampanye keluarga berencana cenderung menurun dan tidak menjadi kebijakan prioritas pemerintah daerah



3.7.1a	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada PUS	• Perubahan paradigma kependudukan dimana pembatasan jumlah anak kurang menjadi prioritas dalam keluarga. • Kampanye keluarga berencana cenderung menurun dan tidak menjadi kebijakan prioritas pemerintah daerah
3.a.1	Persentase merokok penduduk umur ≥15 tahun	• Kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok belum merata • Pertumbuhan perokok aktif di Indonesia tersebut tidak terlepas dari industri produk tembakau yang gencar memasarkan produknya di masyarakat, terutama anak dan remaja, melalui media sosial
4	Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja pada tingkat akhir SD dan tingkat akhir SMP yang mencapai kemampuan minimum dalam membaca dan matematika	• Manajemen kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi belum optimal
4.1.1d	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	• Belum optimalnya pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun • Belum tertibnya implementasi persyaratan memasuki SD/MI/ sederajat berdasarkan batas usia minimal 7 tahun
4.1.1c	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ sederajat	• Belum optimalnya pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun • Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan belum merata • Belum tertibnya implementasi persyaratan memasuki SMP/MTs/sederajat berdasarkan batas usia minimal 13 tahun
4.1.1g	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	• Banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar dan bahkan tidak pernah sekolah • Rendahnya minat dan kesempatan bagi penduduk di atas 25 tahun untuk mengikuti paket A, B dan C
4.2.2a	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah dan menurun	• Pemahaman orang tua tentang pentingnya PAUD sejak umur 3 sampai 6 tahun belum merata • Faktor ekonomi yang mempengaruhi kesanggupan memasukkan anak ke PAUD sejak umur 3 sampai 6 tahun
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi	• Penduduk umur 5 tahun keatas lebih mementingkan penggunaan gadget daripada komputer • Bimbingan orang tua pentingnya penguasaan komputer sejak usia dini belum optimal
4.6.1a	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	• Banyaknya penduduk di atas umur 25 tahun yang tidak pernah sekolah • Rendahnya minat dan kesempatan penduduk usia di atas 25 tahun mengikuti pembelajaran membaca dan menulis
5	Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan	



5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan	• Tingginya dilema perempuan saat akan melaporkan kasus kekerasan yang dialami diperburuk dengan relasi kuasa antara perempuan dengan pelaku yang cenderung timpang. • Hambatan struktural dimana sejumlah lembaga layanan atau mekanisme pelaporan belum responsif terhadap kasus yang dialami korban atau dilaporkan.
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan	• Tingginya dilema perempuan saat akan melaporkan kasus kekerasan yang dialami diperburuk dengan relasi kuasa antara perempuan dengan pelaku yang cenderung timpang. • Hambatan struktural dimana sejumlah lembaga layanan atau mekanisme pelaporan belum responsif terhadap kasus yang dialami korban atau dilaporkan.
5.2.2a	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	• Masih rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan • Kurangnya informasi mengenai prosedur atau mekanisme memperoleh layanan komprehensif • Kesempatan yang sangat minim bagi perempuan dalam mengungkapkan kekerasan yang dialaminya dalam proses hukum maupun layanan korban • Keterbatasan lembaga layanan korban kekerasan
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 16 tahun dan sebelum umur 19 tahun	• Di daerah perdesaan, pernikahan dini masih dianggap hal yang biasa • Kurangnya pemahaman orang tua dan individu tentang dampak dari perkawinan usia dini • Pendidikan rendah dan faktor ekonomi sehingga anak dinikahkan dalam usia muda untuk mengurangi beban orang tua
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	• Partai politik masih kurang aktif mendorong calon legislatif dari kalangan perempuan di anggotanya. • Masih kurangnya pendidikan politik bagi perempuan. • Belum optimalnya pemberdayaan (<i>empowering</i>) perempuan di bidang elektoral
5.6.1a	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	• Pengetahuan mengenai pemilihan alat kontrasepsi yang cocok dan aman dipakai belum merata. • Belum optimalnya pelaksanaan Komunikasi-Informasi-Edukasi, penggerakan dan pendampingan untuk menurunkan angka putus pakai (<i>drop out</i>) kontrasepsi
6	Tujuan 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua	
7.1.1a	Konsumsi listrik per kapita	• Infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik masih terbatas khususnya di Klungkung kepulauan • Investasi ekonomi/bisnis dan kegiatan ekonomi Masyarakat masih rendah sehingga penggunaan energi Listrik masih rendah



7.1.2a	Infrastruktur jaringan gas untuk rumah tangga	Kurang menariknya skema jaringan mandiri sehingga masih sangat bergantung pada APBN untuk pembangunan infrastrukturnya,
		sementara Kemampuan keuangan pemerintah masih menjadi kendala pengembangan jaringan gas
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	- Kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) masih rendah - Sumber EBT mapan sangat terbatas - Ketersediaan lahan untuk pengembangan PLTS skala besar terbatas - Kebijakan penggunaan energi listrik dari PLTS secara mandiri oleh masyarakat dan industri masih dibatasi - Sumber EBT dari energi kelautan (seperti OTEC, gelombang dan arus) belum dimanfaatkan
7.3.1*	Intensitas energi primer	- Masih tingginya penggunaan energi primer terutama di sektor energi dan transportasi. - Penggunaan energi sekunder, seperti energi listrik masih rendah
7	Tujuan 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua	
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB; Laju pertumbuhan PDRB per kapita	Pendayagunaan potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal belum optimal dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif



8.1.1a	PDRB per kapita	• Kesenjangan pembangunan antar wilayah Klungkung daratan dan kepulauan Nusa Penida • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terbatas, tidak merata, kurang terpadu, dan kurang akselerasi. • Dukungan jaringan serta kualitas infrastruktur wilayah dan energi masih rendah • Investasi swasta masih rendah dan tersebar tidak merata di semua wilayah kabupaten/kota • Usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dan ekonomi kreatif belum berkembang secara optimal • Menurunnya pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah sebagai dukungan permodalan dan infrastruktur ekonomi • Pengembangan industri dan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas dan perikanan belum optimal • Integrasi pengembangan produk-produk industri kecil dan kerajinan ke dalam industri pariwisata belum optimal • Penerapan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah belum optimal • Kemampuan penduduk miskin dan rentan untuk meningkatkan pendapatan (akses pekerjaan dan usaha ekonomi produktif) masih rendah • Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin belum optimal • Pengembangan kawasan berbasis potensi lokal pada pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai PKW dan PKL, serta PPK dan PPL yang jauh dari PKN kurang optimal
		• Daya saing produk (barang) daerah rendah termasuk barang ekspor • Masih rendahnya pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah sebagai dukungan permodalan dan infrastruktur ekonomi • Desa dan pedesaan ditinggalkan oleh SDM terdidik karena urbanisasi • Pemberdayaan dan perlindungan petani dan nelayan belum efektif
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	• Kurangnya pekerjaan berkualitas yaitu pekerjaan yang produktivitas tenaga kerjanya dari yang menengah sampai tinggi yang disebabkan karena sektor jasa yang lebih mendominasi. • Rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja masih rendah • Masih rendahnya tingkat keterampilan, penguasaan iptek, dan inovasi



8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian	• Pertumbuhan angkatan tenaga kerja baru yang lebih tinggi dari ketersediaan lapangan kerja formal • Arus migrasi desa-kota yang cukup besar tidak semuanya terserap di sektor formal, mengakibatkan sektor informal lebih dipilih oleh para migran yang tidak dapat masuk ke sektor formal • Sektor informal mudah dimasuki oleh banyak orang karena tidak memerlukan tingkat keahlian atau spesifikasi pendidikan yang tinggi dan modal yang diperlukan relatif kecil
8.3.1a	Persentase tenaga kerja formal	• Persaingan lapangan kerja formal semakin ketat • Penurunan penciptaan lapangan kerja formal karena perubahan struktur ekonomi. • Industri manufaktur yang menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja formal, kini mengalami stagnasi. Sebaliknya, sektor jasa yang cenderung lebih informal mengalami pertumbuhan pesat. • Peraturan yang rumit dan biaya tinggi untuk menggaji pekerja formal mendorong perusahaan untuk lebih memilih tenaga kerja kontrak atau outsourcing yang sering kali termasuk dalam kategori informal. • Kurangnya keselarasan antara sistem pendidikan dan kebutuhan industri • Era digital juga membawa tantangan tersendiri, banyak pekerjaan formal yang digantikan oleh otomatisasi dan teknologi. Sementara itu, pekerjaan baru yang muncul lebih bersifat sementara dan informal
8.5.2a	Tingkat pengangguran setengah	• Seseorang bekerja tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya • Terbatasnya permintaan pekerjaan di pasar tenaga kerja. • Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi sehingga perusahaan cenderung mengurangi mengurangi jam kerja. Akibatnya, pekerja yang masih bekerja di perusahaan tersebut akan mengalami setengah menganggur. • Peningkatan otomatisasi dan penggunaan mesin dalam proses produksi sehingga
		mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Hal ini mengakibatkan sebagian pekerja hanya bekerja dalam kapasitas yang lebih rendah • Kurangnya keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang relevan atau tidak memiliki pendidikan yang memadai, mereka dapat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Akibatnya, mereka hanya mendapatkan pekerjaan dengan kapasitas yang lebih rendah dari yang sebenarnya



8.6.1*	Persentase usia muda (15- 24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	• Terbatasnya lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda yang tidak sekolah atau baru menamatkan pendidikan menengah dan perguruan tinggi • Belum sinkronnya dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja sehingga Sebagian penduduk usia muda yang baru menyelesaikan pendidikan tidak dapat langsung memasuki dunia kerja • Terbatasnya akses terhadap pelatihan tenaga kerja
8	Tujuan 9. Membangun infrastruktur berketahanan mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	
9.1.1a	Kondisi kemantapan jalan kabupaten	• Pemeliharaan jalan belum optimal • Sistem drainase jalan yang tidak baik • Peningkatan beban yang melebihi beban rencana sehingga umur rencana jalan tidak tercapai
9.1.2b	Jumlah pelabuhan penyeberangan	• Terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan dalam provinsi
9.2.1*	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB masih rendah	• Penumbuhan industri baru masih rendah • Pengembangan industri dan hilirisasi produk-produk pertanian dalam arti luas dan perikanan belum optimal • Produktivitas industri pengolahan masih rendah • Sentra-sentra IKM belum terbina secara optimal • Akses permodalan usaha bagi IKM masih terbatas • Integrasi pengembangan produk-produk industri kecil dan kerajinan ke dalam industri pariwisata belum optimal • Penerapan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah belum optimal • Daya saing produk-produk industri kecil masih rendah sehingga tidak kompetitif
9.2.1a	Laju pertumbuhan industri pengolahan masih rendah dan cenderung menurun	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	
9	Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	
17.1.1a	Rasio penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB masih rendah dan cenderung menurun	• Potensi pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah (pajak dan retribusi) belum tergali secara optimal karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan dan potensi daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang relatif rendah, masih ada kelemahan pada sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, serta kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya.
10	Tujuan 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	



6.1.1a	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum perpipaan	• Kapasitas penyediaan air bersih melalui perpipaan masih terbatas dan belum merata • Masih tingginya kebocoran air dalam distribusi • Pengembangan jaringan perpipaan lebih lambat dari pertambahan rumah tangga • Eksternalitas negatif pariwisata dalam penyediaan air publik (<i>public water supply</i>)
6.1.1b	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	• Sumber air baku dari air permukaan sangat terbatas • Tingginya biaya pemeliharaan dan operasional prasarana air baku karena masih lemahnya manajemen pengolahan air dan distribusi air
6.2.1e	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	• Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
6.2.1f	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	• Sebagian besar di wilayah kabupaten belum terbangun sistem pengelolaan air limbah terpusat. • Jaringan pelayanan sistem pengelolaan air limbah terpusat yang telah ada seperti DSDP masih terbatas • Pada wilayah yang tersedia jaringan, peningkatan jumlah sambungan rumah layanan IPAL masih kecil karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan sistem pengelolaan air limbah terpusat.
6.3.1b	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	• Keberadaan IPLT di kabupaten/kota hanya terpusat di wilayah kota sedangkan penduduk tersebar dengan kondisi geografis yang sulit mengakses layanan IPLT • Kepulauan Nusa Penida belum terbangun IPLT
6.3.2b	Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku berdasarkan baku mutu air kelas II	• Meningkatnya beban pencemaran sumber-sumber air permukaan yang berasal dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian
6.4.1b	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri belum dilaksanakan	• Komitmen pemerintah dalam memberikan insentif untuk penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri belum menjadi prioritas
No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
11	Tujuan 11. Mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	
11.2.1a	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	• Ketertarikan penggunaan transportasi umum masih rendah • Moda transportasi publik beserta rutenya masih terbatas
11.4.1a	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	• Pemerintah daerah belum bernisiatif menjadikan Kota Semarapura sebagai kota pusaka



11.6.1a	Persentase sampah daerah yang terkelola	• Implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kelurahan dan desa adat secara efektif • Pemanfaatan sampah dan daur ulang sampah secara produktif belum terbangun secara optimal termasuk fasilitas TPS-3R belum merata • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara merata • Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan industri belum merata
11.7.2a	Jumlah tindak pidana yang dilaporkan kepada polisi	• Kesadaran hukum di kalangan masyarakat belum merata • Ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak kriminalitas • Kurangnya pendidikan sehingga seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai atau layak yang dapat menyebabkan frustrasi dan keputusan yang pada akhirnya mendorong individu untuk terlibat dalam tindak kriminalitas. • Sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat cenderung melemah. Lingkungan yang tidak aman dan tidak terawat sering kali menjadi tempat berkembangnya kegiatan kriminal • Pengaruh media yang kuat dalam membentuk pandangan dan perilaku masyarakat. Konten-konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau kejahatan dapat mempengaruhi perilaku individu, terutama remaja yang rentan terhadap pengaruh luar.
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana	• Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) belum memprioritaskan penyediaan dukungan kebijakan dan regulasi daerah tentang penanggulangan bencana yang selaras dengan strategi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana nasional
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	
12	Tujuan 12. Menjamin konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	
12.4.2a	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah	• Rendahnya kesadaran usaha/ kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 • Lemahnya monitoring dan pembinaan pengelolaan limbah B3 terhadap usaha/ kegiatan yang memperoleh izin lingkungan



No	Indikator	Permasalahan/Tantangan
	sesuai peraturan perundangan	
12.5.1a	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang	- Implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber di desa/kelurahan dan desa adat belum efektif - Daur ulang sampah secara produktif belum terbangun termasuk fasilitas TPS-3R belum merata - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum merata sementara timbunan sampah semakin meningkat - Kesadaran masyarakat dan pelaku industri dalam pengelolaan sampah belum merata - Pembatasan penggunaan sampah plastik sekali pakai belum optimal dan merata - Kampanye pengelolaan sampah kurang merata di seluruh masyarakat
12.6.1a	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	- Kesadaran kalangan pelaku usaha tentang pentingnya penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dalam sistem manajemen lingkungan masih rendah - Sosialisasi tentang pentingnya penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 dalam sistem manajemen lingkungan belum optimal
12.7.1a	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	- Kesadaran masyarakat dan kalangan pelaku usaha tentang pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan yang terregister masih rendah - Sosialisasi tentang pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan yang terregister belum optimal
12.8.1a	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Pemahaman pejabat publik tentang pentingnya penerapan Standar Pelayanan Masyarakat dan teregister masih rendah
14	Tujuan 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya maritim, laut, dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan	
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/kebijakan/regulasi/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk nelayan skala kecil	Pentingnya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil yang diwujudkan dalam regulasi daerah belum menjadi prioritas daerah
14.b.1b	Jumlah nelayan yang terlindungi	- Belum tersedianya kerangka kebijakan dan regulasi di daerah bagi perlindungan nelayan secara komprehensif - Pengetahuan nelayan tentang pentingnya mendapatkan/memiliki KUSUKA belum merata
15	Tujuan 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	



15.1.1a	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	• Keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan hutan • Tingginya alih fungsi lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun karena
No	Indikator	• Permasalahan/Tantangan
		meningkatnya kebutuhan lahan seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi • Masih tingginya lahan kritis di dalam kawasan hutan • Alih fungsi lahan yang dapat mempercepat kelangkaan air dan menyebabkan lahan pada DAS rentan kritis • Pengelolaan lahan kurang mempertimbangkan kaidah konservasi
15.9.1a	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati	• Penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati belum menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan program pengelolaan keanekaragaman hayati • Kurang kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam pengawetan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan
16	Tujuan 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	
16.2.1a	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh	• Masih adanya anggapan yang membenarkan pola asuh dengan kekerasan • Adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dimana anak menjadi korbannya • Kurangnya kepedulian masyarakat saat ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan orangtuanya
16.2.1b	Kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	• Ketidakharmonisan hubungan di rumah, hubungan di dunia pendidikan, dan hubungan di lingkungan sekitar tempat tinggal cenderung meningkat • Buruknya komunikasi antar orangtua disinyalir berperan besar terhadap ada atau tidaknya kekerasan terhadap anak • Faktor ekonomi juga berperan besar dalam keharmonisan rumah tangga. Bila ekonomi terganggu, maka ada kemungkinan anak-anak yang menjadi pelampiasan. • Permainan atau gambar juga turut memiliki andil besar dalam kekerasan terhadap anak.
16.9.1a	Kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah masih rendah	• Pendataan kepemilikan akta lahir oleh Perangkat Daerah terkait belum memilah untuk penduduk 40% berpendapatan bawah masih rendah

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029



b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan cita-cita dan citra yang ingin dicapai. Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 dari Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

”TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka.

Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin.



Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Misi merupakan upaya dalam rangka meraih visi atau cita-cita dan citra yang hendak dicapai. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan terarah serta dapat menciptakan

kondisi yang memungkinkan (*enabling conditions*) bagi pencapaian visi Kabupaten Klungkung RPJMD Semesta Berencana ini berorientasi pada pembangunan berkebudayaan dan berkelanjutan, guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian yang berbasis kemitraan. Oleh karena itu, misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai

“PANCA SANTI” yang pelaksanaannya dilandasi semangat **“GEMA SANTI”** (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukan kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.



2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.
4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan
5. Berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.
6. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.



c. Program

Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga				
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
Program Pengelolaan Pendidikan	87.235.747.714	Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A	41	Klungkung
Program Pengembangan Kurikulum	117.451.900	Persentase Satuan Pendidikan Telah Mengimplementasikan Kurikulum yang Adaptif sesuai Hasil Asesmen	100,00	Klungkung
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	43.332.000	Persentase Pemenuhan Guru Sesuai SPM	100	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	223.016.766.072	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	26.98	Klungkung
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.495.233.800	Jumlah Pemuda yang Aktif Dalam Organisasi	128	Klungkung
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.821.026.200	Jumlah Atlet Kabupaten Yang Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Nasional	155	Klungkung
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	Jumlah kwartir ranting yang telah terbentuk	1	Klungkung
Dinas Kesehatan				



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	94.219.493.649	Angka Kematian Ibu	97/100000 KH	Klungkung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.667.687.188	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM sesuai standar	90	Klungkung
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	548.486.512	Persentase Fasyankes sesuai standar	80	Klungkung
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	378.085.136	Jumlah Tatanan yang memenuhi target pelaksanaan PHBS	5	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.972.007.774	Indek Reformasi Birokrasi	29,95	Klungkung
Rumah Sakit Umum Daerah				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	39.442.281.998	Angka Kematian Ibu	97/100.000 KH	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	153.519.727.510	Indek Reformasi Birokrasi	25.95	Klungkung
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7.190.378.206	Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air	59	Klungkung
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	101.088.657.038	Cakupan layanan air bersih	85	Klungkung



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	7.027.821.125	Persentase penduduk yang memperoleh akses pengolahan sampah	81,356	Klungkung
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.277.821.125	Persentase pemenuhan pengolahan air limbah domestik	100	Klungkung
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	4.227.316.000	Persentase drainase dalam kondisi baik	25	Klungkung
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	33.199.381.600	Cakupan terpenuhinya kebutuhan penataan bangunan di Kabupaten Klungkung	100.00	Klungkung
Program Penyelenggaraan Jalan	66.833.043.410	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	94	Klungkung
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	165.455.200	Persentase pekerjaan konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	95.00	Klungkung
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.493.751.500	Persentase kesesuaian tata ruang	91	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.898.431.177	Indek Reformasi Birokrasi	20.00	Klungkung
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman				
Program Pengembangan Perumahan	277.486.800	Persentase rumah layak huni	97.08	Klungkung
Program Kawasan Permukiman	1.055.286.800	Persentase kawasan kumuh	0.6158	Klungkung
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	4.577.486.800	Cakupan perumahan yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	98,15	Klungkung
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran				
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.966.639.274	Presentase Gangguan Trantibum Linmas	100%	Klungkung
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.902.516.740	Angka Kejadian Kebakaran, Penyelamatan, Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	44	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.356.425.303	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH		Klungkung
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
Program Penanggulangan Bencana	1.705.879.380	Indeks kapasitas daerah	0,77 (angka)	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.097.255.303	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	68,65	Klungkung
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				
Program Pemberdayaan Sosial	4.441.202.376	Persentase PSKS Yang Telah Diberdayakan (Persen)		Klungkung
Program Rehabilitasi Sosial	793.295.060	Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis (Persen)	46	Klungkung
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	529.465.667	Presentase Fakir Miskin yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (Persen)	60	Klungkung
Program Penanganan Bencana	556.822.950	Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (Persen)	100	Klungkung



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.125.011.875	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	32	Klungkung
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	104.420.000	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Persen)	19.24	Klungkung
Program Perlindungan Perempuan	266.611.448	Persentase Kasus Perempuan yang ditangani (Persen)	100	Klungkung
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	21.629.600	Data Gender dan anak (Dokumen)	1	Klungkung
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	303.914.350	Persentase Pemenuhan Hak Anak (persen)	60%	Klungkung
Program Perlindungan Khusus Anak	140.544.550	Persentase Jumlah Kasus Anak Yang Ditangani (Persen)	100	Klungkung
Dinas Ketenagakerjaan				
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	746.905.115	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	60 Orang	Klungkung
Program Penempatan Tenaga Kerja	1.858.362.199	Persentase Pelayanan Antar Kerja	60,90 %	Klungkung
Program Hubungan Industrial	111.203.000	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Hak - Hak Pekerja	5 %	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.298.559.365	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71 Indeks	Klungkung
Urusan Pemerintahan Pilihan				



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi				
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	79.475.600	Persentase Animo transmigrasi yang terpasilitasi	20 %	Klungkung
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan				
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	303.015.900	SKOR PPH	92.5	Klungkung
Program Penanganan Kerawanan Pangan	160.000.000	Terlaksananya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan	2 laporan	Klungkung
Program Pengawasan Keamanan Pangan	90.232.400	Presentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	100%	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.625.437.689	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76,1	Klungkung
Urusan Pemerintahan Pilihan				
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan				
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	112.966.000	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1336 ton	Klungkung
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.431.516.388	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	12.000 ton	Klungkung
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.000.000	Nilai Tambah Produksi Perikanan (Rp/kg)	Rp 5.700/kg	Klungkung
Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan				
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan				
Program Penetapan Tanah Ulayat	35.506.412	Persentase penetapan tanah Ulayat	25	Klungkung



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Pengurusan Hak - Hak Atas Tanah	358.778.212	Persentase berkas persertifikatan data aset tanah Pemerintah	0	Klungkung
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	109.111.950	Penyusunan dan penjilidan dokumen KLHS daerah Kabupaten Klungkung	1	Klungkung
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	260.451.848	Cakupan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	1	Klungkung
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.674.798.714	persentase kawasan RTH yang diselesaikan (persen)	100	Klungkung
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	228.950.020	persentase sampah perkotaan yang terpilah	60	Klungkung
Program Pengelolaan Persampahan	9.526.834.076	persentase sampah terolah	70	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.486.531.318	Indeks Reformasi Birokrasi	31	Klungkung
Urusan Pemerintahan Pilihan				
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan				
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	10.853.900	luas taman hutan raya kabupaten (ha)	1	Klungkung
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
Program Pendaftaran Penduduk	9.597.550	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran	90,00 Persen	Klungkung



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
		penduduk		
Program Pencatatan Sipil	1.806.695.450	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	50,00 Persen	Klungkung
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.851.000	Menurunnya data penduduk invalid	100,00 Persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.775.502.661	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,40 Poin	Klungkung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	14.084.000	jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga (desa)	2 desa	Klungkung
Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.887.636.515	persentase desa dengan administrasi desasesuai ketentuan	100 Persen	Klungkung
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.538.068.846	jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik (desa)	50 persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.747.231.830	Indek Reformasi Birokrasi	22	Klungkung
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
Program Pengendalian Penduduk	9.895.600	Unmeedneed (Persen)	100 persen	Klungkung
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.755.850.784	persentase PUS yang memperoleh konseling	40 persen	Klungkung
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	450.882.072	Angka ASFR (anak)	40 anak	Klungkung
Dinas Perhubungan				



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	37.441.011.940	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	90 persen	Klungkung
Program Pengelolaan Pelayaran	15.800.760.900	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Angkutan Penyeberangan	80 Persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.685.062.579	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	22 poin	Klungkung
Dinas Komunikasi Dan Informatika				
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	489.780.200	TINGKAT KETERBUKAA N INFORMASI PUBLIK	95 Nilai	Klungkung
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.357.844.644	CAKUPAN LAYANAN MEDIA INFORMASI BERJALAN LANCAR	100%	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.847.887.363	INDEKS REFORMASI PERANGKAT DAERAH	71.00 Indeks	Klungkung
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	44.198.800	PERSENTASE DATA STATISTIK SEKTORAL TERPUBLIKASI	100%	Klungkung
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	57.905.000	INDEKS KEMATANGAN KEAMANAN INFORMASI	5 Level	Klungkung
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan				
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	60.000.000	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)	10	Klungkung
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	519.172.100	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaaan Dan Pengawasan	60	Klungkung
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	35.000.000	Jumlah Koperasi Sehat	12	Klungkung
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	550.000.000	Jumlah pengurus/ pengawas yang bersertifikat	110	Klungkung
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	533.793.000	Jumlah Koperasi yang Di Bina	100	Klungkung
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	289.494.550	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	25	Klungkung
Program Pengembangan Umkm	845.873.098	Jumlah UMKM yang terfasilitasi promosi dan permodalan	80	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.152.234.590	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31	Klungkung
Urusan Pemerintahan Pilihan				
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	55.930.000	Persentasi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan penjualan B2	100	Klungkung
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	49.451.611.700	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100	Klungkung
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	123.666.250	Persentase kenaikan harga sembako	10	Klungkung
Program Pengembangan Ekspor	430.152.000	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	100	Klungkung
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	577.412.104	Presentase UTTP yang ditera / tera ulang	23	Klungkung
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.106.592.954	Persentase Pertumbuhan IKM	7	Klungkung
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	233.253.562	Tersedianya Data Potensi Investasi (Persen)	100	Klungkung
Program Promosi Penanaman Modal	413.660.000	Persentase terpenuhinya Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal di Kab. Klungkung (Persen)	100	Klungkung
Program Pelayanan Penanaman Modal	463.777.298	Persentase terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal	100	Klungkung
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	471.703.250	Persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Persen)	100	Klungkung
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	107.114.412	Persentase tersediannya Data Informasi Penanaman Modal	100	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.683.417.857	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	31,00 poin	Klungkung
Dinas Kebudayaan				
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				
Program Pengembangan Kebudayaan	4.171.124.242	Jumlah Publikasi Kebudayaan	2 Objek	Klungkung
Program Pembinaan Sejarah	2.685.461.512	Cakupan Objek Kebudayaan Yang Direkontruksi dan Direstorasi	100 Persen	Klungkung
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	241.910.920	Cukupan Cagar Budaya Yang Ditetapkan	100 Persen	Klungkung



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Pengelolaan Permuseuman	1.380.000.000	Persentase Pelaksanaan Sosialisasi Budaya	100 Persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.265.380.414	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31 Point	Klungkung
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan				
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				
Program Pembinaan Perpustakaan	232.169.124	Indeks Kegemaran Membaca	52,50 Indeks	Klungkung
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				
Program Pengelolaan Arsip	103.613.424	Indeks Kearsipan Daerah	66 Indeks	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.894.670.776	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31 Indeks	Klungkung
Dinas Pariwisata				
Urusan Pemerintahan Pilihan				
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	15.095.655.117	Jumlah destinasi yang siap dikunjungi	1 destinasi	Klungkung
Program Pemasaran Pariwisata	3.223.972.500	Presentase Destinasi Yang Dipromosikan	60 Persen	Klungkung
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	626.828.700	Persentase industri pariwisata sesuai standar	95 persen	Klungkung
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	365.883.150	Persentase pelaku pariwisata yang bersertifikat	85 persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.982.639.453	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31 point	Klungkung
Dinas Pertanian				
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.054.573.452	Cakupan Pemenuhan Sarana Pertanian	50 Persen	Klungkung
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	309.361.995	Cakupan Pemenuhan Prasarana Pertanian	100 Persen	Klungkung
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	743.188.900	Persentase Angka Kesakitan Hewan	≤ 10 Persen	Klungkung
Program Penyuluhan Pertanian	205.500.000	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Anjuran	57 persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.633.737.945	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31 Poin	Klungkung
Sekretariat Daerah				
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
Sekretariat Daerah				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.432.620.394	Jumlah PD dengan budaya kerja OPTIMUM	5	Klungkung
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.756.484.881	Persentase Desa Sadar Hukum yang dievaluasi	91	Klungkung
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.596.916.050	Persentase Capaian Program Prioritas	100%	Klungkung
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
Sekretariat DPRD				
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	31.865.204.976	Persentase Pelayanan Kedinasan DPRD	100 Persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.693.642.496	Indeks Reformasi Birokrasi	53 indeks	Klungkung
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Perencanaan				
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	508.119.200	Persentase sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dengan capaian kinerja sangat tinggi (91% ≤ 100%)	100 persen	Klungkung



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.838.086.312	Persentase sasaran strategis perangkat daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi (91% <= 100%)	95 persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.208.597.966	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	77 indeks	Klungkung
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah				
Keuangan				
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	127.807.100.502	Opini atas Laporan Keuangan adalah WTP = 100%, WDP = 75%, Disclaimer = 50%	100,00 Persen	Klungkung
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	664.972.312	Persentase Nilai Temuan Barang Milik Daerah	1,00 Persen	Klungkung
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.298.998.849	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	11,63 Persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.947.028.219	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 Poin	Klungkung
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Kepegawaian				
Program Kepegawaian Daerah	1.861.768.085	Persentase Layanan Kepegawaian Sesuai SOP	100	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.856.896.697	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75,00 Indeks	Klungkung
Pendidikan Dan Pelatihan				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.337.101.963	Persentase Pemenuhan kebutuhan Pengembangan Kompetensi	80 pesen	Klungkung
Badan Riset Dan Inovasi Daerah				
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
Penelitian Dan Pengembangan				



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.299.306.200	Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan Renbangda	33.33 Persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.925.451.881	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67 Persen	Klungkung
Inspektorat				
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan				
Inspektorat Daerah				
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.561.666.536	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (persen)	95	Klungkung
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	550.762.392	Persentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (persen)	93,9	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.418.242.194	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	32,98	Klungkung
Kecamatan Klungkung				
Unsur Kewilayahan				
Kecamatan				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	181.418.600	Indeks Kepuasan Masyarakat (persen)	88,35 persen	Klungkung
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.795.065.926	Desa dengan klasifikasi desa mandiri (Desa)	3 desa	Klungkung
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	57.598.900	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup (kasus)	125 kasus	Klungkung
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.311.350	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan (potensi)	4 potensi	Klungkung
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.699.100	Persentase Desa Taat Azas (persen)	100 persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.148.539.103	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	21 poin	Klungkung
Kecamatan Banjarangkan				



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	12.388.165.200	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,35	Klungkung
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	9.970.000	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri	9	Klungkung
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	38.908.200	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup (kasus)	150	Klungkung
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.443.050	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan (potensi)	3	Klungkung
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.059.000	Persentase Desa Taat Azas (persen)	100	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.417.229.285	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	21	Klungkung
Kecamatan Nusa Penida				
Unsur Kewilayahan				
Kecamatan				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.057.113.710	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,35	Klungkung
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	31.000.000	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri	9	Klungkung
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	94.200.000	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup (kasus)	0	Klungkung
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	48.420.000	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan (potensi)	3	Klungkung
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	108.588.000	Persentase Desa Taat Azas (persen)	100	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.960.726.795	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	21	Klungkung
Kecamatan Dawan				
Unsur Kewilayahan				
Kecamatan				



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	170.524.450	Indeks Kepuasan Masyarakat (persen)	88,35 persen	Klungkung
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	28.419.800	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri (desa)	10 desa	Klungkung
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	12.600.000	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup (kasus)	175 kasus	Klungkung
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.252.400	Jumlah Potensi Kerawanan Sosial di Kecamatan (potensi)	3 potensi	Klungkung
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	82.388.000	Persentase Desa Taat Azas (persen)	100 persen	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.562.331.544	Indeks Reformasi Birokrasi (poin)	21 poin	Klungkung
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				
Unsur Pemerintahan Umum				
Kesatuan Bangsa Dan Politik				
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.153.240.250	Angka kriminalitas di Kabupaten Klungkung (Kasus)	75 Kasus	Klungkung
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	46.278.562.320	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan (Persen).	80%	Klungkung
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	29.243.450	Persentase Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah (Persen).	86,91%	Klungkung
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	139.520.950	Penurunan jumlah kasus narkoba (Kasus).	19 Kasus	Klungkung



Uraian	Pagu (Rp)	Indikator	Target	Lokasi
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	550.665.750	Penurunan Potensi Konflik Sosial (Potensi konflik).	10 Potensi Konflik	Klungkung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.728.343.070	Indek Reformasi Birokrasi (Poin)	23 Poin	
TOTAL	1.627.717.562.607			

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	32.867.521.450,00		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.159.467.069,00	Persentase Jumlah SMP Terakreditasi Minimal A Proporsi GTK SMP bersertifikat PPG	62 % 68,18 %
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.234.675.424,00	Persentase Jumlah PAUD Terakreditasi B	91,73%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	892.365.740,00	Persentase Jumlah Lembaga Pendidikan NonFormal Terakreditasi	100%



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	43.901.060,00	Persentase jumlah lembaga PAUD dan Pendidikan NonFormal telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	100%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	71.925.520,00	Persentase jumlah SD dan SMP telah menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	100%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.236.400,00	Indeks Distribusi Guru	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.747.320,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	91,58%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	228.093.379.686,00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun	12 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.803.040.224,00	Tingkat Disiplin Aparatur	99%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.871.563,00	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.331.168,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.689.559,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda	426.359.615,00	Jumlah Pemuda yang Mengikuti Pelatihan,	130 orang



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Kader Kabupaten/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Potensi Diri	
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000,00	Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah yang Aktif	2 Organisasi
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.021.842.631,00	Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif Melaksanakan Kompetisi Jumlah Pelatih Cabang Olahraga yang Bersertifikat	165 Orang 52 Cabor
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.627.778.800,00		
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000,00	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarcab	300 orang
Dinas Kesehatan			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.530.683.316,00	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama	80 Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.597.235.149,00	Capaian Indeks keluarga sehat	0,75 Indeks
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	8.528.240,00	Tersedianya data komdat	12 bulan
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.203.177.320,00	tercapainya pelayanan rekomendasi perijinan ijin RS Kelas C dan D serta FKTP	100 persen
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk	263.561.225,00	Persentase Fasilitas	90 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	456.178.121,00	Persentase Tenaga Kesehatan Memiliki Sertifikat Kompetensi	80 Persen
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.962.920,00	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan Optikal dan Umot yang di bina	60 sarana
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	110.064.000,00	Persentase terlaksananya pendampingan IRTP untuk penerbitan SPP-IRT	80 Persen
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	54.823.560,00	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan tempat pengelolaan makanan (TPM) dan depot air minum (DAM)	12 dokumen
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	198.537.000,00	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan post market pada produk industri rumah tangga pangan (IRTP)	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.591.000,00	Jumlah kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten	100 persen
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.919.794,00	Persentase Rumah Tangga	87,2 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Ber-PHBS	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.790.400,00	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.588.779,00	Persentase hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67.944.219.460,00	Tersusunnya Laporan penatausahaan Keuangan perangkat daerah tepat waktu	1 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.549.012,00	Persentase Capaian Disiplin aparatur dan administrasi ASN	90 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.030.187,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.252.000,00	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.864.000,00	Persentase capaian pemeliharaan BMD	90 persen
RSUD Gema Santi Nusa Penida			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.076.800.000,00	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi utama	80 Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.011.323.920,00	Capaian Indeks keluarga sehat	0.75 Indeks



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.711.802.400,00	Tersedianya Pengadaan Sarana Sesuai ASPAK	100 persen
Peningkatan Pelayanan BLUD	16.112.652.542,00	Indek Kepuasan Masyarakat	76 indeks
UPTD Puskesmas Banjarangkan I			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	816.480.000,00	Capaian Indeks keluarga sehat	0.75 indeks
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.660.000,00		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	454.470.500,00	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90 Persen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.180.000,00		
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.309.189.561,00	Indek Kepuasan Masyarakat	76 indeks
UPTD Puskesmas Banjarangkan II			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.340.000,00	Capaian Indeks Keluarga Sehat	0.75 Persen
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	828.870.400,00	Capaian Indeks Keluarga Sehat	0.75 Persen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.715.600,00		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	388.444.141,00	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90 persen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	14.394.000,00	Persentase Desa yang	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.801.733.523,00	Indek Kepuasan Masyarakat	76 indeks
UPTD Puskesmas Dawan I			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	756.677.000,00	Capaian Indeks keluarga sehat	0.75 indeks
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	16.298.000,00		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	441.764.703,00	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDM sesuai standar	90 Persen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.068.000,00	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100 persen
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.005.820.881,00	Indek Kepuasan Masyarakat	76 indeks
UPTD Puskesmas Dawan II			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	768.025.000,00	Capaian Indeks keluarga sehat	0.75 indeks
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	4.626.000,00		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	561.839.670,00		
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.392.000,00	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100 persen
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.405.159.138,00	Indek Kepuasan Masyarakat	76 indeks
UPTD Puskesmas Nusa Penida I			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	833.443.000,00	Capaian Indeks keluarga	0.75 indeks



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Kabupaten/Kota		sehat	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	7.341.000,00		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	446.226.820,00	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90 persen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.536.000,00	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100%
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.411.194.159,00	Indek Kepuasan Masyarakat	76 indeks
UPTD Puskesmas Nusa Penida II			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	565.854.000,00	Capaian Indeks keluarga sehat	0.75 Indeks
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	958.000,00		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	316.593.861,00	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	90 persen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.402.000,00	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100 persen
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.006.855.909,00	Indek Kepuasan Masyarakat	76 indeks
UPTD Puskesmas Nusa Penida III			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	833.503.300	Capaian Indeks keluarga sehat	0.75 indeks



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	9.186.000,00		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	723.227.940,00	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMk sesuai standar	90 persen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.630.700,00	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100 persen
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.984.655.404,00	Indek Kepuasan Masyarakat	76 indeks
UPTD Puskesmas Klungkung I			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	824.657.000,00	Capaian Indeks keluarga sehat	0.75 indeks
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.793.000,00	Tersedianya data komdat	12 bulan
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	519.623.528,00	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMk sesuai standar	90 persen
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.900.000,00	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100 persen
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.911.374.780,00		
UPTD Puskesmas Klungkung II			
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	765.790.000	Capaian Indeks keluarga sehat	0.75 indeks
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.686.000		
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk	383.409.054	Persentase Fasilitas pelayanan	90 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		kesehatan yang membuat perencanaan kebutuhan SDMK sesuai standar	
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.568.000	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	100 persen
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.830.166.362	Peningkatan Pelayanan BLUD	76 Indeks
Rumah Sakit Umum Daerah			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.803.329.000,00	Persentase kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar	86%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	Cakupan tersedianya pelayanan khusus peserta JKN asal Klungkung	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.910.816.962,00	Tersusunnya Laporan penatausahaan Keuangan perangkat daerah tepat waktu	12 Dokumen
Peningkatan Pelayanan BLUD	175.135.822.611,00	Indek Kepuasan Pelanggan	85 poin
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.118.867.000,00	Persentase tanggul pengaman pantai dalam kondisi baik	16 persen
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha	5.502.973.568,00	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi	59.50 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		baik	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.095.528.602,00	Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat	3.330 persen
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	7.009.748.600,00	Jumlah kepemilikan TPS3R tiap desa	54 persen
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	345.527.800,00	Jumlah pemenuhan rumah terhadap akses pengolahan air limbah	57.941 persen
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.277.242.600,00	Persentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	10 persen
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.157.983.350,00	Persentase penataan bangunan di kabupaten klungkung	100 persen
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	65.099.563.735,00	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	74.50 persen
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	134.662.580,00	Persentase tenaga konstruksi yang bersertifikat kompetensi	65 persen
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	101.502.600,00	Persentase informasi jasa konstruksi daerah kabupaten/kota	60 persen
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	21.127.300,00	Persentase pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	80 persen
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	862.046.600,00	Persentase tersedianya informasi tata ruang wilayah melalui peta	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		digital dan peta analog	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	365.986.200,00	Persentase tersedianya dokumen perencanaan tata ruang	100 persen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	41.815.100,00	Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.366.880,00	Persentase Hasil Evaluasi hasil Evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.071.477.845,00	Tersusunnya Lapaoran Penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	127.447.450,00	Tingkat Disiplin Aparatur	95 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	849.944.030,00	Persentase Surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.233.000,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.163.440,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	75 persen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	254.845.950,00	Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial	1 dokumen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		sebagai lokasi relokasi perumahan	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	407.328.000,00	Persentase kawasan kumuh	5.28 persen
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	124.782.700,00	Persentase rumah yang sudah dilengkapi PSU	100 persen
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Presentase gangguan trantibum linmas	100 persen
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.791.752.623,00	Tersedianya Laporan Kegiatan Satlinmas dan Laporan Pendataan Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan Terhadap Pelaksanaan Perda	36 Laporan
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	465.686.372,00	Persentase penegakan pelanggaran perda/perkada	100 persen
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.182.972.608,00	Angka kejadian kebakaran, penyelamatan, evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	40 kejadian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.125.616,00	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi KinerjaTepat Waktu	37 dokumen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.533.912.196,00	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.202.164,00	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.890.520,00	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.690.000,00	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.546.880,00	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Kendaraan, Gedung, Peralatan dan Pemeliharaan Mesin Tepat Waktu	12 Laporan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Indeks Kapasitas Daerah	0,77 Angka
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	16.290.420,00	Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Secara Tatap Muka	200 orang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	238.555.680,00	Jumlah penduduk di Kab.Klungkung	200 orang



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.111.291.996,00	Persentase warga negara mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 persen
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	30.557.300,00	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana	1 dokumen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	68.65 poin
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.826.600,00	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun tepat waktu	7 Dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.685.488.993,00	Laporan administrasi keuangan tersusun tepat waktu	12 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.593.484,00	Capaian disiplin aparatur	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.084.500,00	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.216.124,00	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.637.047,00	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	627.978.084,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	24 dokumen
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.134.617.922,00	Persentase Pengembangan PSKS	10 persen
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penurunan penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis	46 persen
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	702.765.080,00	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan pokoknya di luar panti	46 persen
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	472.783.621,00	Data Fakir Miskin	1 Dokumen
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	507.429.652,00	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.449.464,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82 poin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.335.355.582,00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	12 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.071.000,00	Tingkat Disiplin Aparatu	97,50 Persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.365.418,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.199.420,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.029.656,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	16.111.560,00	Jumlah kelompok responsif gender (OPD)	48 OPD
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	92.947.400,00	Persentase kelompok usaha perempuan yang dibina	37 persen
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	114.416.220,00	Jumlah Sosialisasi PKDRT	12 desa
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	251.278.498,00	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		kekerasan	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.672.000,00	Jumlah Orang yang dilatih manajemen dan penanganan kasus	21 orang
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.919.560,00	Tersedianya data gender dan anak	1 dokumen
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	88.592.740,00	Persentase lembaga pemerintahan, non pemerintah dan dunia usaha dalam PHA	80 persen
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	114.909.320,00	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	75 persen
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	62.624.000,00	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	20 kegiatan
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.563.500,00	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100 persen
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	138.454.180,00	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	25 persen
Dinas Ketenagakerjaan			
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	179.583.300,00	Jumlah Pelatihan	20 orang



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kopetens	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	621.038.320,00	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	40 orang
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	984.131.280,00	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program kewirausahaan	110 orang
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	28.106.080,00	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	200 orang
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.117.300,00	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial	5 persen
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	63.251.240,00	Persentase Perselisihan Termediasi	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.077.580,00	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.943.500.512,00	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.492.216,00	Tingkat Disiplin Aparatur	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.826.440,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Kantor	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.467.536,00	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.666.503,00	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100 persen
Urusan Pemerintahan Pilihan			
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.372.760,00	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi	20 kali
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	95.928.020,00		
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	133.233.450,00	Angka Kecukupan Energi (kkal/kapita)	2100 kkal/kapita
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	33.327.520,00	Tersusunnya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	124.285.530,00	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi penanganan kerawanan pangan	2 Laporan
Program Pengawasan Keamanan Pangan		Presentase Keamanan Pangan dan Mutu Pangan	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	82.250.900,00	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Standar Keamanan Pangan	4 desa
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.415.990,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,5 poin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.598.178.576,00	Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	3 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	334.152.576,00	Capaian Disiplin Aparatur	80 Persen (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	633.732.760,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 Persen (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.911.606,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.868.751,00		
Urusan Pemerintahan Pilihan			
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.462.724.456,00	Produktivitas Perikanan Tangkap	1,6 ton/nelayan/tahun
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	677.245.840,00	Tingkat Produktivitas Perikanan Budidaya (kg/m2)	24.03 kg/M2
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	511.165.570,00	Laporan Ketersediaan Benih Ikan Unggul	12 Laporan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	954.787.960,00	Jumlah produk yang layak konsumsi	3 produk ikan
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	312.194.158,00	persentase subyek dan obyek tanah ulayat	25 persen
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	107.991.700,00	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten Kota yang disusun	1 dok
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59.568.448,00	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup yang berlaku serta menghindari terjadi pencemaran dan pengerusakan lingkungan hiduo	50 usaha
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	171.297.369,00	Meningkatnya ketaatan pegelolaan lingkungan hidup	90 persen
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.702.476.465,00	persentase kawasan RTH perkotaan yang dipelihara	100%
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	232.394.900,00	persentase sampah perkotaan yang terpilah	60 persen
Pengelolaan Sampah	15.320.029.472,00	Persentase pengelolaan sampah perkotaan	75 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.543.408,00	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.873.794.046,00	Laporan keuangan terkirim tepat waktu	100 persen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.325.368.473,00	tingkat disiplin aparatur	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	890.830.380,00	cakupan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur	100 persen
Urusan Pemerintahan Pilihan			
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan			
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	10.853.720,00	lestarinya taman hutan raya (tahura) kabupaten	1 ha
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10.881.940,00	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100 persen
Pelayanan Pencatatan Sipil	4.506.800,00	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100 persen
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.060.066.520,00	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipi	100 persen
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	81.089.640,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.760.160,00	Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131.792.520,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.943.852.280,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang / Hari
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.742.300,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.291.878.280,00	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	65 Dokumen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.398.276,00	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.965.460,00	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	19 unit
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		jumlah kerjasama dengan pihak ke tiga	1 desa



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.491.508.911,00	persentase desa yang capaian kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	85 persen
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.005.655.208,00	jumlah desa dengan lembaga kemasyarakatan aktif dan usaha ekonomi baik	2 desa
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.331.890,00	hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.663.256.251,00	tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	100 persen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.589.380,00	tersusunnya laporan disiplin aparatur	12 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.795.000,00	cakupan pemenuhan layanan administrasi umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.764.379.087,00	cakupan pemenuhan jasa penunjang	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.315.840,00	persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	152.370.340,00	persentase jumlah peserta KB aktif	80%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	764.614.508,00	persentase PUS yang memperoleh KIE	80 persen
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas	847.624.300,00		



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	360.736.840,00		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	66.750.000,00		
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	759.075.744,00	pelatihan penyuluh	60 persen
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.001.700.000,00		
Dinas Perhubungan			
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	132.167.100,00	Persentase Pemenuhan Jaringan LLAJ Kabupaten	93 Persen
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.894.577.210,00	Persentase pemenuhan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	85 persen
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	934.730.780,00	Terpenuhinya pengelolaan prasarana terminal tipe C	90 persen
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	739.578.020,00	Terpenuhinya pengelolaan prasarana parkir di kabupaten	
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	163.143.080,00	Persentase pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji di	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		kabupaten	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	3.726.200,00	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	75 persen
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	14.848.280,00	Persentase pemenuhan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	60 persen
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.371.737.400,00	Persentase pemenuhan layanan Angkutan Umum dalam Kab. Klungkung	80 persen
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.622.400,00	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	85 persen
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	8.664.469.450,00	Persentase Layanan sarana angkutan laut yang laik operasi (%)	80 persen
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	83.605.500,00	Pengembangan prasarana dan teknologi Perhubungan yang dilaksanakan	80 persen
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.773.677.730,00	terpenuhinya prasarana pelabuhan sesuai standar	80 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.525.320,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 poin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.623.970.808,00	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tersusun tepat waktu	81 orang
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.775.000,00	Tingkat Disiplin Aparatur	95 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.817.410,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.887.190.718,00	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.652.047,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
Dinas Komunikasi dan Informatika			
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	787.760.700,00	Persentase Badan Publik Mempublikasikan DIP	40 persen
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.870.857.468,00	Persentase Pengelolaan SPBE berjalan baik	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.829.360,00	Persentase hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.679.170.453,00	Tersusunnya Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu	12 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.050.036,00	Tingkat Disiplin Aparatur	95.00 Persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.520.984,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.822.168,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.973.131,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	6.256.380,00	Persentase Data dan Informasi yang tersedia	100 persen
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.234.920,00	Persentase Infomasi Publik yang Diamankan	100 persen
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan			
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.950.600,00	Presentase terlaksananya Penyuluhan, Sosialisasi dan Verifikasi permohonan Ijin Koperasi	100 Persen
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	76.821.152,00	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi	24 kali
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.614.680,00	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75 koperasi
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	231.069.600,00	Jumlah Pengurus/Penga was yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	60 orang
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.877.980,00	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan, Promosi,	10 koperasi



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Kemitraaan Antar Koperasi, UKM, Lembaga Sejenis	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	345.161.840,00	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	20 persen
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	832.661.344,00	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM	80 unit
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.557.080,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.261.525.660,00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	4 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.918.940,00	Tingkat Disiplin Aparatur	95 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.171.900,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.050.016,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.817.607,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.964.900,00	Persentase ketepatan distribusi B2	100 persen
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.127.441.778,00	Presentase pembangunan dan pengelolaan	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		sarana distribusi perdagangan	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	11.785.357.833,00	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Kabupaten Klungkung	100 persen
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.203.060,00	Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung	10 Persen
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	639.080,00	Persentase pelaku Pupuk dan Pestisida yang memenuhi kriteria Bersubsidi di Kabupaten Klungkung	100 persen
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	631.960,00	Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung	100 persen
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	183.828.404,00	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTTP (lokasi)	27 lokasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	452.350.858,00	Persentase tumbuhnya Industri Rumah	7 IKM



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Tangga Baru	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	57.226.844,00	Persentase terpenuhinya Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal (Laporan	100%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	149.794.160,00	Persentase tersedianya Data Potensi perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal	100%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	284.184.500,00	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	319.637.661,00	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	532.082.952,00	Persentase Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.842.454,00	Tersedianya Laporan Perizinan dan Non Perizinan	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.012.620,00	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja tersedia tepat waktu	32 Dokumen/Laporan



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		(Laporan)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.325.803.727,00	Jumlah Laporan Keuangan tersedia tepat waktu	24 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.087.760,00	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.447.310.620,00	Persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.074.000,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.236.160,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100%
Dinas Kebudayaan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Publikasi Kebudayaan	2 objek
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.564.655.700	Jumlah Pelaku Budaya	120 orang
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.935.909.068,00		
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.190.790.592,00		
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	20.383.900	Jumlah Kajian Yang Tersedia	1 objek
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	40.716.700,00	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Terpelihara	1 objek
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.345.744.752,00	Jumlah Inovasi Yang Dibuat	2 objek
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.310.700	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Perangkat Daerah Yang Ditindaklanjuti	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.798.392.571,00	Persentase Laporan Penatausahaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 persen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	183.297.888	Persentase capaian disiplin pegawai	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.406.200,00	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.317.868,00	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.095.271,00	Persentase BMD Yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100 persen
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.952.840,00	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Sesuai Kewenangannya	1,25 Persen
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.481.048,00	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	0,50 Persen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	19.877.480,00	Jumlah OPD dengan Nilai	11 OPD



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Kearsipan Baik	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	82.548.375,00	Persentase Pearangkat Daerah dengan Sarana Prasarana Memadai	36,33 Persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.764.804,00	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81 poin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.399.530.736,00	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	4 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.916.804,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	100 Persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	608.022.064,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 Persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.976.620,00	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.522.194,00	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	50 Persen
Dinas Pariwisata			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	13.003.404.232,00	Persentase Sarana Prasarana di Destinasi Sesuai Standa	70 Persen
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	1.061.302.564,00	Persentase Pemantauan Terhadap Usaha	75 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Jasa Industri Pariwisata	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.862.925.100,00	Persentase Informasi Pariwisata yang diakses	100 Persen
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	824.764.340,00	Jumlah Kerjasama Ekraf yang Terlaksana	2 Dokumen
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.492.593.819,00	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata	85 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.777.400,00	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.218.862.847,00	Persentase laporan keuangan terkirim tepat waktu	100 Persen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	559.285.644,00	Persentase capaian disiplin pegawai	100 Persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	695.631.300,00	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	100 Persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.640.550,00	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.242.942,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 Persen
Dinas Pertanian			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	214.037.760,00	Persentase Luas Tanam yang Menerapkan	51 Persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Teknologi Pertanian	
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	698.160.446,00	Persentase Induk Sapi (Akseptor) yang Menggunakan Teknologi IB	58 Persen
Pengembangan Prasarana Pertanian	12.442.520,00	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian	100 Persen
Pembangunan Prasarana Pertanian	417.680.540,00	Persentase Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	100 Persen
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	26.313.844,00	Persentase Peningkatan Populasi Sapi	0,5 Persen
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	410.024.144,00	Persentase Hewan/Ternak yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Hewan	100 Persen
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	173.379.492,00	Persentase Hewan/Ternak Terindikasi Berpenyakit Zoonosis yang Diberantas	100 Persen
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan	100 Persen
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	32.732.100,00	Cakupan Produsen Pangan Hewani yang Dipanta	100 Persen
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	152.611.060,00	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	100 Persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,5 Persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.958.726.937,00	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat	14 Laporan



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Daerah Tepat Waktu	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	392.377.612,00	Tingkat Disiplin Aparatur	100 Persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.590.977,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100 Persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.864.256,00	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.797.360,00	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100 Persen
Sekretariat Daerah			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
SEKRETARIAT DAERAH			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.339.490,00	Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.220.430.826,00	Presentase laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	90 persen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	586.046.812,00	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.866.042.673,00	Presentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 persen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	918.801.424,00		



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	873.454.220,00	Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan	100 persen
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.873.679.678,00	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH	100 persen
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	479.999.400,00	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumah Tangan Sekretariat Daerah	100 persen
Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
Administrasi Tata Pemerintahan	252.792.160,00	Cakupan terpenuhinya kebijakan bidang pemerintahan	100 persen
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.357.645.040,00	Presentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100 persen
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	86.987.390,00		
Bagian Hukum			
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	965.780.034,00	Jumlah produk hukum yang ditetapkan tepat waktu Presentase capaian RAD HAM terlaporkan	100 persen
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.699.146.532,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	100 persen
Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	277.467.124,00	Persentase Terpenuhinya	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Kebutuhan Ketersediaan Pangan	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	279.840.420,00	Persentase Pelaksanaan Pembangunan daerah sesuai rencana	100 persen
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	237.190.984,00	Cakupan Fasilitasi Kegiatan Bidang Sumber daya Alam	100 persen
Bagian Pengadaan Barang/Jasa			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	566.016.313,00	Level Kematangan UKPBJ	3 Level
Bagian Organisasi			
Penataan Organisasi	360.738.980,00	Persentase Rencana Aksi RB Terealisasi	90%
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
SEKRETARIAT DPRD			
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.355.806.772,00	Persentase Rancangan Perda yang dibahas	100 persen
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.126.242.480,00	Persentase Hasil Pengawasan Pemerintah yang ditindaklanjuti	100 persen
Peningkatan Kapasitas DPRD	23.290.275.676,00	Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	100 persen
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	797.710.484,00	Persentase Pokir Terusulkan	100 persen
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indeks Reformasi Birokrasi	63 Indeks
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.636.456,00	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78 poin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.082.932.599,00	Jumlah Laporan Keuangan	4 laporan



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Terkirim Tepat Waktu	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	924.868.808,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.375.050.776,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.200.000,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.159.689,00	cakupan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.812.062.543,00	Persentase terpenuhinya Layanan keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	100 persen
Layanan Administrasi DPRD	551.211.066,00	Persentase terpenuhinya Layanan Rapat DPRD	100 persen
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PERENCANAAN			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	652.489.920,00	Persentase perencanaan pembangunan daerah tersusun tepat waktu	100 persen
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	43.966.000,00	Cakupan ketersediaan	90 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Daerah		data/informasi pembangunan daerah	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	68.799.820,00	Tingkat konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 persen
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	569.882.695,00	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PPM	95 Persen
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	315.005.154,00	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang PSDA	95 persen
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	98.727.040,00	Rata-rata kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan dan kesesuaian hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan bidang infrastruktur	95 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.666.610,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.601.007.271,00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun	5 laporan



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Tepat Waktu	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.906.400,00	Tingkat Disiplin Aparatur	96 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.212.466.968,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.021.484,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.488.752,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
KEUANGAN			
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	531.605.360,00	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100 persen
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	564.615.365,00	Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	85 persen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	452.285.660,00	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	100 persen
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	215.033.596.255,00	Persentase Bantuan yang Disalurkan	100 persen
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.555.780,00	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100 persen
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.215.596.342,00	Persentase Realisasi Pajak daerah	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.085.784,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 poin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.088.080.577,00	Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	5 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	173.436.068,00	Tingkat disiplin aparatur	97 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.164.817.284,00	Cakupan pemenuhan layanan administrasi umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.394.082,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.419.342,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 Persen
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
KEPEGAWAIAN			
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	836.661.601,00	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	52 persen
Mutasi dan Promosi ASN	417.090.650,00	Persentase Jabatan yang terisi	100 Dokumen
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	777.144.660,00	Persentase ASN dengan Nilai Kinerja Baik	95 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.443.700,00	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,40 Indeks
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.688.171.847,00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	5 Laporan



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.323.500,00	Tingkat Disipli Aparatur	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.265.400,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.318.000,00	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.340.409,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.331.761.500,00	Persentase Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi	95 persen
Badan Riset dan Inovasi Daerah			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase ketersediaan hasil kelitbangan untuk kebutuhan penyusunan Renbangda	33.33 persen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	392.089.200,00	Persentase Rencana Kelitbangan yang Terlaksana	76.66 persen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	114.264.280,00	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti	85 persen
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	104.748.240,00	Persentase rekomendasi hasil	85 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	803.732.680,00	Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	50 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.850.150,00	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.677.754.545,00	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Tepat Waktu	5 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.657.000,00	Tingkat Disiplin Aparatur	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.727.455,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.436.080,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.892.095,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
Inspektorat			
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
INSPEKTORAT DAERAH			
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.086.785.764,00	Persentase pelaksanaan pengawasan internal sesuai PKPT (persen)	100 persen
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.587.212.084,00		



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Pendampingan dan Asistensi	711.687.912,00	Terpenuhinya kebutuhan pendampingan dan asistensi (persen)	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.901.304,00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.071.108.345,00	Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu	5 laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	546.412.624,00		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	805.116.720,00	Cakupan pemehuan layanan administrasi umum	100 persen
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.865.525.000,00	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.722.284,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang kantor	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.785.203,00	Persenatse pemeliharaan barang milik daerah	100 persen
Kecamatan Klungkung			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,36 persen
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.387.420,00	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal yang terfasilitasi	100 persen
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6.663.380,00	Persentase perencanaan dan pelaksanaan	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		kegiatan pemerintahan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.265.780,00	persentase pelayanan perijinan/non perijinansesuai SOP	100 persen
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.320.960,00	persentase layanan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana (persen)	100 persen
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.000.000,00	laporan kegiatan koordinasi penyelenggara n ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.605.960,00	persentase pelanggaran perda dan perbup di tangani	100 persen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.961.440,00	persentase terlaksananya tugas forkompicam	100 persen
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.542.420,00	persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.678.384,00	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.074.192.886,00	Persentase	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.087.304,00	Tingkat Disiplin Aparatur	90 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.206.044,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.355.484,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.348.531,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
Kelurahan Semarapura Kangin			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	322.830.670,00	indeks kepuasan masyarakat kelurahan	88,36 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.530.740,00	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.140.348.991,00	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)	100 persen
Kelurahan Semarapura Kaja			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	403.674.036,00	indeks kepuasan masyarakat kelurahan	88,36 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.994.600,00	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		tepat waktu (persen)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.863.811,00	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)	100 persen
Kelurahan Semarapura Kauh			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	460.208.566,00	indeks kepuasan masyarakat kelurahan	88,36 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.034.280,00	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.205.485,00	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)	100 persen
Kelurahan Semarapura Klod			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	558.597.424,00	indeks kepuasan masyarakat kelurahan	88,36 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.054.780,00	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.607.581,00	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)	100 persen
Kelurahan Semarapura Klod Kangin			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		jumlah kelurahan dengan klasifikasi	1 kelurahan



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		kelurahan swasembada (kelurahan)	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	509.254.740,00	indeks kepuasan masyarakat kelurahan	88,36 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.347.900,00	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.074.510,00	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)	100 persen
Kelurahan Semarapura Tengah			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	325.852.710,00	indeks kepuasan masyarakat kelurahan	88,36 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.007.900,00	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan laporan kinerja tersedia tepat waktu (persen)	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.819.457,00	rata-rata capaian output sub kegiatan administrasi umum (persen)	100 persen
Kecamatan Banjarangkan			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	123.849.620,00	Cakupan Kordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	77.895.400	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		Pemerintahan Yang Difasilitasi	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.951.200	Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan Sesuai SOP	100 persen
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.389.500	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana	100 persen
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	34.817.500	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan	100 persen
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.062.700	Persentase Pelanggaran Perda/Perbup Yang Ditangani	100 persen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.441.680	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimcam	100 persen
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.057.920,00	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.461.680,00	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.984.000.527,00	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	100 persen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.517.924	Tingkat Disiplin Aparatur	92 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.947.355,00	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.202.920,00		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.659.800,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen
Kecamatan Nusa Penida			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (persen)	88,35 Persen
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	362.759.220,00	Persentase Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah /Instansi Vertikal Bidang Pemerintahan yang tervasilitasi	100 persen
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.879.760,00	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.684.700,00	Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan Sesuai SOP	100 persen
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.684.660,00	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana	100 persen
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	55.389.220,00	Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Ketentraman	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		dan Ketertiban Umum	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.833.460,00	Persentase Pelanggaran Perda/Perbupyang Ditangani	100 persen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.727.220,00	Persentase Terlaksananya Tugas Forkominca	100 persen
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	36.256.580,00	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana (persen)	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.949.020,00	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu (Persen)	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.552.076.625,00	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (persen)	100 persen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	273.458.896,00	Capaian di Sipil Aparatur (Persen)	90 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.174.480,00	Rata-rata Capaian Output Sub Kegiatan Administrasi Umum (Persen)	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.502.800,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Persen)	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.469.308,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
		(Persen)	
Kecamatan Dawan			
UNSUR KEWILAYAHAN			
KECAMATAN			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat (persen)	88.35 persen
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.406.800,00	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pemerintahan yang difasilitasi (persen)	100 persen
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	213.508.500,00	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi (persen)	100 persen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.975.300	Persentase Pelayanan Perijinan/Non Perijinan sesuai SOP (persen)	100 persen
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.396.200	Persentase Layanan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksana (persen)	100 persen
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.100.000	Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	4.912.580	Persentase Pelanggaran Perda/Perbup	100 persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Daerah		yang Ditangani (persen)	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.392.380	Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimcam Persentase Terlaksananya Tugas Forkopimcam (persen)	100 persen
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.611.900	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana (persen)	100 persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.159.740,00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Tersedia Tepat Waktu (persen)	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.369.650.169,00	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (persen)	100 persen
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	365.247.336	Capaian Disiplin Aparatur (persen)	95 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.095.510,00	Rata-Rata Capaian Rencana Aksi Sub Kegiatan (persen)	100 persen
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.159.976.440,00	Jumlah Kader Bela Negara di Kabupaten Klungkung.	22 Orang
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	29.135.713.285,00	Persentase partisipasi pemilih	80 Persen



URAIAN	PAGU (RP)	INDIKATOR	TARGET
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		perempuan.	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	23.217.000,00	Persentase Ormas tertib administrasi.	48,20 Persen
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.914.721.520,00	Persentase desa adat yang memiliki Perarem Lepas Anti Narkoba.	45,09 Persen
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	15.048.902.820,00	Persentase penanganan konflik sosial	20 Persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.023.840,00	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti.	100 persen
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.993.995.042,00	Laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu.	17 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.520.764,00	Tingkat disiplin aparatur.	100 persen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.499.460,00	Persentase surat yang diarsipkan sesuai klasifikasi.	100 persen
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.697.452,00	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.	100 persen
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.885.131,00	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik.	100 persen
	1.625.231.822.453		

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2024



1.1.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator

SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:



1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menjabarkan secara rinci perihal penerapan SPM yang wajib dilaksanakan di daerah, meliputi daerah provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan di masing-masing tingkatan pemerintah daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat bahwa tiap pemerintahan daerah memiliki kemampuan keuangan daerah, SDM, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, maka tiap daerah memiliki tantangan masing-masing didalam melaksanakan penerapan SPM. Merujuk pada hakikat dari penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara akan pemenuhan hak dasarnya agar terpenuhi supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri kedepannya, maka menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat didalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); dan
10. Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 50); dan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204).



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Klungkung Tahun 2023 menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Klungkung	Capaian Kinerja Tahun N-1 (2023)	Capaian Kinerja Tahun N (2024)	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,18	75,15	1,31
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,61	5,30	-5,53
3	Persentase Pengangguran (%)	1,29	1,23	-4,65
4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)	6.041,65	6.348,54	5,08
5	Pengeluaran per Kapita (000)	11.760	12.358	5,09
6	Ketimpangan Pendapatan/Gini Ratio	0,34	0,31	-8,82

Sumber : BPS Kab Klungkung, 2025

2.2 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi dan visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Klungkung secara umum telah berupaya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026. Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung sebagaimana



telah diubah dalam Perjanjian Kinerja Bupati Klungkung Perubahan Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,53	8,74	102,46
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,12	13,13	100,08
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,44	72,50	100,08
		Prevalensi Stunting	Persen	4,9	3,55	127,55
3	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	1,29	1,23	104,65
4	Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah yang lestari	Cakupan Budaya yang Lestari	Persen	83	83,33	100,40
5	Meningkatnya iklim Investasi	Nilai PMA	Milyar Rp.	1400	1.709,167	122,07
		Nilai PMDN	Milyar Rp.	1000	1.178,322	117,80
6	Terbangunnya Insfrastuktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	Persen	71,19	71,19	100
7	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	Persen	8,66	8,69	100,35
		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	9,81	9,44	96,23
		Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	12,15	11,98	98,60
8	Meningkatnya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	123,41	123,33	100,06
9	Menurunnya pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Poin	62,38	62,38	100,00
10	Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Poin	69,71	67,71	97,13
		Indeks Inovasi Daerah	Poin	62	67,75	109,27
11	Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung	Poin	82,5	80,09	97,08
Rata-rata capaian						104,34

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 11 sasaran dengan 17 indikator kinerja. Dari 17 indikator tersebut terdapat 11 indikator dengan capaian diatas 100%, 2 indikator dengan capaian 100% dan 4 indikator dengan capaian diatas 96% persen. Pada tahun 2024, rata-rata capaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar 104,34%. Analisa atas capaian indikator - indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:



Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu meningkatkan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Daerah di Kabupaten Klungkung. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dapat dilihat dengan beberapa indikator yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Berikut ini disajikan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan tahun 2024.



Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2025
Gambar 3.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Kabupaten/Kota se-Bali

Berdasarkan Grafik di atas, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2024 adalah 102,46 persen dengan target 8,53 tahun dan realisasi 8,74 tahun atau setara lulus SMP. Dibandingkan dengan target akhir RPD pada tahun 2026 sebesar 8,79, realisasi tahun 2024 sudah mencapai 99,43%. Realisasi ini sudah melebihi target 2025 yang tercantum pada RPD sebesar 8,66 tahun sehingga pada penyusunan RPJMD Tahun



2025-2029 akan dilakukan peninjauan Kembali terhadap target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi di Kabupaten/Kota lain di Bali, Kabupaten Klungkung berada di peringkat ke 5, yang tertinggi adalah Kota Denpasar dengan rata-rata lama sekolah 11,53 sedangkan terendah di Kabupaten Karangasem dengan rata-rata lama sekolah 6,7 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klungkung ditunjukkan dalam grafik berikut ini:



Sumber data : BPS Provinsi Bali dan BPS, 2025
Gambar 3.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Klungkung, Bali, dan Nasional Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klungkung selalu meningkat setiap tahun. Namun demikian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klungkung sejak tahun 2020-2024 masih lebih rendah dibandingkan capaian Tingkat Nasional dan Provinsi Bali dengan capaian pada tahun 2024 pada Tingkat nasional sebesar 8,85 Tahun dan Provinsi Bali sebesar 9,54 tahun. Peningkatan yang dicapai juga belum maksimal yang ditunjukkan dengan kenaikan hanya 0,05 tahun dari 8,48 tahun pada tahun 2023 menjadi 8,53 tahun pada tahun 2024, lebih kecil dibandingkan kenaikan Tingkat provinsi Bali sebesar 0,09 dari 9,45 pada tahun 2023 menjadi 9,54 pada tahun 2024 dan Tingkat nasional yang mengalami kenaikan 0,08 tahun dari 8,77 pada tahun 2023 menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Adapun besaran angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2024 ini adalah sebesar 13.13 tahun. Dimana hal ini berarti secara rata-rata penduduk yang berusia 7 tahun yang masuk pada jenjang pendidikan formal di tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13.13 tahun atau setara dengan Diploma II. Di bawah ini disajikan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung.



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025
Gambar 3.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Klungkung dan Perbandingan Kabupaten/Kota seBali Tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 sebesar 13,13 Tahun dengan target 13,12 tahun maka capaiannya sebesar 100,08 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD capaiannya menjadi 100,46 persen karena target akhir RPD justru lebih rendah dibandingkan target tahun 2024. Hal ini dikarenakan target tahun 2024 pada PK Bupati Perubahan 2024 disesuaikan menjadi 3,12 Tahun berdasarkan RKPD Perubahan 2024 yang sudah mencantumkan data realisasi sebesar 3,12 tahun. Jika dibandingkan capaian Kabupaten/Kota di Bali, Kabupaten Klungkung menempati peringkat 6 dimana harapan lama sekolah tertinggi ada di Kabupaten Badung dan terendah di Kabupaten Bangli.



Sumber data : BPS Provinsi Bali, 2025
Gambar 3.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2024



Berdasarkan grafik di atas, harapan lama sekolah di Kabupaten Klungkung selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, namun tidak signifikan. Dibandingkan tahun 2023, peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Klungkung hanya 0,01 tahun, lebih rendah dibandingkan peningkatan di tingkat Nasional sebesar 0,06 tahun dari 13,15 tahun pada tahun 2023 menjadi 13,21 tahun pada tahun 2024. Peningkatan harapan lama sekolah Provinsi Bali juga tidak signifikan yaitu 0,04 tahun dari 13,58 tahun pada tahun 2023 menjadi 13,62 tahun pada tahun 2024 namun tetap dengan capaian lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional dan kabupaten Klungkung.

Dalam mewujudkan kinerja peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengalami kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang menyebabkan banyak masyarakat tidak tuntas dalam menyelesaikan pendidikan formal. Bahkan terdapat pula masyarakat yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan. Hal ini salah satunya disebabkan faktor usia dimana masyarakat yang sudah berusia lanjut enggan memulai ataupun melanjutkan pendidikan lagi.
2. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, apabila dirata-ratakan hanya sampai pada jenjang kelas 3 SMP. Selain itu rata-rata harapan lama sekolah hanya sampai pada jenjang D-II pada pendidikan tinggi.
3. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang berdampak pada kesiapan anak didik untuk melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat partisipasi orang tua atau masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD. PAUD dipandang sebagai tingkat pendidikan yang kurang penting dan membutuhkan biaya besar.
4. Belum tersedianya sumber daya, sarana, dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional.
5. Mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD masih kurang baik.
6. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah pada satuan pendidikan formal maupun non formal.

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan program pendidikan masyarakat pada jenjang Kejar Paket A, B, dan C bagi masyarakat usia produktif pada lembaga pendidikan non formal atau kesetaraan. Hal ini selaras dengan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar faktor ekonomi tidak lagi menjadi faktor utama dalam rangka peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.
2. Interaksi terencana antara orang tua dan lembaga PAUD untuk membangun kesinambungan stimulasi dari lembaga PAUD. Sehingga orang tua memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendidikan di usia dini. Melalui interaksi ini diharapkan mampu memberikan penguatan terkait dengan kapasitas dan peran orang tua sebagai mitra pengajar dan sumber belajar bagi anak usia dini.



- 3. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan ketersediaan guru sesuai kualifikasi yang sesuai melalui peningkatan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran dengan meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kinerja guru maupun tenaga kependidikan, dan menyediakan sarana prasarana esensial yang mendukung proses belajar secara merata.
- 4. Mendorong peningkatan kualifikasi tenaga pendidik yang berkualitas dan sesuai kompetensi melalui fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi.
- 5. Mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pendidikan formal/non formal melalui peningkatan jangkauan layanan pendidikan SD dan SMP yang berkualitas dan peningkatan jangkauan layanan pendidikan kesetaraan bagi anak tidak sekolah (ATS) usia 7-18 tahun.
- 6. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sesuai standar nasional pendidikan, meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran melalui peningkatan ketersediaan, kompetensi, dan kinerja GTK, dan menyediakan sarana prasarana yang esensial dalam mendukung proses belajar pada satuan DIKDAS yang belum tersedia secara merata.
- 7. Mendorong sekolah untuk menerapkan kurikulum yang adaptif. Melalui penerapan program dan kebijakan yang berorientasi pada mutu pembelajaran yang meliputi : visi misi berorientasi belajar, manajemen kurikulum, serta pemanfaatan sumber daya yang tepat.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tingkat Efisiensi
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10):>=0 Efisien
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,48	95,73	0,09	8,53	100,00	0,09	0,04	Efisien
	Angka Harapan Lama Sekolah	13,12	95,73	0,14	13,14	100,00	0,13	0,04	Efisien
rata-rata		10,80	95,73	0,11	10,84	100,00	0,11	0,04	Efisien

Sumber data : diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan



lama sekolah keduanya memperoleh hasil efisien, dengan rata-rata efisiensi 0,06. Anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pendidikan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Pendidikan	58.561.389.242	56.055.999.528	2.505.389.714	95,72
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	7.236.400	6.449.500,00	786.900	89,13
Program Pengembangan Kurikulum	77.273.840	77.125.500,00	148.340	99,81
Program Pembinaan Perpustakaan	165.105.888	158.329.871	6.776.017	95,90
Jumlah	58.811.005.370	56.297.904.399	2.513.100.971	95,73

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024 sasaran meningkatnya kualitas pendidikan didukung 4 program senilai Rp. 58.811.005.370 dan terealisasi sebesar Rp 56.297.904.399 dengan efisiensi sebesar Rp 2.596.675.971 dengan capaian anggaran 95,73%. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Dokumentasi Pencapaian Sasaran



Penambahan Fasilitas Komputer, Pojok Baca Digital dan Koleksi buku perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan literasi generasi muda kabupaten klungkung

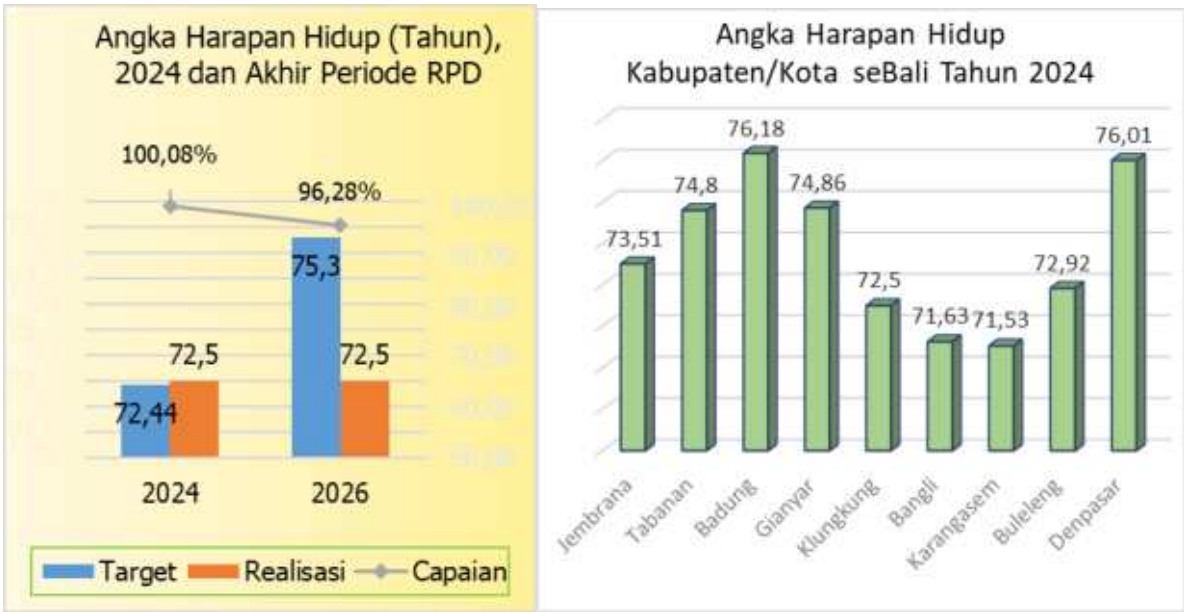


Kegiatan pembelajaran kesetaran di SPNF SKB Kab.klungkung

Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Selain pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik juga merupakan faktor utama yang menunjukkan kesuksesan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan di Kabupaten Klungkung diukur dengan dua indikator utama yaitu Umur Harapan hidup dan Prevalensi Stunting. Umur Harapan Hidup yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Capaian Umur Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 disajikan pada grafik sebagai berikut.



Sumber : bps.baliprov.go.id, 2025
Gambar 2.5 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Klungkung 2024 dan Akhir Periode RPD dan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Tahun 2024



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Umur Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 sebesar 100,08 persen dari target 72,44 tahun terealisasi 72,5 tahun. Dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026, capaian angka harapan hidup sudah 96,28 persen dengan target 75,3 tahun. Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup kabupaten/kota di Bali maka Klungkung menempati peringkat 7, diatas angka harapan hidup Kabupaten Bangli dan yang terendah di Kabupaten Karangasem sebesar 71,53 tahun. Angka harapan hidup tertinggi ada di Kabupaten Badung dengan 76,18 tahun.



Sumber : BPS Provinsi Bali dan BPS, 2025

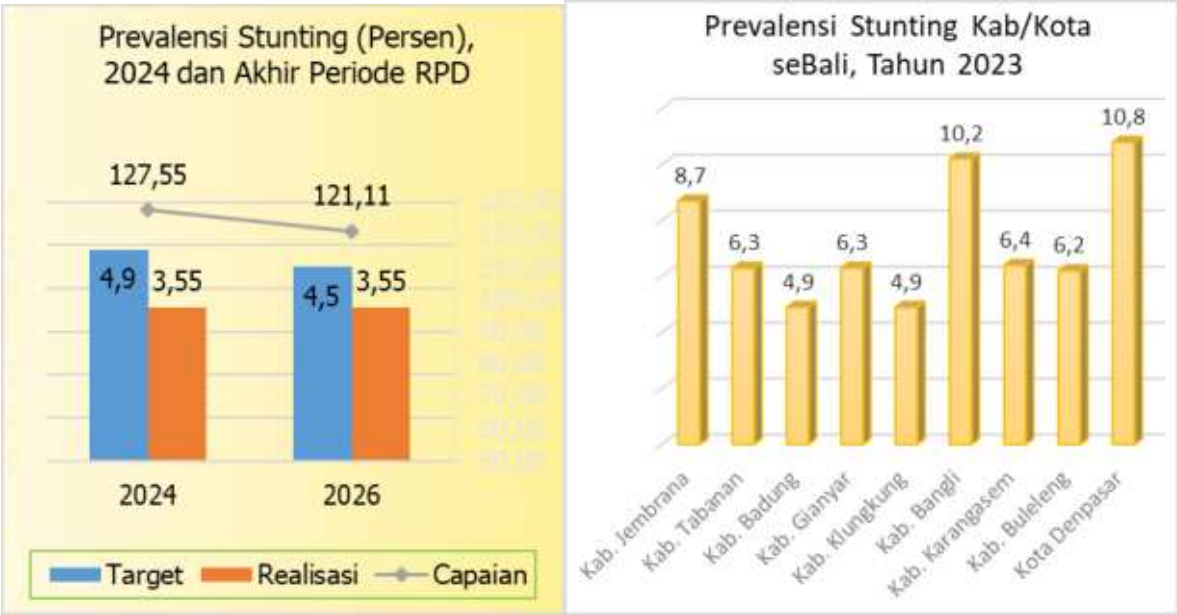
Gambar 2.6 Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dilihat dari grafik diatas, angka harapan hidup di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 Umur Harapan Hidup di Kabupaten Klungkung sebesar 71,25 tahun dan meningkat menjadi 72,5 tahun pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pembangunan di sisi kesehatan. Pada tahun 2022, angka harapan hidup Kabupaten Klungkung sebesar 71,83 tahun mendekati angka harapan hidup nasional sebesar 71,85 tahun. Sejak tahun 2023 angka harapan hidup di Kabupaten Klungkung sudah melewati angka harapan hidup Tingkat nasional dengan capaian 72,5 tahun pada 2024 sedangkan nasional baru mencapai 72,39 tahun. Namun demikian capaian ini masih perlu ditingkatkan karena masih di bawah capaian Provinsi Bali pada tahun 2024 sebesar 73,29. Dilihat dari segi peningkatan juga masih dibawah peningkatan provinsi Bali sebesar 0,31 tahun dari 72,98 tahun pada tahun 2023 menjadi 73,29 tahun pada tahun 2024, sedangkan angka harapan hidup di Kabupaten Klungkung hanya meningkat 0,22 tahun dari 72,28 tahun pada tahun 2023 menjadi 72,5 tahun pada tahun 2024.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Penyebab stunting antara lain yaitu asupan gizi dan status kesehatan yang meliputi ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi), lingkungan sosial (norma, makanan bayi dan anak, hygiene, pendidikan, dan



tempat kerja), lingkungan kesehatan (akses, pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (air, sanitasi, kondisi bangunan. Permasalahan stunting yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah menjadi dasar penghitungan prevalensi stunting.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, 2025
Gambar 2.7 Prevalensi Stunting (persen) Kabupaten Klungkung 2024 dan Akhir RPD dan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, capaian prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 127,55 persen dengan target 4,9 persen dan capaian 3,55 persen. Angka ini masih sementara berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia sedangkan data resmi dari hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 belum dirilis. Dibandingkan dengan target akhir RPD capaiannya menjadi 121,11 persen dengan target akhir RPD sebesar 4,5 persen, dengan demikian diperlukan adanya evaluasi terhadap target yang ditetapkan karena target akhir RPD sudah terlampaui. Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2023, Prevalensi stunting di kabupaten Klungkung merupakan yang terendah dengan nilai yang sama dengan Kabupaten Badung yaitu 4,9 persen. Capaian ini jauh lebih baik dibandingkan Provinsi Bali dengan nilai prevalensi 7,2 persen, dan prevalensi tertinggi di kota Denpasar dengan nilai 10,8 persen.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.8 Prevalensi Stunting (persen) Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, prevalensi stunting di Kabupaten Klungkung menurun sangat signifikan pada tahun 2022 dari 19,4 persen pada tahun 2021 menjadi 5,4 persen pada tahun 2022 dan melanjutkan tren positif pada tahun 2023 dan 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Bali, prevalensi stunting Kabupaten Klungkung berada di bawah nilai Provinsi Bali sejak tahun 2022 yang menandakan kinerja pembangunan kesehatan meningkat signifikan. Jika dibandingkan capaian nasional, maka capaian Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali jauh melampaui capaian nasional yang masih berada pada 21,50 persen pada tahun 2023.

1. Dalam usaha meningkatkan Angka Harapan Hidup dan menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:
2. Metode Promotif dan Preventif merupakan metode terbaik dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah manapun, namun kesadaran masyarakat di Kabupaten Klungkung belum dapat sepenuhnya ditingkatkan disebabkan rentang kendali dan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat, kedepannya metode promotif dan preventif akan lebih ditingkatkan lagi.
3. Pengawasan terhadap kualitas kesehatan lingkungan merupakan suatu pekerjaan besar yang jika berhasil dituntaskan akan sangat mempengaruhi peningkatan kesehatan masyarakat. Dampak pembangunan yang tidak terarah memperburuk kualitas kesehatan lingkungan. Kampanye kesehatan lingkungan seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
4. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan turut menyumbang terhadap kurangnya kesadaran terhadap kesehatan diri maupun lingkungan. Keinginan mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik oleh masyarakat seringkali berbenturan dengan ketersediaan pendanaan. Beberapa masyarakat yang lebih mampu justru tidak sadar akan kesehatan lingkungan disebabkan tingkat pendidikan yang rendah.



Strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung pertumbuhan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan angka harapan hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya-upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif.

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengubah strategi pembangunan bidang kesehatan dengan lebih menguatkan upaya peningkatan kesehatan secara promotif dan preventif. Metode promotif seperti sosialisasi bahasa asap rokok, sosialisasi bahaya narkoba dan promosi kesehatan lain dilakukan melalui berbagai media sosialisasi. Selain itu, sosialisasi protokol kesehatan berupa rajin mencuci tangan, penggunaan masker, pembatasan jarak fisik serta berbagai gaya hidup sehat juga semakin banyak dilakukan. Kegiatan preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, screening penyakit tidak menular, vaksinasi bagi penyakit-penyakit tertentu, serta pelayanan terpadu bagi ibu dan anak juga terus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui jajarannya di bidang kesehatan menyadari bahwa langkah-langkah promotif dan preventif lebih efektif dan efisien dibandingkan langkah-langkah kuratif (penyembuhan).

2. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat

Peningkatan pelayanan gawat darurat dikemas dalam sebuah aksi yang dikenal dengan “KRIS 118”. KRIS 118 menjadi layanan Kesehatan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Klungkung baik dalam pelayanan rujukan dan kegawat daruratan terpadu pra hospital dalam rangka mencegah kematian dan kecacatan merupakan tujuan utama layanan AGD KRIS 118. AGD KRIS 118 merupakan unit pelayanan yang dibentuk untuk mendekatkan akses pelayanan kegawat daruratan bagi masyarakat dan membantu fungsi pelayanan kesehatan rujukan dan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung. Dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan Puskesmas yang mewilayahinya. Diadakannya AGD KRIS 118 dilandasi aspek *time management* sebagai implementasi *time saving is life and limb saving* yang mengandung unsur kecepatan atau *quick respons* dan ketepatan berupa mutu pelayanan yang sesuai standar. Unsur kecepatan dipenuhi oleh sistem transportasi dan komunikasi, sedangkan unsur ketepatan dipenuhi oleh kemampuan melakukan pertolongan gawat darurat meliputi *basic life suport* (BLS) dan *advance life suport* (ALS) sesuai masalah yang dihadapi. Dalam kondisi kedaruratan sehari-hari/umum/kebidanan, AGD KRIS 118 bertugas memberikan penanganan pada kejadian kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan rumah tangga, pelayanan kebidanan emergensi, rujukan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan untuk kegiatan sosial keagamaan. AGD KRIS 118 juga menerima panggilan masyarakat untuk melakukan pelayanan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) bagi kelompok masyarakat resiko tinggi yang membutuhkan seperti para lansia yang tidak mampu berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan dalam kondisi kedaruratan khusus/bencana AGD KRIS 118 secara langsung bertugas sebagai Tim Reaksi Cepat (TRC) dibawah komando BPBD sesuai Peraturan Perundang-undangan. Akses yang cepat dan mudah pada pelayanan AGD KRIS 118 adalah kunci keberhasilan atas manfaat pelayanan.



- 3. Pelayanan Kesehatan *Door to Door* atau DORKESMAS. Merupakan program aksi yang melayani pasien langsung di rumah pasien.
- 4. Peningkatan Pelayanan di Rumah Sakit

Peningkatan pelayanan di rumah sakit berupa penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pelayanan lain dalam rangka mendukung upaya peningkatan kesehatan dengan cara kuratif. Selain itu, seluruh komponen didalam Rumah Sakit Umum Daerah juga aktif mempromosikan protokol kesehatan serta gaya hidup sehat kepada masyarakat.

5. Pemenuhan *Universal Health Coverage*

Pemenuhan jaminan kesehatan secara universal juga merupakan fokus utama Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup, prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai berikut:

- 1. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022 untuk inovasi GEBRAK (Gerakan Bersama Remaja Anti Rokok).
- 2. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 untuk inovasi DORKESMAS (Datangi Obati Rawat Kesehatan Masyarakat)
- 3. TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 untuk inovasi KRIS (Kring Sehat) Inovasi pelayanan kesehatan dengan ambulance yang mendatangi masyarakat langsung ke tempat tinggal dan melakukan penanganan awal di tempat tinggal pasien.
- 4. Memperoleh UHC Award Kategori Utama pada Tahun 2024.

Untuk mengetahui perbandingan antara pencapaian sasaran dengan pemanfaatan anggaran yang tersedia, di bawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3.2.4
Tingkat Efisiensi
Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10):>=0 Efisien
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,28	93,58	0,77	72,44	100,00	0,72	0,07	Efisien
	Prevalensi Stunting	4,90	93,58	0,05	4,90	100,00	0,05	0,07	Efisien
rata-rata		38,59	93,58	0,41	38,67	100,00	0,39	0,07	Efisien

Sumber : data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator angka harapan hidup dan prevalensi stunting keduanya memperoleh hasil efisien, dengan rata-rata efisiensi 0,22. Anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya kualitas kesehatan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.5



Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80.439.411.558	75525724951	4.913.686.607	93,89
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	422.231.894	365.607.774	56.624.120	86,59
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.998.052.026	4.615.939.568	382.112.458	92,35
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	364.034.180	321.211.050	42.823.130	88,24
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.039.725.648	1.714.191.677	325.533.971	84,04
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.761.775.744	1.711.290.763	50.484.981	97,13
Program Pengendalian Penduduk	152.370.340	132.856.950	19.513.390	87,19
Jumlah	90.177.601.390	84.386.822.733	5.790.778.657	93,58

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024 sasaran meningkatnya kualitas kesehatan didukung 7 program senilai Rp. 90.177.601.390 dan terealisasi sebesar Rp 84.386.822.733 dengan efisiensi sebesar Rp 5.790.778.657 dengan capaian anggaran 93,58%. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dokumentasi Pencapaian Sasaran



Pelayanan Kesehatan *Door to Door* atau DORKESMAS. Merupakan program aksi yang melayani pasien langsung di rumah pasien



Memperoleh UHC Award Kategori Utama pada Tahun 2024



Kegiatan Posyandu Balita dalam rangka perbaikan gizi

Sasaran 3
Meningkatnya Daya Saing Masyarakat

Daya saing adalah kemampuan untuk bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Daya saing masyarakat di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah Angkatan kerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025
Gambar 2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung, Kabupaten/Kota seBali dan Provinsi Bali Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 sebesar 1,23 persen dengan target 1,29 persen yang dituangkan dalam RKPD perubahan Tahun 2024 sehingga capaiannya 104,65 persen. Dibandingkan dengan target akhir yang tercantum pada RPD, capaiannya justru meningkat karena target RPD ditetapkan pada tahun 2023 dengan



data awal capaian tahun 2022 sebesar 1,96 persen, sehingga akan dilakukan evaluasi terhadap penetapan target dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Jika dibandingkan dengan capaian TPT di Kabupaten/Kota lain se Provinsi Bali maka Kabupaten Klungkung mencapai peringkat kedua terendah setelah Kabupaten Bangli dengan TPT 0,74 persen. TPT tertinggi ada di Kota Denpasar dengan 2,11 persen dengan rata-rata TPT Provinsi Bali berada pada 1,79 persen.



Sumber : BPS Provinsi Bali, 2025

Gambar 2.10 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2020-2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Nasional selalu mengalami penurunan dibandingkan sejak tahun 2020. Namun demikian, TPT Kabupaten Klungkung mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 dengan nilai 5,35% menjadi 1,96% pada tahun 2022. TPT Provinsi Bali juga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 dengan nilai 4,8 persen menjadi 2,69 persen pada tahun 2023. Dibandingkan Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung, penurunan TPT nasional cenderung konsisten dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 4,91 persen, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi pada angka 1,79 persen dan Kabupaten Klungkung 1,23 persen.

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan beberapa strategi, diantaranya:

1. Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada penganggur untuk menciptakan kesempatan kerja.
2. Memberikan pekerjaan sementara berupa padat karya.
3. Menyampaikan informasi terkait dengan lowongan kerja dari perusahaan melalui sosial media.
4. Meningkatkan kualitas SDM di seluruh jenjang pendidikan melalui pelatihan kerja untuk menghasilkan SDM yang berkompeten dan berdaya saing.
5. Memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Klungkung.



- 6. Membuka peluang dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan melalui interpreneur masuk desa.
- 7. Memberikan pendampingan dan pembinaan terkait dengan manajemen dan marketing secara berkelanjutan dengan mendorong upaya kemitraan dengan bisnis lain yang sudah mapan.
- 8. Memberikan arahan dan bimbingan agar hasil produksi dapat meningkat.

Permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam usaha-usaha mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut:

- 1. Masih terbatasnya kesempatan kerja sehingga tidak sebanding dengan pertumbuhan pencari kerja.
- 2. Belum optimalnya pelayanan dalam mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pencari kerja dengan pemberi kerja.
- 3. Rendahnya etos kerja para pencari kerja.
- 4. Tenaga kerja dengan lulusan SD, SMP, dan SMA/Sederajat belum bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar.
- 5. Kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja.
- 6. Belum ada pengakuan kompetensi tenaga kerja di masing-masing sector usaha yang ditekuni.
- 7. Masih terdapat perusahaan yang belum membuat Peraturan Perusahaan. Namun, perusahaan tersebut telah memenuhi syarat untuk membuat Peraturan Perusahaan.
- 8. Rendahnya kesadaran pengusaha terhadap hak pekerja.
- 9. Pemasaran hasil produksi kurang maksimal.

Untuk mengetahui bagaimana efisiensi pencapaian sasaran meningkatnya daya saing masyarakat, di bawah ini disajikan data tingkat efisiensi sasaran terhadap anggaran.

Tabel 2.6
Tingkat Efisiensi
Sasaran Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10):>=0 Efisien
Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	1,29	95,61	0,01	1,29	100,00	0,01	0,05	Efisien

Sumber : data diolah,2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator tingkat pengangguran terbuka memperoleh hasil efisien, dengan nilai efisiensi 0,09. Anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya daya saing masyarakat disajikan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.7
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Daya Saing Masyarakat Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.040.133.140	964.805.105	75.328.035	92,76
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	300.000.000	-	100,00
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	10.517.201.651	10.409.308.907	107.892.744	98,97
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	721.768.870	663.992.663	57.776.207	92,00
Program Penempatan Tenaga Kerja	984.481.360	675.435.324	309.046.036	68,61
Program Hubungan Industrial	73.806.640	42.843.750	30.962.890	58,05
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	39.485.260	20.273.000	19.212.260	51,34
Jumlah	13.676.876.921	13.076.658.749	600.218.172	95,61

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024 sasaran meningkatnya daya saing masyarakat didukung 7 program senilai Rp. 13.676.876.921 dan terealisasi sebesar Rp. 13.076.658.749 dengan efisiensi sebesar Rp. 600.218.172 dengan capaian anggaran 95,61%. Sasaran ini didukung oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Dokumentasi Pencapaian Sasaran



Kegiatan Pembinaan Pelatihan, Produktipitas dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan

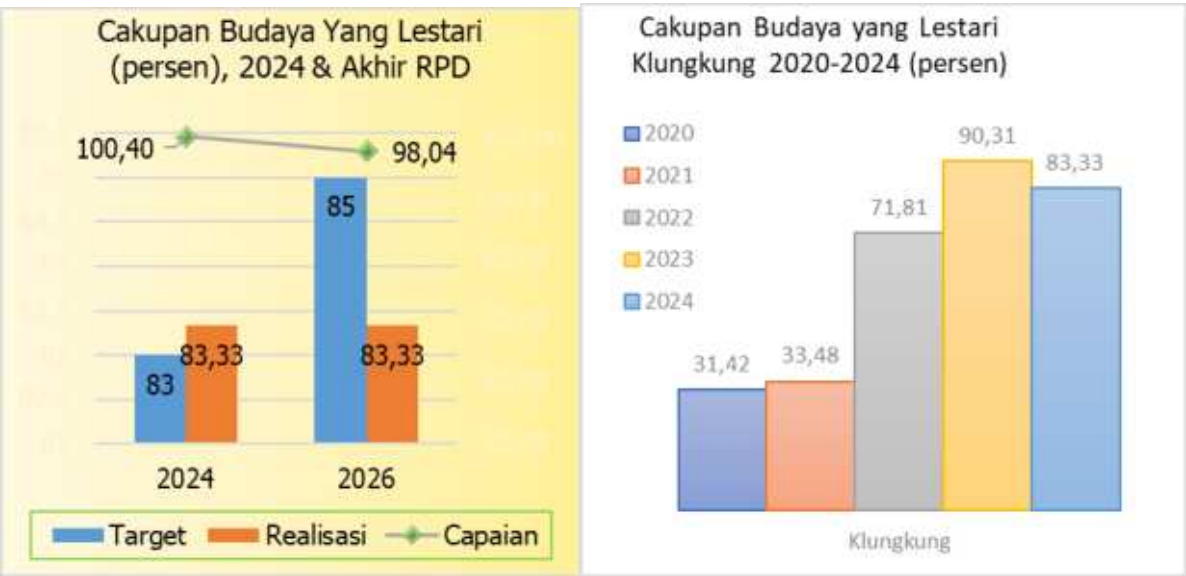


Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru Pembuatan Virgin Coconut Oil Di Banjar Carang Sari Desa Bungbungan

Sasaran 4
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah yang Lestari

Dalam menunjukkan komitmen melestarikan kebudayaan Daerah di Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Meningkatkan Kebudayaan Daerah yang Lestari dan diukur dengan indikator kinerja Cakupan Budaya Yang Lestari. Cakupan Budaya Yang Lestari dihitung dengan membandingkan antara Budaya Yang Lestari (benda dan tak benda) dengan Budaya Daerah Yang Terdata di Kabupaten Klungkung (benda dan tak benda). Budaya tak benda meliputi : sekaa teruna, subak sawah, subak abian, tradisi dan budaya tak benda lain di Kabupaten Klungkung, sementara Budaya Benda mencakup Cagar Budaya, Situs Budaya dan berbagai budaya kebendaan yang lain. Dalam melakukan pengumpulan data, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan bahwa budaya benda yang lestari adalah budaya benda yang telah ditetapkan dan dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Sementara Budaya tak benda yang lestari adalah budaya tak benda yang dalam kurun waktu satu tahun setidaknya pernah tampil satu kali dalam acara pagelaran/pameran baik di Kabupaten Klungkung maupun di Provinsi Bali.

Cakupan Budaya Yang Lestari pada tahun 2024 ditunjukkan pada grafik berikut ini :



Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Klungkung, 2025



Gambar 2.11 Cakupan Budaya Yang Lestari Tahun 2024 dan target akhir RPD dan perbandingan capaian tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Cakupan Budaya Yang Lestari di Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 sebesar 100,40 persen. Dimana target Cakupan Budaya Yang Lestari ditargetkan sebesar 83 persen dan terealisasi sebesar 83,33. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD, cakupan budaya yang lestari sudah mencapai 98,04 persen. Dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi sedikit penurunan capaian yang diakibatkan jumlah kegiatan pelestarian yang mampu dilaksanakan tahun 2024 sejumlah 40 dari taget 48 kegiatan.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah grup kesenian sehingga tidak dapat mengumpulkan sanggar/sekeha.
2. Pertunjukan kesenian tidak dapat dipentaskan.
3. Kreatifitas seniman dalam mengekspresikan seni tidak maksimal.
4. Secara umum, urusan kebudayaan tidak melaksanakan pembinaan secara maksimal.
5. Penetapan Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya mengalami hambatan dalam status kepemilikan tanah.

Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah sebagai berikut:

1. Kegiatan budaya tercover dalam AKSIKU (Atraksi Melestarikan Seni Kebudayaan Kabupaten Klungkung) dilaksanakan berupa kegiatan pameran keris, konservasi lontar, menulis dan membaca aksara bali, kajian WBTB, dan kegiatan edukatif kultural.
2. Perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan pendataan kesenian agar pertunjukan kesenian dapat dipentaskan.
3. Meningkatkan fasilitasi terhadap aktualisasi kesenian tradisional dan budaya lokal sebagai upaya memaksimalkan kreatifitas seniman dalam mengekspresikan seni.
4. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dengan melibatkan masyarakat dan generasi muda secara berkesinambungan.
5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak seperti desa adat dan desa dinas terkait dengan status kepemilikan tanah dalam rangka penetapan Objek yang Diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya.

Dalam mewujudkan sasaran Lestari dan Berkembangnya Kebudayaan Daerah pada tahun 2024 didukung oleh faktor internal dan eksternal diantaranya:

1. Penetapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, membuat dukungan untuk melestarikan kebudayaan daerah terus menguat. Penggunaan Bahasa Bali juga terus ditingkatkan di sekolah-sekolah maupun instansi-instansi pemerintah dan swasta. Hal tersebut mendorong penggunaan bahasa bali dan busana adat bali di seluruh lapisan masyarakat.
2. Adanya dukungan yang kuat dari lembaga adat di Kabupaten Klungkung dalam terus melestarikan budaya tak benda berupa tradisi dan berbagai seni di Kabupaten Klungkung.



3. Penduduk Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa suku dan agama membantu adanya akulturasi budaya yang melahirkan budaya baru.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Daerah yang Lestari Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10):>=0 Efisien
Pembangunan Kebudayaan Daerah yang lestari	Cakupan Kebudayaan yang dilestarikan	83,30	95,35	0,87	83,00	100,00	0,83	0,05	Efisien

Sumber : data diolah,2025

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran meningkatnya pembangunan kebudayaan daerah yang lestari adalah sebesar 0,05 dengan kategori efisien. Sasaran Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Daerah yang Lestari pada tahun 2024 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Daerah yang Lestari Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengembangan Kebudayaan	8.390.104.768	7.841.903.987	548.200.781	93,47
Program Pembinaan Sejarah	97.147.540.592	92.812.178.702	4.335.361.890	95,54
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	241.100.600	232.610.700	8.489.900	96,48
Program Pengelolaan Permuseuman	1.333.730.953	1.248.925.483	84.805.470	93,64
Jumlah	107.112.476.913	102.135.618.872	4.976.858.041	95,35

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024, Sasaran Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Daerah yang Lestari didukung 4 program dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 107.112.476.913 dan terealisasi sebesar Rp. 102.135.618.872 dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.976.858.041 atau terealisasi sebesar 95,35 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung.



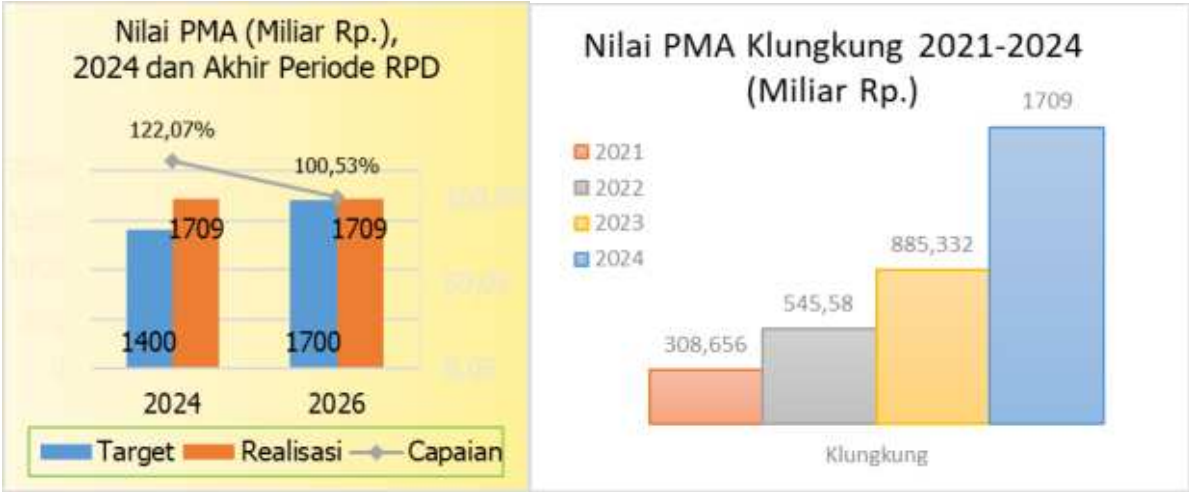
Dokumentasi Pencapaian Sasaran



Sekda Klungkung, Anak Agung Gde Lesmana, mewakili Pj. Bupati Klungkung membuka kegiatan pameran Keris dan Pusaka Bali di Museum Semarajaya, Klungkung, pada Jumat (26/7/2024)

Sasaran 5
Meningkatnya Iklim Investasi

Pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya didukung dengan tumbuhnya investasi. Investasi akan meningkat apabila daerah mampu memastikan kemudahan, keamanan, dan keuntungan berinvestasi. Meningkatnya iklim investasi menjadi salah satu sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Klungkung agar potensi-potensi investasi yang telah dipetakan dapat mendatangkan investor secara optimal. Iklim investasi yang semakin meningkat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai investasi yang dapat diukur dengan nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Berikut ini disajikan grafik capaian sasaran meningkatnya iklim investasi Tahun 2024



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung, 2025
Gambar 2.12 Nilai PMA (Miliar Rp.) Tahun 2024 dibandingkan Akhir Periode RPD dan Nilai PMA Tahun 2021-2024

Berdasarkan grafik di atas capaian target PMA pada Tahun 2024 mencapai 122,07% dengan realisasi sebesar Rp 1.709.167.701.108 sesuai target pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebesar 1400 milyar dengan mempertimbangkan data realisasi pada semester I yang sudah mencapai Rp. 1.068.355.577.804. Dibandingkan data target baru tahun 2026 senilai Rp. 1700 milyar, maka capaian tahun 2024 sudah 100,53%. Untuk itu diperlukan penyesuaian target pada RPJMD 2025-2029 yang sedang disusun agar tetap menunjukkan upaya perbaikan. Grafik di atas juga menunjukkan pertumbuhan PMA dari tahun 2021-2024 dimana pada tahun 2024 terjadi pertumbuhan tertinggi hampir 2 kali lipat nilai PMA tahun 2023. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Klungkung.



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung, 2025
Gambar 2.13 Nilai PMDN (Miliar Rp.) Tahun 2024 dibandingkan Akhir Periode RPD dan Nilai PMDN Tahun 2021-2024



Selaras dengan capaian PMA, capaian PMDN juga menunjukkan hasil yang positif dimana pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 1.178.322.288.553 dengan target 1000 milyar rupiah pada PK Perubahan Tahun 2024 sehingga tercapai 117,80%. Nilai target pada PK Perubahan 2024 merupakan penyesuaian berdasarkan data realisasi investasi semester I dimana nilai PMDN sudah mencapai Rp. 751.732.445.495. Dibandingkan target baru yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2026 sebesar 1300 milyar rupiah, realisasi PMDN pada tahun 2024 sudah mencapai 90,62%. Berdasarkan data realisasi PMDN sejak tahun 2021-2024 terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2023 hingga 6 kali lipat dan tren meningkat dapat dipertahankan pada tahun 2024. Berikut merupakan data realisasi PMA dan PMDN Triwulan I-IV Tahun 2024 :

Tabel 3.2.10
Realisasi PMA dan PMDN Triwulan I-IV Tahun 2024

No	Periode	PMA (Rp)	PMDN (Rp)
1	Triwulan I	472.671.830.019	356.724.902.973
2	Triwulan II	595.683.747.784	395.007.542.522
3	Triwulan III	536.952.726.861	395.195.871.396
4	Triwulan IV	103.859.396.443	31.393.971.662
Total		1.709.167.701.108	1.178.322.288.553

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung, 2025

strategi peningkatan PMA dan PMDN di Kabupaten Klungkung diantaranya :

1. Peningkatan Deregulasi Kebijakan Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyusun Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang bekerjasama dengan LPPM Universitas Udayana.
2. Pengembangan Potensi Daerah Untuk menarik minat investasi di daerah kegiatan pengembangan potensi dilakukan dengan menyusun profil investasi sektor tersier untuk memberikan informasi kepada calon investor untuk menanamkan modalnya.
3. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta Untuk meningkatkan kerjasama dan dukungan pada pelaku UMKM dilaksanakan fasilitasi kemitraan usaha besar dan mikro kecil yang melibatkan pelaku usaha yang ada di daerah sehingga terjalin hubungan industrial yang baik sehingga meningkatkan jejaring usaha antar pelaku usaha yang ada di Kabupaten Klungkung.
4. Pengoptimalan Data dan Informasi Data-data untuk mendukung peningkatan investasi dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun dengan mengunggah semua data investasi baik data dukung dan realisasi investasi secara berkala pada *website* dinas. Sehingga data bisa dilihat oleh investor sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi.



Permasalahan yang masih terjadi dalam upaya peningkatan nilai PMA dan PMDN yaitu:

- 1. Perijinan yang tidak sesuai peruntukan usaha
- 2. Infrastruktur pendukung seperti jalan, Listrik dan air bersih belum optimal, terutama di Nusa Penida serta masih terdapat *blankspot*.
- 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum optimal, karena banyak perusahaan yang tidak membuat LKPM. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan Realisasi dari Investasi terhadap Kegiatan Usaha yang dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar Investasi yang telah dilaksanakan dari Investasi yang direncanakan.
- 4. Penggunaan teknologi informasi belum optimal, masih banyak pemohon yang belum paham dalam menggunakan OSS dan Si Cantik. OSS (*Online Single Submission*) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha serta OSS menyediakan layanan untuk berbagai jenis perizinan, termasuk perizinan usaha baru, perubahan data perusahaan, dan perpanjangan izin. Si Cantik merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem *cloud* untuk layanan perizinan non-berusaha dan non-perizinan yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis.

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya iklim investasi disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Tingkat Efisiensi
Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi
Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10):>=0 Efisien
Meningkatnya iklim investasi	Nilai PMA	1700,00	85,04	19,99	1400,00	100,00	14,000	0,43	Efisien
	Nilai PMDN	1100,00	85,04	12,94	1000,00	100,00	10,00	0,29	Efisien
rata-rata		1400,00	85,04	16,46	1200,00	100,00	12,00	0,36	Efisien

Sumber : data diolah, 2025

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran meningkatnya iklim investasi adalah sebesar 0,36 dengan kategori efisien. Sasaran meningkatnya iklim investasi pada tahun 2024 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi
Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
----------	---------------	----------------	----------------	-------------



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	184.239.004	160.525.984,00	23.713.020	87,13
Program Pelayanan Penanaman Modal	297.823.661	197.973.211,00	99.850.450	66,47
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30.007.454	26.138.019,00	3.869.435	87,11
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	538.596.952	490.520.218,00	48.076.734	91,07
Program Promosi Penanaman Modal	284.184.500	260.021.706,00	24.162.794	91,50
Jumlah	1.334.851.571	1.135.179.138	199.672.433	85,04

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024, Sasaran Meningkatnya Iklim investasi didukung 5 program dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 1.334.851.571 dan terealisasi sebesar Rp. 1.135.179.138 dan sisa anggaran sebesar Rp. 199.672.433 atau terealisasi sebesar 85,04 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung.

Dokumentasi Pencapaian Sasaran



Pengoptimalan Data dan Informasi Data-data pada *website* Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung termasuk aplikasi OSS dan Si Cantik



Tingkatkan Kualitas Layanan, Pj Bupati Klungkung Evaluasi Mall Pelayanan Publik

Sasaran 6
Terbangunnya Insfrastuktur Layanan Publik yang Merata

Untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik, akses pelayanan yang didukung dengan infrastruktur layanan perlu diperhatikan. Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan sasaran Terbangunnya Infrastruktur layanan publik yang merata yang diukur dengan indikator cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar untuk meningkatkan kemudahan akses layanan bagi seluruh lapisan Masyarakat. Capaian sasaran terbangunnya infrastruktur layanan publik yang merata pada tahun 2024 disajikan pada grafik berikut ini



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.14 Cakupan Desa/Kelurahan terpenuhi infrastruktur layanan dasar (Persen), Tahun 2024 dibandingkan Akhir Periode RPD dan capaian Tahun 2020-2024



Berdasarkan data di atas, cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar pada tahun 2024 terealisasi sebesar 71,19% dengan target sesuai RPD 2024-2026 adalah 71,19% sehingga capaiannya 100%. Jika dilihat peningkatan jumlah desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar sampai tahun 2024 berjumlah 42 dari 59 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Klungkung, sehingga masih ada 17 desa/kelurahan yang infrastrukturnya belum terpenuhi. Berikut ini disampaikan data infrastruktur layanan dasar di desa/kelurahan seKabupaten Klungkung.

Tabel 2.13
Cakupan Infrastruktur Layanan Dasar Desa/Kelurahan Tahun 2024

No	Desa	Kecamatan	Kriteria				Jumlah
			Jalan Mantap	Sanitasi	Rumah Layak Huni	Akses Air Bersih	
1	Aan	Banjarangkan	86,00	100	96,01	95,31	94,33
2	Bakas	Banjarangkan	86,00	100	96,01	96,05	94,52
3	Banjarangkan	Banjarangkan	86,00	50	96,01	100,00	83,00
4	Bungbungan	Banjarangkan	86,00	100	96,01	99,62	95,41
5	Getakan	Banjarangkan	86,00	100	96,01	89,56	92,89
6	Negari	Banjarangkan	86,00	100	96,01	80,70	90,68
7	Nyalian	Banjarangkan	86,00	100	96,01	99,77	95,45
8	Nyanglan	Banjarangkan	86,00	100	96,01	100,00	95,50
9	Takmung	Banjarangkan	86,00	100	96,01	100,00	95,50
10	Tihingan	Banjarangkan	86,00	100	96,01	100,00	95,50
11	Timuhun	Banjarangkan	86,00	60	96,01	80,19	80,55
12	Tohpati	Banjarangkan	86,00	100	96,01	100,00	95,50
13	Tusan	Banjarangkan	86,00	100	96,01	100,00	95,50
14	Akah	Klungkung	92,55	60	97,44	73,24	80,81
15	Gelgel	Klungkung	92,55	40	97,44	100,00	82,50
16	Jumpai	Klungkung	92,55	100	97,44	76,40	91,60
17	Kamasan	Klungkung	92,55	60	97,44	100,00	87,50
18	Kampung Gelgel	Klungkung	92,55	80	97,44	61,13	82,78
19	Manduang	Klungkung	92,55	100	97,44	100,00	97,50
20	Satra	Klungkung	92,55	100	97,44	100,00	97,50
21	Selat	Klungkung	92,55	70	97,44	64,39	81,10
22	Selisihan	Klungkung	92,55	100	97,44	100,00	97,50
23	Semarapura Kaja	Klungkung	92,55	50	97,44	100,00	85,00
24	Semarapura Kangin	Klungkung	92,55	40	97,44	100,00	82,50
25	Semarapura Kauh	Klungkung	92,55	100	97,44	100,00	97,50
26	Semarapura Klod Kangin	Klungkung	92,55	20	97,44	100,00	77,50
27	Semarapura Klod	Klungkung	92,55	40	97,44	100,00	82,50
28	Semarapura Tengah	Klungkung	92,55	40	97,44	100,00	82,50
29	Tangkas	Klungkung	92,55	100	97,44	100,00	97,50
30	Tegak	Klungkung	92,55	100	97,44	80,88	92,72
31	Tojan	Klungkung	92,55	100	97,44	100,00	97,50
32	Besan	Dawan	92,72	100	96,52	53,01	85,56
33	Dawan Kaler	Dawan	92,72	100	96,52	100,00	97,31



No	Desa	Kecamatan	Kriteria				Jumlah
			Jalan Mantap	Sanitasi	Rumah Layak Huni	Akses Air Bersih	
34	Dawan Kelod	Dawan	92,72	60	96,52	100,00	87,31
35	Gunaksa	Dawan	92,72	40	96,52	100,00	82,31
36	Kampung kusamba	Dawan	92,72	60	96,52	34,99	71,06
37	Kusamba	Dawan	92,72	80	96,52	64,53	83,44
38	Paksebali	Dawan	92,72	80	96,52	58,39	81,91
39	Pesinggahan	Dawan	92,72	40	96,52	43,66	68,23
40	Pikat	Dawan	92,72	100	96,52	55,70	86,24
41	Sampalan Klod	Dawan	92,72	100	96,52	100,00	97,31
42	Sampalan tengah	Dawan	92,72	100	96,52	100,00	97,31
43	Sulang	Dawan	92,72	100	96,52	100,00	97,31
44	Batukandik	Nusa Penida	77,72	10	92,81	46,16	56,67
45	Batumadeg	Nusa Penida	77,72	30	92,81	80,80	70,33
46	Batununggul	Nusa Penida	77,72	20	92,81	100,00	72,63
47	Bunga mekar	Nusa Penida	77,72	30	92,81	21,37	55,48
48	Jungut batu	Nusa Penida	77,72	100	92,81	0,00	67,63
49	Klumpu	Nusa Penida	77,72	40	92,81	68,56	69,77
50	Kutampi	Nusa Penida	77,72	100	92,81	43,06	78,40
51	Kutampi kaler	Nusa Penida	77,72	60	92,81	100,00	82,63
52	Lembongan	Nusa Penida	77,72	100	92,81	0,00	67,63
53	Ped	Nusa Penida	77,72	20	92,81	100,00	72,63
54	Pejukutan	Nusa Penida	77,72	60	92,81	0,00	57,63
55	Sakti	Nusa Penida	77,72	20	92,81	100,00	72,63
56	Sekartaji	Nusa Penida	77,72	100	92,81	0,00	67,63
57	Suana	Nusa Penida	77,72	40	92,81	42,81	63,34
58	Tanglad	Nusa Penida	77,72	30	92,81	0,00	50,13
59	Toya pakeh	Nusa Penida	77,72	100	92,81	100,00	92,63

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Dari data di atas, infrastruktur yang dimaksud terdiri dari jalan mantap, sanitasi, rumah layak huni, dan akses air bersih. Desa/kelurahan yang jumlah rata-rata infrastrukturnya sudah 80% ke atas maka dianggap sudah terpenuhi, sedangkan yang belum mencapai 80% dianggap belum terpenuhi. Berdasarkan data tersebut, desa/kelurahan yang belum terpenuhi infrastruktur layanan dasar pada Tahun 2024 berjumlah 17 terdiri dari :



Tabel 2.14
Desa/Kelurahan yang belum terpenuhi rata-rata 80% Infrastruktur
Tahun 2024

No	Desa	Kecamatan	Kriteria				
			Jalan Mantap	Sanitasi	Rumah Layak Huni	Akses Air Bersih	Jumlah
1	Semarapura Klod Kangin	Klungkung	92,55	20	97,44	100,00	77,50
2	Kampung kusamba	Dawan	92,72	60	96,52	34,99	71,06
3	Pesinggahan	Dawan	92,72	40	96,52	43,66	68,23
4	Batukandik	Nusa Penida	77,72	10	92,81	46,16	56,67
5	Batumadeg	Nusa Penida	77,72	30	92,81	80,80	70,33
6	Batununggul	Nusa Penida	77,72	20	92,81	100,00	72,63
7	Bunga mekar	Nusa Penida	77,72	30	92,81	21,37	55,48
8	Jungut batu	Nusa Penida	77,72	100	92,81	0,00	67,63
9	Klumpu	Nusa Penida	77,72	40	92,81	68,56	69,77
10	Kutampi	Nusa Penida	77,72	100	92,81	43,06	78,40
11	Lembongan	Nusa Penida	77,72	100	92,81	0,00	67,63
12	Ped	Nusa Penida	77,72	20	92,81	100,00	72,63
13	Pejukutan	Nusa Penida	77,72	60	92,81	0,00	57,63
14	Sakti	Nusa Penida	77,72	20	92,81	100,00	72,63
15	Sekartaji	Nusa Penida	77,72	100	92,81	0,00	67,63
16	Suana	Nusa Penida	77,72	40	92,81	42,81	63,34
17	Tanglad	Nusa Penida	77,72	30	92,81	0,00	50,13

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Dari 17 Desa/Kelurahan yang belum terpenuhi infrastruktur layanan dasarnya, terdapat 1 kelurahan yaitu kelurahan Semarapura Klod Kangin, 2 desa di kecamatan Dawan dan 14 desa di Kecamatan Nusa Penida. Kriteria yang belum terpenuhi terdapat pada infrastruktur sanitasi dan/atau akses air bersih, dimana 5 desa di Nusa Penida bahkan masih 0% akses air bersih, sedangkan jalan dan rumah layak huni sudah baik, meskipun di Kecamatan Nusa Penida persentase jalan mantap belum mencapai 80%. Meskipun akses air bersih yang berasal dari PDAM belum tersedia, desa-desa di Kecamatan Nusa Penida memanfaatkan cubang untuk menampung air hujan. Air tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Dalam usaha mencapai sasaran terbangunnya infrastruktur layanan publik yang merata, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Kabupaten Klungkung yang terdiri atas beberapa kepulauan mengakibatkan biaya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan lebih tinggi dari di daratan. Selain permasalahan biaya, akses menuju wilayah pembangunan juga masih tertutup sehingga membutuhkan waktu pembangunan yang lebih lama. Permasalahan kondisi geografis ini telah berdampak luas pada berbagai prasarana publik tidak hanya penyediaan jalan, jembatan, air bersih bahkan juga infrastruktur pendidikan, kesehatan dan sebagainya.



2. Kesadaran masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan infrastruktur publik secara swadaya masih kurang.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menurunkan Indeks Ketimpangan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1. Mengupayakan keseimbangan pembangunan infrastruktur di Klungkung daratan dan Klungkung kepulauan sehingga ketimpangan infrastruktur dapat ditanggulangi.
- 2. Mengupayakan perbaikan infrastruktur yang sangat mendesak berdasarkan skala prioritas, untuk memperoleh penanganan pemeliharaan maupun penggantian.

Tingkat efisiensi sasaran terbangunnya infrastruktur layanan publik yang merata disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Tingkat Efisiensi
Sasaran Terbangunnya Infrastruktur Layanan Publik yang Merata
Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10): >=0 Efisien
Terbangunnya Insfrastuktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	71,19	90,14	0,79	71,19	100,00	0,71	0,11	Efisien

Sumber : data diolah, 2025

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran terbangunnya infrastruktur layanan publik yang merata adalah sebesar 0,11 dengan kategori efisien. Sasaran terbangunnya infrastruktur layanan publik yang merata pada tahun 2024 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.16
Efisiensi Anggaran
Sasaran Terbangunnya Infrastruktur Layanan Publik yang Merata
Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Kawasan Permukiman	407.328.000	380.845.030	26.482.970	93,50
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	4.967.983.350	4.605.476.650	362.506.700	92,70
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	242.857.900	198.969.720	43.888.180	81,93
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.277.242.600	1.117.092.500	160.150.100	87,46



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.095.528.602	963.377.431	132.151.171	87,94
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	104.319.480	63.744.150	40.575.330	61,10
Program Pengembangan Perumahan	254.845.950	135.391.468	119.454.482	53,13
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.559.748.600	6.409.063.194	150.685.406	97,70
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	124.782.700	105.116.250	19.666.450	84,24
Program Penyelenggaraan Jalan	57.053.232.688	50.416.292.462	6.636.940.226	88,37
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	892.915.900	645.822.504	247.093.396	72,33
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.432.879.400	9.492.897.534	939.981.866	90,99
Program Pengelolaan Pelayaran	10.263.346.219	9.910.338.218	353.008.001	96,56
Jumlah	93.677.011.389	84.444.427.111	9.232.584.278	90,14

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024, Sasaran terbangunnya infrastruktur layanan publik yang merata didukung 13 program dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 93.677.011.389 dan terealisasi sebesar Rp. 84.444.427.111 dan sisa anggaran sebesar Rp. 9.232.584.278 atau terealisasi sebesar 90,14 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.

Dokumentasi Pencapaian Sasaran



Kegiatan pemasangan pipa dalam rangka peningkatan jaringan distribusi air di Kecamatan Banjarangkan



Dokumentasi Peningkatan Jalan Mantap, Pemeliharaan Jalan Besang – Selisihan Tahun 2024

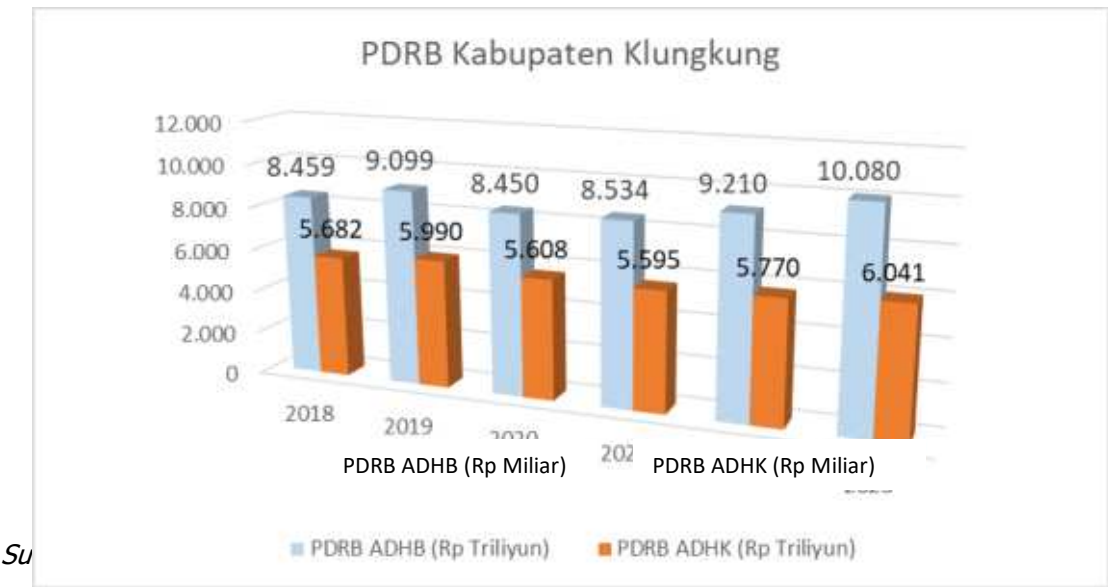


Sasaran 7
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat

Sampai saat ini telah menjadi perdebatan hangat oleh berbagai pihak mengenai mana yang lebih penting, pertumbuhan atau pemerataan ekonomi. Terlepas dari mana yang lebih penting, yang pasti pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan. Sebab, tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah *output* (barang dan jasa) dalam suatu perekonomian suatu daerah dalam jangka satu tahun. Jadi intinya jika ada peningkatan jumlah produk barang dan jasa barulah perekonomian suatu daerah dikatakan tumbuh. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Kompleksitas permasalahan perekonomian di Kabupaten Klungkung merupakan salah satu fokus yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan sasaran Meningkatkan Perekonomian Berbasis Masyarakat yang diukur dengan 3 indikator yaitu Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB, Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB dan Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB.

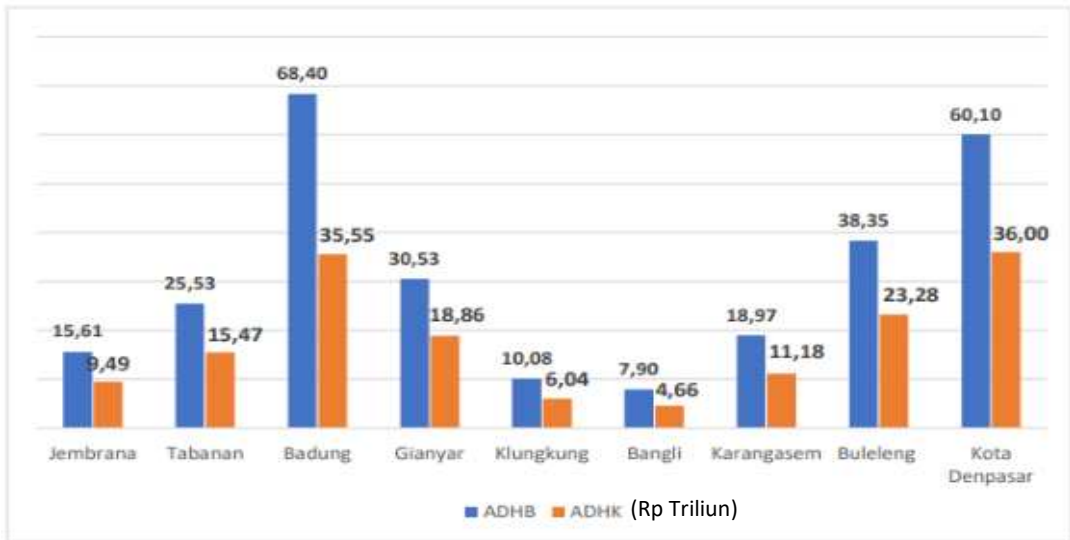
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah indikator ekonomi yang dapat membantu para pembuat kebijakan, memahami pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dari wilayah serta kontribusi terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan. Adapun PDRB Kabupaten Klungkung dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 2.15 PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

Berdasarkan gambar di atas, maka Nilai PDRB Kabupaten Klungkung dalam enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Nilai PDRB mengalami kenaikan yaitu dari Rp 9.210 Miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 10.080 Miliar pada tahun 2023. Sedangkan untuk PDRB Atas Harga Konstan Tahun Dasar 2010, pada Tahun 2023 mencapai Rp 6.041 Miliar atau meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 5.770 Miliar.



Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.16 Perbandingan PDRB Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten/Kota lainnya di Bali Tahun 2023.

Capaian yang ditampilkan merupakan capaian tahun 2023 karena merupakan capaian terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan capaian gambar diatas capaian PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2023 berada di peringkat 8 dari 9 kabupaten/kota di Bali. PDRB Kabupaten terendah dicapai oleh Kabupaten Bangli yang mencapai Rp 7,90 triliun untuk PDRB ADHB dan Rp. 4,66 triliun untuk PDRB ADHK. Sedangkan yang tertinggi dicapai Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp 68,40 triliun untuk ADHB dan Rp 35,55 triliun untuk ADHK. Sedangkan untuk distribusi PDRB Kabupaten Klungkung berdasarkan indikator kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB dan kontribusi lapangan usaha akomodasi dan makan minum terhadap PDRB dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:



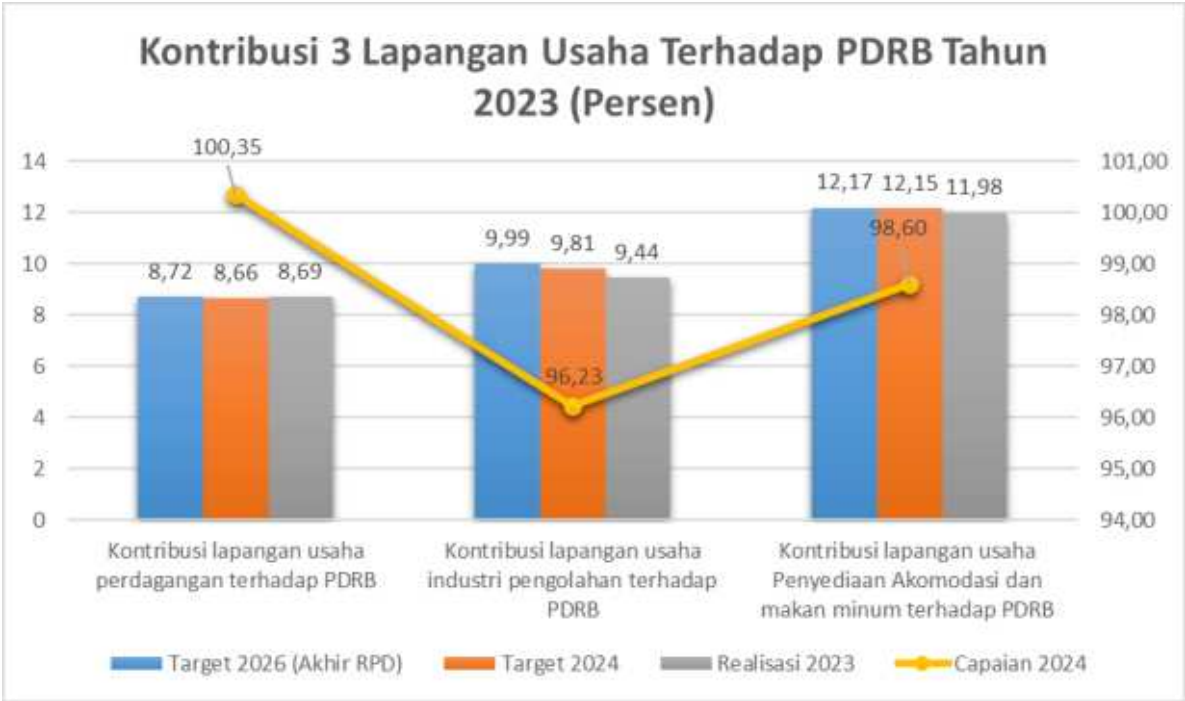
Tabel 2.17
Tabel Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB
Tahun 2018-2023

Kategori PDRB	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,15	8,22	8,23	8,36	8,73	8,69
Industri Pengolahan	9,29	9,29	9,6	9,75	9,81	9,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,5	14,6	10,35	8,81	10,03	11,98

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 23 Peb

2025

Data realisasi PDRB pada data diatas merupakan data tahun 2023 mengingat BPS Kabupaten Klungkung belum merilis angka kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target dan capaian realisasi dapat dilihat pada table berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.17 Kontribusi 3 lapangan usaha terhadap PDRB (%)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Klungkung pada tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan pada indikator kontribusi lapangan industri pengolahan dan kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB belum mencapai target dengan capaian masing-masing sebesar 96,23% dan 98,60%. Ketercapaian terhadap target RPD masih belum ada yang mencapai 100%. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB.

Dalam usaha mencapai sasaran Meningkatnya perekonomian berbasis masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klungkung menemui kendala sebagai berikut:



1. Kondisi iklim terutama curah hujan, hari hujan, dan distribusi hari hujan terutama di Kecamatan Nusa Penida setiap tahunnya kurang mendukung pelaksanaan kegiatan penanaman komoditas palawija, sayuran, dan buah-buahan.
2. Belum beragamnya pola konsumsi masyarakat yang mempengaruhi tingkat perekonomian atau pendapatan sebagian besar masyarakat. Sehingga tingkat konsumsi beras kembali meningkat.
3. Meningkatnya tingkat pengangguran menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klungkung.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang IT sehingga menghambat pembuatan bahan promosi pariwisata.
5. Kurangnya atraksi di destinasi yang dapat meningkatkan kunjungan pariwisata.
6. Belum optimalnya pengawasan usaha atau jasa pariwisata.
7. Kurangnya fasilitasi kegiatan ekonomi kreatif.
8. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata.

Untuk mencapai Meningkatnya perekonomian berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Klungkung, mengingat permasalahan ekonomi adalah permasalahan multi sektor. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan sasaran meningkatnya perekonomian berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM pertanian melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis kewirausahaan.
2. Melakukan pelatihan untuk menambah wawasan dalam bidang IT.
3. Melakukan kerjasama dengan pelaku wisata dan pihak lainnya dalam melaksanakan event pariwisata.
4. Pembentukan unit pelaksana teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjadi unit teknis yang memberikan pembinaan dan pelatihan teknis kewirausahaan terhadap usaha-usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Klungkung.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya perekonomian berbasis masyarakat sebagai berikut:



Tabel 2.18
Tingkat Efisiensi
Meningkatnya perekonomian berbasis masyarakat
Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10):>=0 Efisien
Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	8,66	75,74	0,11	8,66	100,00	0,09	0,32	Efisien
	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	9,44	75,74	0,12	9,81	100,00	0,10	0,27	Efisien
	Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	11,98	75,74	0,16	12,15	100,00	0,12	0,30	Efisien
Jumlah		10,03	75,74	0,13	10,21	100,00	0,10	0,30	Efisien

Sumber : data diolah, 2025

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran meningkatnya perekonomian berbasis masyarakat adalah sebesar 0,30. Pada tahun 2024 sasaran meningkatnya perekonomian berbasis masyarakat dicapai dengan efisien. Sasaran meningkatnya perekonomian berbasis masyarakat didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Efisiensi Anggaran
Sasaran Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat
Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	25.996.600	25.806.900,00	189.700	99,27
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	75.955.152	54.275.674,00	21.679.478	71,46
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	8.145.680	7.963.600,00	182.080	97,76
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	231.069.600	227.127.760,00	3.941.840	98,29
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	5.877.980	5.382.150,00	495.830	91,56
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	345.101.840	329.710.528,00	15.391.312	95,54
Program Pengembangan UMKM	832.661.344	769.604.329,00	63.057.015	92,43
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1.964.900	1.908.000,00	56.900	97,10
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	12.386.281.391	10.032.146.737	2.354.134.654	80,99



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	6.602.140	6.533.600,00	68.540	98,96
Program Pengembangan Ekspor	631.960	604.000,00	27.960	95,58
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	134.635.504	101.740.608,00	32.894.896	75,57
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	433.716.238	342.006.261,00	91.709.977	78,85
Program Pemasaran Pariwisata	4.999.469.100	2.744.202.221,00	2.255.266.879	54,89
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	603.682.340	314.542.351,00	289.139.989	52,10
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.483.473.819	1.164.360.780,00	319.113.039	78,49
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	12.148.871.636	8.173.494.508	3.975.377.128	67,28
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	573.814.736	502.087.160,00	71.727.576	87,50
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	452.898.904	450.479.184,00	2.419.720	99,47
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	863.250.206	801.888.330	61.361.876	92,89
Program Penyuluhan Pertanian	145.319.060	121.826.100,00	23.492.960	83,83
Program Penanganan Kerawanan Pangan	121.408.050	82.356.800,00	39.051.250	67,83
Program Pengawasan Keamanan Pangan	48.007.900	36.484.900,00	11.523.000	76,00
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.087.827.826	1.023.535.397	64.292.429	94,09
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.426.746.456	1.342.091.287,00	84.655.169	94,07
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	843.274.560	743.044.264	100.230.296	88,11
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	127.728.970	120.002.100,00	7.726.870	93,95
Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.298.351.011	1.389.304.280,00	909.046.731	60,45
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.381.252.962	2.293.349.671	87.903.291	96,31
Program Pemberdayaan Sosial	3.762.591.306	3.373.299.128,00	389.292.178	89,65



Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	203.501.660	107.506.246,00	95.995.414	52,83
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	151.553.060	115.309.095,00	36.243.965	76,08
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	16.919.560	13.989.160,00	2.930.400	82,68
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	473.543.821	436.741.690,00	36.802.131	92,23
Program Perlindungan Khusus Anak	382.641.680	142.531.392,00	240.110.288	37,25
Program Perlindungan Perempuan	388.527.420	136.912.395,00	251.615.025	35,24
Program Rehabilitasi Sosial	727.871.680	486.193.933,00	241.677.747	66,80
Jumlah	50.201.168.052	38.020.342.519	12.180.825.533	75,74

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024, Sasaran Meningkatnya perekonomian berbasis masyarakat Tahun didukung dengan 37 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 50.201.168.052 dan terealisasi sebesar Rp. 38.020.342.519 dan sisa anggaran sebesar Rp. 12.180.825.533 atau terealisasi sebesar 75,74 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.

DOKUMETASI PENCAPAIAN SASARAN





Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



Kegiatan Bimtek Wirausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Sasaran 8 Meningkatnya Mitigasi Bencana

Wilayah Kabupaten Klungkung memiliki kondisi geografis yang memungkinkan terjadinya bencana yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam. Klungkung merupakan salah satu wilayah Provinsi Bali yang memiliki garis pantai terpanjang, terlebih Klungkung sendiri dibagi menjadi dua bagian yang berbeda yaitu Klungkung daratan dan kepulauan. Fakta ini membuat kerentanan Klungkung menjadi lebih tinggi mengingat wilayah pesisir dan beberapa wilayah daratan di Kabupaten Klungkung merupakan daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib bertanggung jawab melindungi masyarakatnya dari bencana.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian. IRB ini dihitung berdasarkan: (1) komponen bahaya berupa probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya; (2) komponen kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan; dan (3) komponen kapasitas yang dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: perkuatan kebijakan dan kelembagaan; pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; penanganan tematik kawasan rawan bencana; peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Berdasarkan data inaRISK, IRB Kabupaten Klungkung tahun 2019 adalah 149,80 (termasuk kelas risiko tinggi), mengalami penurunan signifikan dari 181,6 pada tahun 2015. Pada tahun 2020 IRB menurun menjadi 145,3, sudah termasuk ke dalam kelas kategori risiko sedang). Penurunan ini berlanjut pada 2021 menjadi 124,22 (kelas risiko sedang). Adapun ancaman bencana di Kabupaten Klungkung meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah



longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrim.

Tingkat bahaya akan bencana di suatu daerah bervariasi dari rendah, sedang hingga tinggi. Namun dengan Upaya penanggulangan bencana yang tepat dan terarah, risiko bencana di suatu daerah dapat diturunkan. Pada Tahun 2024, Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) akan digunakan sebagai nilai IKU BPBD Provinsi Bali dan nilai IRB akan dipergunakan sebagai capaian daerah. Berdasarkan hal tersebut dalam rangka meningkatkan mitigasi bencana Kabupaten Klungkung, Indeks Risiko Bencana menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Berikut gambaran Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Klungkung selama 5 tahun terakhir:



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.18 Indeks Risiko Bencana Kabapaten Klungkung dari tahun 2020-2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Klungkung mengalami penurunan nilai IRB dari yang sebelumnya pada Tahun 2023 sebesar 126,93 menjadi 124,33 pada Tahun 2024 yang manandakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan. Ketercapaian realisasi pada tahun 2024 terhadap target 2026 tersebut sebesar 97,59 Persen.

Tabel 2.20
Indeks Risiko Bencana Seluruh Kabupaten di Provinsi Bali
Dari Tahun 2020-2024

Kabupaten / Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Jembrana	160,41	152,62	157,92	150,15	133,06
Kab. Tabanan	153,27	148,4	143,87	136,9	122,13
Kab. Badung	101,81	98,23	103,29	102,92	94,74
Kab. Gianyar	129,79	125,38	130,56	129,03	122,96
Kab. Klungkung	133,42	124,22	125,41	126,93	124,33
Kab. Bangli	139,46	133,69	128,65	125,04	117,37
Kab. Karangasem	123,15	112,79	129,11	121,24	110,78
Kab. Buleleng	100,85	92,45	91,64	91,49	86,02
Kota Denpasar	106,7	105,81	104,39	98,18	90,13

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali, 2025



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Jembrana memperoleh Indeks Risiko Bencana paling tinggi dengan poin sebesar 133,06 pada 2024 dan Kabupaten Buleleng dengan Indeks Risiko Bencana paling rendah dengan poin 86,02 yang dapat diartikan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki tingkat kematangan yang baik dalam menghadapi bencana. Untuk Kabupaten Klungkung sendiri memperoleh Indeks Risiko Bencana sebesar 124,33 poin yang masih dalam kategori sedang.

Adapun yang menjadi faktor pendukung peningkatan capaian sasaran meningkatnya mitigasi bencana di Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Telah terbentuknya Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Klungkung sejak tahun 2016;
2. Adanya *Call Center* Pengaduan Kejadian Kebencanaan pada BPBD Kabupaten Klungkung dengan nomor telepon (0366)23000;
3. Sosialisasi dan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat yang semakin sering dilaksanakan;
4. Tahun 2018 telah dilaksanakan penyusunan Kajian Risiko Bencana di wilayah Kabupaten Klungkung yang merupakan kelembagaan/pemerintah;
5. Pemasangan rambu peringatan dini di wilayah Kabupaten Klungkung;
6. Pemetaan daerah rawan telah dilaksanakan dari tahun 2018.

Adapun permasalahan yang ditemui dalam meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
2. Upaya pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan belum optimal;
3. Belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana;
4. Secara umum masyarakat di Kabupaten Klungkung memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bencana;
5. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana;
6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi daerah yang rawan bencana;
7. Sarana dan prasarana BPBD masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dilakukan melalui Penyusunan Kajian Risiko Bencana di wilayah Kabupaten Klungkung, Pemetaan daerah rawan bencana, Pelatihan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana;
2. Peningkatan sosialisasi potensi ancaman bencana dilakukan melalui sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat serta penempatan tanda-tanda peringatan bahaya dan larangan memasuki daerah rawan bencana;
3. Peningkatan pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang melibatkan *stakeholder* terkait, pelatihan penanggulangan bencana kepada relawan penanggulangan bencana desa dan aparatur pemerintah.



Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 2.21
Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Mitigasi Bencana
Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10): >=0 Efisien
Meningkatnya mitigasi bencana	Indeks Risiko Bencana	124,33	75,40	1,66	123,41	100,00	1,23	0,34	Efisien

Sumber : data diolah, 2025

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana adalah sebesar 0,34 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari tingkat efisiensi. Pada tahun 2024 sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana dicapai dengan Efisien. Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana pada tahun 2024 didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Efisiensi Anggaran
Meningkatnya Mitigasi Bencana
Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penanggulangan Bencana	1.391.673.396	962.861.323	428.812.073	69,19
Program Penanganan Bencana	481.419.452	284.591.500,00	196.827.952	59,12
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.537.972.608	1.324.633.321,00	213.339.287	86,13
Jumlah	3.411.065.456	2.572.086.144	838.979.312	75,40

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024, Sasaran Meningkatnya Mitigasi Bencana didukung dengan 3 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp 3.411.065.456 dan terealisasi sebesar Rp 2.572.086.144 dan sisa anggaran sebesar Rp 838.979.312 atau terealisasi sebesar 75,40 persen. Sasaran ini didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung.



DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Focus Group Discussion yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klungkung dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Kegiatan pencarian,pertolongan dan evakuasi korban



Sasaran 9
Menurunnya Pencemaran Air

Manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari namun dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat dimana dia tinggal. Tempat tinggal yang tertata rapih dan bersih akan senantiasa terlihat nyaman dan kondusif (aman) jika diimbangi dengan kondisi lingkungan sekitarnya yang bersih dan tertata rapih pula. Air merupakan sumber kehidupan, maka dari itu kualitas air tersebut wajib dijaga demi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Karenanya lingkungan hidup yang



berkualitas merupakan suatu fokus utama pembangunan daerah. Pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung diindikasikan dengan ditetapkannya sasaran Menurunnya Pencemaran Air yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas Air. Indeks Kualitas Air (IKA) adalah metode untuk mengukur tingkat pencemaran air. IKA dapat digunakan untuk menilai kualitas air secara umum serta membantu menentukan kesesuaian air untuk berbagai penggunaan seperti minum, rekreasi, dan penyokong kehidupan akuantik. Berdasarkan nilai P_{ij} . P_{ij} adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran air berdasarkan peruntukan atau kelas kualitas air tertentu, kategori tingkat pencemarannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Kategori Tingkat
bedasarkan nilai P_{ij}

Tabel 2.23

Pencemaran Air

No	Nilai P_{ij}	Keterangan
1	$0,0 < P_{ij} < 1,0$	Memenuhi Baku Mutu
2	$1,0 < P_{ij} < 5,0$	Tercemar Ringan
3	$5,0 < P_{ij} < 10,0$	Tercemar Sedang
4	$P_{ij} > 10$	Tercemar Berat

Sumber : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, 2025

Dalam penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) untuk Kabupaten Klungkung pada tahun 2024, pengambilan sampel air sungai dilakukan di tiga sungai utama, yaitu Sungai Unda, Sungai Bubuh, dan Sungai Jinah. Untuk setiap sungai, ditentukan tiga titik pengambilan sampel yang mewakili kondisi sungai tersebut, yaitu pada bagian hulu, tengah, dan hilir. Pengamatan kualitas air dilakukan hanya satu kali pada musim hujan, tepatnya pada bulan April, sehingga total jumlah sampel yang dianalisis mencapai sembilan titik sampel. Proses pengambilan sampel ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kualitas air di masing-masing sungai selama periode pengamatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang akurat tentang kondisi kualitas air di Kabupaten Klungkung, serta membantu dalam mengidentifikasi potensi pencemaran yang mungkin terjadi. Hasil analisis dari sembilan titik sampel ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam upaya pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan berkelanjutan di daerah tersebut. Selain itu, informasi ini juga penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Klungkung secara keseluruhan. Berikut hasil analisis IKA Kabupaten Klungkung Tahun 2024 secara rinci terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.24
Hasil Akhir IKA Kabupaten Klungkung, Tahun 2024

Titik Pantau berdasarkan kualitas air	Jumlah	Persentase (%)	Bobot	Nilai (Persentase*bobot)
Memenuhi Baku Mutu (baik)	13	62	70	43,333
Tercemar Ringan	8	38	50	19,048
Tercemar Sedang	0	0	30	0
Tercemar Berat	0	0	10	0
Jumlah	21	100		62,381

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian, 2025

Dari hasil analisis pada Tabel di atas terlihat Indeks Kualitas Air (IKA) untuk sungai-sungai di Kabupaten Klungkung adalah sebesar 62,381, dimana nilai ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tahun 2022 dan 2023 yang nilai IKA hanya mencapai 53,16 untuk tahun 2022 dan 58,42 untuk tahun 2023. Akan tetapi, nilai IKA tahun 2022 dan 2023 menggunakan data pemantauan kualitas air dari titik pantau yang lebih sedikit yaitu berjumlah 19 titik. Pada tahun 2022 terdapat 16 titik pantau yang tercemar ringan dan hanya 3 titik memenuhi baku mutu. Pada tahun 2023, kondisi perairan sungai membaik dan beberapa sungai mengalami peningkatan, yaitu terdapat 11 titik pantau yang tercemar ringan dan 8 titik memenuhi baku mutu. Pada Tahun 2024, terdapat lebih banyak titik pantau yang memenuhi baku mutu, dari 21 titik pantau 13 titik menunjukkan memenuhi baku mutu dan hanya 8 yang tercemar ringan. Berdasarkan data tersebut, nilai IKA Tahun 2024 menjadi 62,381 dan nilai IKA ini meningkat jika di bandingkan pada kondisi tahun 2023 dengan nilai IKA sebesar 58,42, tahun 2022 dengan nilai IKA sebesar 53,16, dan tahun 2021 yang memiliki nilai IKA sebesar 40,91. Berikut adalah capaian Indeks Kualitas Air selama 4 tahun terakhir di Kabupaten Klungkung :



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian, 2025

*Terget 2021-2023 menggunakan target Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kab.Klungkung

Gambar 2.19 Indeks Kualitas Air Kabupaten Klungkung , 2021-2024



Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air di Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 sebesar 100 persen dengan target sesuai dengan RKPD Perubahan 2024 sebesar 62,38 dan terealisasi sebesar 62,38 persen. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Klungkung mulai dilaksanakan pada tahun 2021, angka realisasi yang disajikan pada tahun 2020 tidak dapat ditampilkan karena tidak dilakukan pengukuran karena adanya *refocusing* anggaran menghadapi masa pandemic covid-19. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, berdasarkan keputusan tersebut target Indeks Kualitas Air Kabupaten Klungkung Tahun 2026 ditetapkan sebesar 73,05 dengan ketercapaian terhadap realisasi tahun 2024 adalah sebesar 85,39% sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air.

Dalam mewujudkan sasaran Menurunnya Pencemaran Air, Pemerintah Kabupaten Klungkung menghadapi kendala:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Kesalahan pengelolaan itu termasuk membuang sampah ketempat yang tidak semestinya seperti sungai, laut, lahan kosong, mencampurkan sampah organik dan anorganik serta membakar sampah di wilayah permukiman;
2. Masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses sanitasi yang berkualitas;
3. Terdapat industri rumah tangga makanan dan tekstil baik itu usaha skala rumah tangga, menengah maupun usaha skala besar belum melakukan pengolahan limbah industrinya dengan tepat sehingga sangat berpotensi mencemari lingkungan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan sasaran Menurunnya Pencemaran Air adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan secara berkesinambungan kepada masyarakat untuk mencegah masyarakat membuang sampah langsung di badan-badan sungai, atau tempat sembarangan. Usaha ini telah dilaksanakan dengan sosialisasi melalui :
 - a. penyebaran pamflet kepada masyarakat tentang pengembangan pengolahan sampah terpadu 3 serta penataan taman dilingkungannya
 - b. Program TOSS bekerjasama dengan pihak III yaitu dengan CV. Bhakti Bumi Berseri untuk sampah anorganik dan PT. Cahaya Terang Bumi Lestari untuk sampah residu Di Kabupaten Klungkung. PT. Cahaya Terang Bumi Lestari melakukan pengolahan sampah residu menjadi komoditi energi baru terbarukan dengan menggunakan mesin rekayasa teknologi.
2. Melakukan identifikasi sumber pencemar sungai-sungai di Kabupaten Klungkung;
3. Melakukan analisa sumber pencemar sungai;
4. Melakukan aksi/program kegiatan pengendalian pencemaran air limbah; dan
5. Melakukan sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat di sekitar sempadan sungai tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Pencemaran Air sebagai berikut :

Tabel 2.25
Tingkat Efisiensi
Menurunnya Pencemaran Air Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10):>=0 Efisien
Menurunnya pencemaran air	Indeks Kualitas Air	62,38	89,85	0,69	62,38	100,00	0,62	0,11	Efisien

Sumber : data diolah, 2025

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Menurunnya Pencemaran Air adalah sebesar 0,14. Pada tahun 2024 sasaran Menurunnya Pencemaran Air dicapai dengan efisien. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.26
Efisiensi Anggaran
Menurunnya Pencemaran Air Tahun 2024

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	7.718.800	7.718.800,00	-	100,00
Program Penetapan Tanah Ulayat	199.557.568	101.717.535	97.840.033	50,97
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.652.267.635	1.600.677.905	51.589.730	96,88
Program Pengelolaan Persampahan	12.510.143.672	11.794.448.320	715.695.352	94,28
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	200.422.937	197.897.937,00	2.525.000	98,74
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	226.934.140	222.846.390,00	4.087.750	98,20



Program Perencanaan Lingkungan Hidup	99.857.750	99.857.750,00	-	100,00
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	6.340.189.548	5.055.584.845	1.284.604.703	79,74
Jumlah	21.237.092.050	19.080.749.482	2.156.342.568	89,85

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024, Sasaran Menurunnya Pencemaran Air didukung dengan 8 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 21.237.092.050 dan terealisasi sebesar Rp 19.080.749.482 dan sisa anggaran sebesar Rp 2.156.342.568atau terealisasi sebesar 89,85 persen. Sasaran ini didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Foto pendampingan pengambilan sampel air sungai, di Tukad Jinah, Tukad Bubuh dan Tukad Unda(di Hulu,Tengah dan Hilir)

Sasaran 10
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif

Terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah satu kunci perwujudan good governance. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Berkenaan dengan hal tersebut , Pemerintah telah mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka dijelaskan bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP bertujuan untuk mendorong pemerintah fokus pada pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dan juga mendorong pemerintah mampu menjelaskan capaian kinerjanya dengan ukuran-ukuran yang jelas dan telah disepakati di awal tahun. Sebagaimana di atur dalam Pasal 4 dan 5 Perpres Nomor 29



Tahun 2014, maka SKPD adalah salah satu entitas penyelenggara SAKIP yang meliputi : a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d) pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) evaluasi kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP diharapkan mampu menghasilkan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintah yang tersusun dalam suatu laporan akuntabilitas yang memadai. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap (pimpinan) instansi Pemerintah.

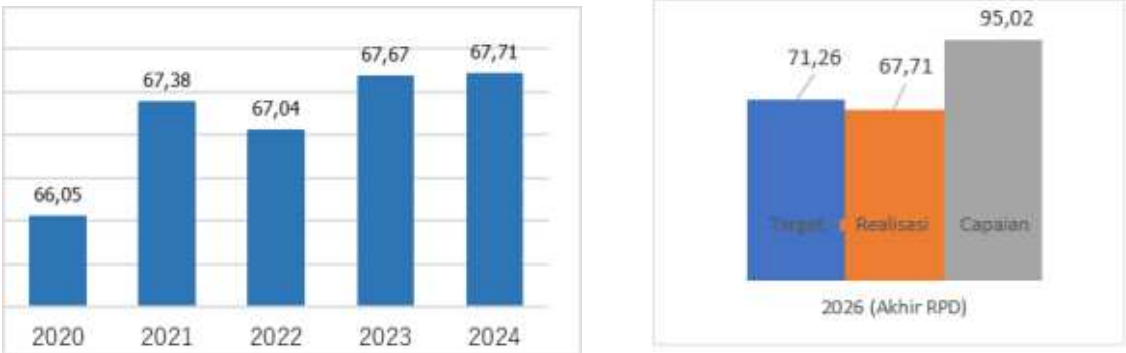
Laporan kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk tingkat kabupaten, fokus pelaporan kinerja adalah pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Jika dilihat dari hasil evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Klungkung dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.27
Hasil Penilaian Masing-Masing Komponen Akuntabilitas Kab. Klungkung
Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,22	23,26
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,07	18,07
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,99	11,28
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,39	15,10
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	67,67	67,71
KATEGORI			B	B

Sumber : LHE AKIP Kab. Klungkung, 2025

Berdasarkan tabel dapat dilihat nilai AKIP Kabupaten klungkung pada tahun 2023 sebesar 67,67 dan pada Tahun 2024 sebesar 67,71 dan memperoleh peningkatan nilai sebesar 0,04. Peningkatan nilai pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, masing-masing sebesar 0,04 dan 0,29. Sedangkan penurunan nilai pada Evaluasi Kinerja Internal sebesar 0,29 poin dan pada komponen pengukuran kinerja masih sama dengan nilai tahun lalu. Dibawah ini disajikan capaian akhir Nilai AKIP Kabupaten Klungkung pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut :



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klungkung, 2025
Gambar 2.20 Hasil Nilai AKIP Kabupaten Klungkung, 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat peningkatan nilai AKIP yang cukup tinggi pada tahun 2022 ke 2023 sebesar 0,63 namun peningkatan yang tidak signifikan dari 2023 ke 2024 sebesar 0,04. Ketercapaian realisasi 2024 terhadap target tahun 2026 sesuai dengan target yang ditetapkan pada RPD Kab. Klungkung tahun 2024-2026 baru mencapai sebesar 95,02 persen. Untuk mengetahui perkembangan hasil evaluasi AKIP tingkat Kabupaten/Kota se-Bali, berikut ini disajikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022-2024.



Sumber : Biro Organisasi Setda Prov Bali, 2025
Gambar 2.21 Nilai Evaluasi AKIP Kab/Kota se Bali (poin), 2022-2024

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Klungkung memperoleh nilai evaluasi AKIP sebesar 67,71 poin pada tahun 2024. Salah satu yang mempengaruhi Indikator Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2025

Gambar 2.22 Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Klungkung, 2020-2024

Berikut disajikan nilai indeks reformasi birokrasi di Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2024.

Tabel 2.28

Nilai Indeks Reformasi Bikrokrasi Pemerintah Kab/Kota dan Provinsi Bali Tahun 2023 dan 2024

Instansi	Indeks RB 2023	Indeks 2024
Provinsi Bali	91,41	93,46
Kota Denpasar	85,53	92,75
Kabupaten Badung	82,89	87,55
Kabupaten Buleleng	80,56	85,53
Kabupaten Klungkung	80,05	88,41
Kabupaten Tabanan	78,48	83,07
Kabupaten Jembrana	75,92	79,09
Kabupaten Bangli	73,9	75,02
Kabupaten Gianyar	70,03	78,35
Kabupaten Karangasem	68,23	77,64

Sumber : Pemerintah Provinsi Bali, 2025

Tahun 2024 merupakan tahun ketujuh Kabupaten Klungkung dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sejak pertama kali tahun 2018. Selama tujuh tahun evaluasi, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Klungkung selalu mengalami peningkatan. Nilai indeks RB tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Klungkung menempati urutan ke 2 dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Indeks Reformasi Birokrasi terbaik diraih oleh Kota Denpasar dengan index 92,75. Sementara indeks reformasi birokrasi terendah diperoleh Pemerintah Kabupaten Bangli dengan indeks 75,02.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tingkat Perangkat Daerah
 - a. Peningkatan kualitas perencanaan dilakukan dengan memperbaiki kualitas indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perbaikan kualitas indikator ini diarahkan untuk memenuhi kriteria indikator kinerja yang



SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reasonable dan Time Bound*). Perbaikan kualitas indikator juga diarahkan dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil melalui penyusunan matrik kinerja/ *cascading* kinerja di semua perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja dari level terbawah dirancang saling mendukung baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal dirancang untuk dapat mengaplikasikan sistem manajemen Ban Berjalan di dalam organisasi perangkat daerah. Setiap bagian / unit kerja akan saling mendukung dengan porsi yang sesuai untuk mendukung terwujudnya kinerja organisasi. Secara vertikal, setiap kinerja bawahan secara bersama-sama dengan rekan setingkatnya akan mendukung kinerja atasannya.

b. Penyelarasan antar dokumen perencanaan.

Hasil penyusunan matrik kinerja/*cascading* kinerja kemudian dituangkan dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Indikator kinerja dalam rencana strategis harus tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dalam penyelarasan itu juga dibuat penyeragaman, dimana Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi IKU Perangkat Daerah dan sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja bagi Eselon II atau Kepala Perangkat Daerahnya. Setiap sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan tanggungjawab eselon III dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon III. Setiap sasaran dan indikator kinerja sub kegiatan merupakan tanggungjawab eselon IV dan langsung menjadi Perjanjian Kinerja bagi eselon IV.

c. Penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Setiap indikator kinerja pada Rencana Kerja yang merupakan hasil dari penyusunan *cascading* kinerja harus menjadi indikator kinerja pada program dan kegiatan pada Dokumen Penganggaran dan karenanya menjadi suatu target yang harus dicapai dengan anggaran yang disediakan. Karena dokumen penganggaran dan perencanaan telah dibuat selaras, maka dokumen pelaporan otomatis melaporkan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam dokumen penganggaran tersebut.

2. Meningkatkan Pemahaman Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

a. Peningkatan Pemahaman oleh Team SAKIP Bersama Tim Gerakan Disiplin Nasional Kabupaten Klungkung

Peningkatan pemahaman oleh Tim SAKIP dilakukan di setiap koordinasi kegiatan perencanaan, penganggaran maupun pelaporan.

b. Peningkatan Pemahaman oleh Tim Kementerian PAN dan RB

Peningkatan pemahaman oleh Tim Kementerian PAN dan RB dilakukan pada suatu kegiatan asistensi *desk Cascading* Kinerja.

c. Peningkatan Pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah

Peningkatan pemahaman internal oleh Kepala Perangkat Daerah dilakukan pada setiap kegiatan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah.

3. Inventarisasi Dokumen-Dokumen SAKIP

Implementasi SAKIP di tataran perangkat daerah, pada dasarnya telah dilakukan setiap tahunnya, namun karena kurangnya pemahaman atas konsep SAKIP itu sendiri, pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya adalah bagian dari SAKIP tidak dipahami sebagai suatu aktivitas manajemen SAKIP. Kegiatan pengendalian melalui rencana aksi, evaluasi atas renstra dan renja, evaluasi atas kinerja perangkat daerah mulai diinventarisasi dokumen pendukungnya dan



digunakan sebagai kelengkapan dokumen SAKIP saat evaluasi implementasi SAKIP.

4. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja

Sebelumnya pelaporan kinerja tidak dilakukan berdasarkan konsep-konsep SAKIP, mulai tahun 2018 pelaporan kinerja diarahkan untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam konsep SAKIP yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB.

5. Peningkatan Kualitas Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Peningkatan kualitas evaluasi dilakukan dengan peningkatan kemampuan SDM evaluator serta koordinasi intensif antara evaluator dan Perangkat Daerah yang dievaluasi. Dengan terjalinnya koordinasi, evaluator bisa mendapatkan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan SAKIP di perangkat daerah dan perangkat daerah dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai konsep SAKIP.

6. Perencanaan Berbasis Elektronik

Proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klungkung sepenuhnya dilakukan secara online melalui link sirenbangda.klungkungkab.go.id. Proses online tersebut dilakukan sejak penjaringan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD, penyusunan rencana kerja dan penyusunan rencana kerja anggaran difasilitasi dengan SIMDA Keuangan yang telah terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan.

7. *E-Performance*

Proses pelaporan kinerja dilakukan secara online melalui link sirenbangda.klungkungkab.go.id untuk pelaporan kinerja perangkat daerah, penyusunan rencana aksi dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan realisasi aksi pencapaian kinerja perangkat daerah, pelaporan kinerja bulanan dan pelaporan capaian rencana kerja triwulanan. Pelaporan Kinerja individu dikelola melalui e-sakip dan e-kinerja Kabupaten Klungkung. Mulai tahun 2020, capaian rencana aksi masing-masing perangkat daerah menjadi salah satu dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, selain aktivitas pribadi dan capaian disiplin pribadi yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pada sasaran Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif Selain indikator Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, sasaran tersebut juga didukung dengan indikator Indeks Inovasi Daerah. Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Yang dimaksud indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Berikut Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung selama 4 tahun terakhir:



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung, 2025

*Target 2021 dan 2022 menggunakan data capaian

Gambar 2.23 Indeks Inovasi Daerah Kab. Klungkung, 2020-2024

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa capaian 2023 dan 2024 sudah mencapai target dengan nilai indeks masing-masing sebesar 60,77 dan 67,75 dengan peningkatan poin sebesar 6,98 Poin. Target Tahun 2024 mengalami penyesuaian menjadi 62 karena mempertimbangkan ketercapaian pada tahun 2023 yang sudah melebihi target 2024. Untuk ketercapaian terhadap target tahun 2026 sesuai dengan dokumen RPD Kab.Klungkung maka dapat dilihat capaian sudah mencapai 105,86 persen, sehingga target akan dievaluasi kembali dan akan ditetapkan pada dokumen RPJMD Kab.Klungkung Tahun 2025-2029 yang masih disusun. Berikut Capaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 seluruh kabupaten dan provindi Bali :



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 2.24 Rekap Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bali dan seluruh Kabupaten Se- Bali, Tahun 2024



Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 merupakan capaian tertinggi di antara seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, sebagai salah satu kabupaten di Bali yang memperoleh predikat Sangat Inovatif. Sementara itu, di antara seluruh kabupaten di Indonesia, Kabupaten Klungkung memperoleh peringkat 35 di antara seluruh 415 kabupaten di Indonesia.

Dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan kajian untuk mendukung pembangunan Kabupaten Klungkung. Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mendukung tercapainya Pembangunan Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Klungkung, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, sehingga dapat bermanfaat secara ekonomi, sosial maupun budaya serta memberikan kesejahteraan dan daya saing Masyarakat Kabupaten Klungkung.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung antara lain:

1. Hasil kajian yang telah dilaksanakan oleh semua perangkat daerah belum diterapkan secara optimal
2. Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
3. Teknologi sederhana dan teknologi tepat guna belum diterapkan dan dilindungi HAKI-nya secara optimal
4. Hasil-hasil kajian sebagian besar belum terimplikasikan di dunia usaha dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
5. Belum terbangunnya kolaborasi dan integrasi antara badan riset nasional dengan pengguna pemerintah, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya
6. Belum terbangunnya pemanfaatan akses pendanaan penelitian dan pengembangan dari berbagai sumber: APBN, APBD, dunia usaha dan industri serta sumber lainnya
7. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi.

Adapun Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melakukan pengumpulan data kelitbangan dari perangkat daerah serta melakukan asistensi dalam pengelolaan inovasi oleh perangkat daerah dan mengadakan kegiatan lomba inovasi kategori perangkat daerah dan desa dan kategori sekolah. Selain itu juga telah dilakukan upaya diseminasi inovasi dengan menghadirkan narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE)



terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif sebagai berikut:

Tabel 2.29
Tingkat Efisiensi
Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10): >=0 Efisien
Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	67,71	93,70	0,72	69,71	100,00	0,70	0,04	Efisien
	Indeks Inovasi Daerah	67,75	93,70	0,72	67,75	100,00	0,68	0,07	Efisien
Rata-rata		67,73	93,70	0,72	68,73	100,00	0,69	0,05	Efisien

Sumber : data diolah, 2025

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif adalah rata-rata sebesar 0,08. Pada tahun 2024 sasaran Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif dicapai dengan efisien karena nilai indeks efisiensi lebih tinggi dibanding dengan standar efisiensi yang mengakibatkan efisiennya sasaran tersebut dicapai dengan jumlah anggaran yang lebih kecil. Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.30
Efisiensi Anggaran
Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif
Tahun 2024

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2.635.366.624	2.079.281.803	556.084.821	78,90
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	804.666.967.340	763.431.341.489	41.235.625.851	94,88
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.241.399.841	723.700.192	517.699.649	58,30
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	31.984.985.412	18.564.127.495,00	13.420.857.917	58,04
Program Kepegawaian Daerah	1.434.115.296	718.625.755,00	715.489.541	50,11
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.508.294.300	2.186.578.921,00	321.715.379	87,17
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	820.821.889	356.590.376,00	464.231.513	43,44



Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Capaian (%)
(1)	(Rp) (2)	(Rp) (3)	(Rp) (4)	(5)
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	760.455.740	241.698.306,00	518.757.434	31,78
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.414.834.400	1.164.044.212	250.790.188	82,27
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.945.894.048	838.230.632,00	1.107.663.416	43,08
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	471.957.612	270.567.068	201.390.544	57,33
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.835.923.758	2.572.997.708,00	262.926.050	90,73
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	765.895.325	732.472.460	33.422.865	95,64
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	31.416.900	25.266.041,00	6.150.859	80,42
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	8.590.250	6.090.250,00	2.500.000	70,90
Program Pencatatan Sipil	1.033.573.320	1.025.448.200,00	8.125.120	99,21
Program Pendaftaran Penduduk	10.881.940	6.512.600,00	4.369.340	59,85
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	84.849.800	43.428.858,00	41.420.942	51,18
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	144.186.420	103.268.940	40.917.480	71,62
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.560.620.966	2.437.875.567	122.745.399	95,21
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.251.820	83.268.752	4.983.068	94,35
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	619.703.980	539.582.380	80.121.600	87,07
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.777.120	49.566.500	14.210.620	77,72
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.080.555.780	723.414.312,00	357.141.468	66,95
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	215.396.895.360	208.932.026.413	6.464.868.947	97,00
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.966.192.334	1.785.855.113	1.180.337.221	60,21
Program Pengelolaan Arsip	66.247.855	59.016.665	7.231.190	89,08
Jumlah	1.077.642.655.430	1.009.700.877.008	67.941.778.422	93,70

Pada tahun 2024, Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang Bersih dan Inovatif didukung dengan 27 program pendukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.



1.077.642.655.430 dan terealisasi sebesar Rp. 982.391.867.554 dan sisa anggaran sebesar Rp. 95.250.787.876 atau terealisasi sebesar 91,16 persen. Sasaran ini didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan, Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Nusa Penida.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



Perencanaan terintegrasi dengan pelaporan



Penerimaan penghargaan Innovative Government Awards (IGA) tahun 2024,



Penerapan e-Sakip



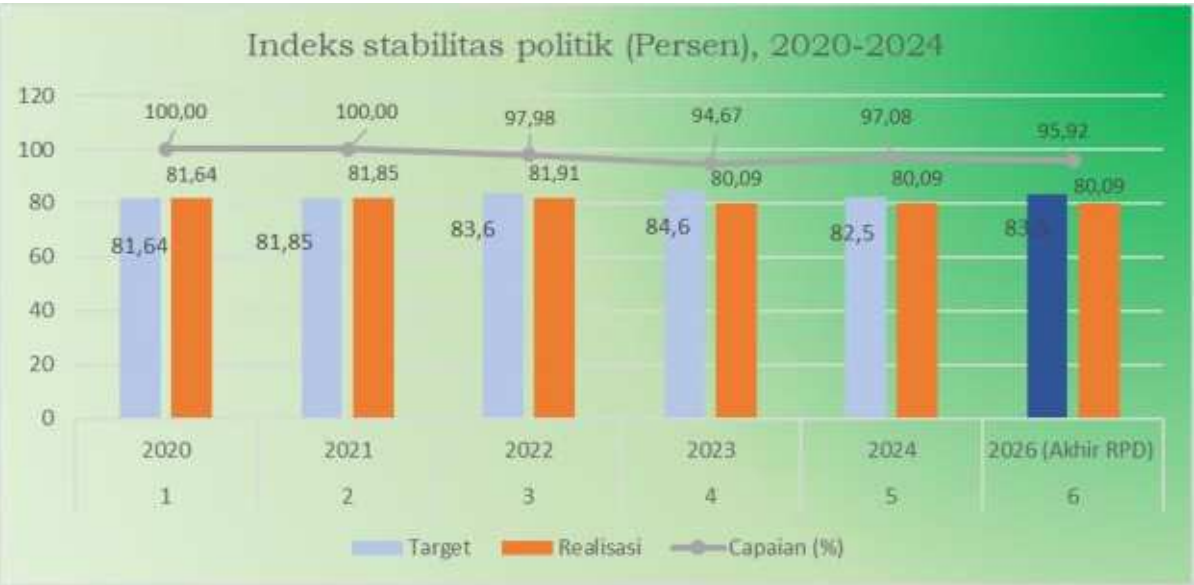
Penyelenggaraan workshop Inovasi Daerah

Sasaran 11
Menjaga Ketentraman, Ketertiban dan Stabilitas Politik

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat. Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman. Keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma–norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Pentingnya pemenuhan terhadap kebutuhan akan rasa aman di masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menetapkan sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap yang diukur dengan Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2023,



seiring perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Klungkung, untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap , indikator kinerja diubah dari Indeks Demokrasi Daerah menjadi Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung. Hal tersebut mengingat Indeks Demokrasi Daerah tidak dirilis secara khusus untuk Pemerintah Kabupaten melainkan hanya untuk tingkat Pemerintah Provinsi. Sehingga penggunaan indikator tersebut menjadi kurang sesuai untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung, 2025

Gambar 3.2.25 Indeks Stabilitas Politik Kab. Klungkung, 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung sejak tahun 2020 selalu menunjukkan tren positif namun terjadi penurunan ditahun 2023 sebanyak 1,82 Poin. Data indeks stabilitas politik tahun 2024 sementara menggunakan data terakhir tahun 2023 disebabkan karena tahun 2024 akan dilaksanakan pengukuran pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung masih berada dibawah target dengan capaian 94,67%, dimana target sebesar 84,6 terealisasi sebesar 80,09 poin. Jika dibandingkan dengan target 2024, Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung masih berada dibawah target, dengan capaian 97,8% dengan target sebesar 82,5 dan terealisasi sebesar 80,09 poin. Dapat dilihat pula ketercapaian realisasi terakhir terhadap target tahun 2026 sesuai dengan target pada dokumen RPD adalah sebesar 95,92 persen sehingga perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan indeks stabilitas politik di Kabupaten Klungkung.

Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung memberikan informasi mengenai kondisi stabilitas politik Kabupaten Klungkung melalui 3 aspek yaitu : aspek ekonomi, aspek kelembagaan dan aspek politik. Ketiga aspek tersebut dimanifestasikan melalui tiga (3) variabel yakni : variabel pertumbuhan ekonomi, variabel perkembangan kelembagaan dan variabel partisipasi politik. Untuk mengetahui secara rinci komponen pembentuk Indeks Stabilitas Politik di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.31
Komponen Pembentuk Indeks Stabilitas Politik, 2023

No	Komponen Indeks	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	78,4
2	Perkembangan Pelembagaan	78,84
3	Partisipasi Politik	83,04
Indeks Stabilitas Politik		80,09

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Klungkung, 2025

Dari hasil pengukuran didapatkan secara umum Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung bernilai baik, yaitu sebesar 80,09. Namun jika dilihat per variabel yaitu Variabel Variabel Partisipasi Politik mendapatkan nilai baik yakni 83,04. Untuk variabel Perkembangan Pelembagaan dan Pertumbuhan Ekonomi bernilai sedang yaitu masing-masing 78,84 dan 78,4. Pengukuran Indeks Stabilitas Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung menggunakan metode review berita dan dokumen yang didukung oleh hasil wawancara mendalam dan hasil Focus Group Discussion kepada narasumber yang menentukan nilai dari indeks stabilitas politik Kabupaten Klungkung di Tahun 2023. Beberapa aspek yang mendukung sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap adalah sebagai berikut:

Ketentraman dan Ketertiban

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban, pengendalian atas potensi konflik memegang peranan penting. Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan usaha-usaha pengendalian atas potensi konflik yang terjadi di wilayah Pemerintah Kabupaten Klungkung. Untuk itu, pendataan terkait potensi konflik sangat diperlukan. Untuk mengetahui sebaran konflik yang ada di Kabupaten Klungkung berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.32
Potensi Konflik Berdasarkan Kecamatan di Kab.Klungkung, 2024

Kecamatan/Konflik	Keterangan
KECAMATAN KLUNGKUNG:	
Konflik Lahan Galian C terkait pemabangunan Pusat Kebudayaan Bali.	
Potensi konflik adat terkait sengketa tanah warisan di Desa Selat Kecamatan Klungkung.	selesai
Potensi konflik/kerawanan pelaksanaan Pemilu utamanya terkait pemasangan APK.	selesai
KECAMATAN BANJARANGKAN	
Kasus industri pembuangan limbah kacang kace dari Desa Nyanglan yang mengalir ke Desa Timuhun.	
KECAMATAN DAWAN	
Kasus adat antara Banjar Adat Pancingan dan Banjar Adat Manggis Desa Adat Pancingan, Desa Kusamba.	
Penutupan TPA Sente di Desa Pikat Kecamatan Dawan	
KECAMATAN NUSA PENIDA	
Tapal batas antara Desa Sakti dan Desa Bunga Mekar dengan bergabungnya Dusun Sompang ke Desa Bungamekar.	
Kampung Toya Pakeh dengan Desa Ped terdapat permasalahan mengenai tapal batas.	



Kecamatan/Konflik	Keterangan
Pemanfaatan tanah Negara oleh warga baik untuk tempat tinggal dan sarana pariwisata	
Potensi konflik sosial terkait dengan warga kesepekang/kamorayang di Banjar Adat Sental Kangin Desa Ped Kecamatan Nusa Penida.	selesai

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Klungkung, 2025

Pada akhir Tahun 2023 sampai dengan awal Tahun 2024 di Kabupaten Klungkung masih terdapat 7 potensi konflik sosial yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang intens dan Sampai dengan akhir Desember 2024 telah difasilitasi penanganan/diselesaikan 3 potensi konflik. Dalam upaya menurunkan potensi konflik, Pemerintah Kabupaten Klungkung menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi/mediasi penanganan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Klungkung guna mendapatkan penyelesaian antara pihak yang bertikai.
3. Menyusun Peta Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung bersama dengan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap potensi konflik di Kabupaten Klungkung.
4. Melaksanakan pemantauan lapangan dan evaluasi *Sikonda* (Situasi dan Kondisi Daerah) bersama instansi terkait serta Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing.
5. Mengoptimalkan jejaring di kecamatan dan desa sebagai sumber informasi, data dan fenomena kejadian di masyarakat terutama untuk wilayah Kecamatan Nusa Penida.
6. Memberdayakan para tokoh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan melalui pertemuan operasional FKDM sebagai wahana menggali informasi, menyikapi dan mengevaluasi dinamika sikonda setempat.
7. Memberdayakan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama melalui wadah Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) yang dilakukan melalui pertemuan FKUB sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar umat beragama, serta menyikapi dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dengan cepat yang dapat mempengaruhi kehidupan umat beragama.
8. Memberdayakan para tokoh etnis dalam menjaga kerukunan masyarakat Kabupaten Klungkung yang cukup heterogen melalui wadah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dilakukan melalui pertemuan FPK sebagai sarana silaturahmi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul antar etnis.
9. Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Klungkung untuk turut serta menjaga kerukunan di masyarakat dan meminimalisir potensi konflik sosial.



10. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba yang dilaksanakan melalui pemasangan spanduk dan pembagian stiker serta pamflet bertemakan bahaya penyalahgunaan narkoba dan pelaksanaan tes urine bagi perangkat/aparat desa (dilaksanakan di Kantor Perbekel) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung (dilaksanakan secara sampling pada OPD yang dipilih) serta aparat lembaga/satuan samping. Selain itu juga memberdayakan desa adat dalam pencegahan penyebaran narkoba dengan memfasilitasi penyusunan awig-awig *Perarem Lepas Anti Narkoba*. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kasus narkoba yang dapat berakibat pada timbulnya permasalahan sosial dan kriminal.
11. Melaksanakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Bela Negara, serta melaksanakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno untuk meneladani perjuangan Bung Karno sebagai upaya pembentukan karakter sejak usia dini dan penanaman wawasan kebangsaan utamanya di kalangan generasi muda.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam menurunkan potensi konflik, adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik itu aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, Majelis Madya Desa Pekraman, Majelis Alit Desa Pekraman dan Desa Pekraman, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung dan Tim Terpadu Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung dan berbagai komponen masyarakat lainnya.
2. Adanya keinginan dari masyarakat untuk mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, dan kondusif.

Permasalahan yang muncul dalam upaya menurunkan potensi konflik adalah sebagai berikut :

1. Konflik sosial berkaitan erat dengan dinamika sosial masyarakat yang setiap waktu berubah dan dipengaruhi oleh situasi perkembangan kondisi daerah.
2. Konflik sosial berkaitan erat dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini. Fenomena sosial di masyarakat yang mudah diakses melalui media sosial berpotensi untuk mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melakukan hal serupa yang bisa berpotensi melahirkan potensi konflik sosial.

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat akan menimbulkan terwujudnya suatu kepatuhan masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga akan dapat memberi dampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Pelanggaran Peraturan dapat menjadi salah satu indikator ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun jenis pelanggaran perda pada tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.33
Rincian Jumlah Pelanggaran Perda di Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023

No	Jenis Pelanggaran Perda	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Pendetang (Perda No. 2 Tahun 2011)	50	12	0	0	0
2	IMB (Perda No. 4 Tahun 1974)	3	2	0	0	0
3	Ketertiban Umum / KTU (Perda No. 2 Tahun 2014)	179	140	105	121	124
4	Kawasan tanpa Rokok/ KTR (Perda No. 1 Tahun 2014)	0	0	0	0	0
5	Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup (Perda No. 2 Tahun 2010)	0	0	0	0	0
6	Pengelolaan Sampah (Perda No. 7 Tahun 2014)	0	0	0	0	0
7	Bangunan Gedung (Perda No. 8 Tahun 2016)	0	0	0	2	0
8	Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda Nomor 1 Tahun 2013)	0	0	0	1	0
	Jumlah	232	154	105	124	124

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Klungkung, 2025

Pada tahun 2024 terdapat 124 pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Klungkung. Seluruh pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap Ketertiban Umum (Perda No. 2 Tahun 2014). Selain pelanggaran terhadap peraturan daerah, gangguan keamanan dapat menjadi indikator lain dari adanya penanganan terhadap kebebasan sipil. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu: *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis; *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran; *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah. Gangguan keamanan yang terjadi di Kabupaten Klungkung disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.34
Angka Gangguan Kamtibmas (Kasus) Per Kecamatan Tahun 2024

No	Jenis Gangguan	Kecamatan				Jumlah
		Nusa Penida	Banjarang kan	Klungkung	Dawan	
1	ORANG LINGLUNG	0	0	0	0	0
2	GEPENG	0	0	0	0	0
3	PENGAMEN	0	0	0	0	0
4	ODGJ	0	2	13	12	27
5	PPEMBUANGAN LIMBAH	3	0	1	0	0
6	PEDAGANG BERMobil	0	0	3	0	3
7	BANNER	0	2	21	0	23
8	VAMPLET	0	0	0	0	0
9	BALIHO	0	0	0	1	1
10	SPANDUK	0	0	7	0	7
11	STIKER ROKOK	0	1	7	0	7
12	BILLBOARD	0	0	0	0	0
13	PENGGalIAN	0	0	0	0	0
14	PENGgunaAN BAHU JALAN	0	1	0	0	1
15	PEDAGANG DI ATAS TROTOAR	0	1	25	0	26
16	ORANG TERLANTAR	0	0	3	0	3



No	Jenis Gangguan	Kecamatan				Jumlah
		Nusa Penida	Banjarangkan	Klungkung	Dawan	
17	KEBISINGAN SUARA	0	1	0	0	1
18	PENGUNAAN TROTOAR	0	2	2	1	5
19	MEMBANGUN SEBELUM MEMILIKI PBG	2	2	0	0	4
20	BERJUALAN MENGGUNAKAN SEPADAN JALAN	0	0	2	2	4
21	PARKIR DITEMPAT TERLARANG	0	0	7	0	7
Jumlah		5	12	91	16	124

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Klungkung, 2025

Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas peraturan daerah, sehingga angka gangguan kamtibmas merupakan bagian dari angka pelanggaran perda. Pada tahun 2023 terdapat 66 gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk di Kecamatan Nusa Penida belum dapat dilakukan pendataan karena keterbatasan penugasan personil. Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memetakan daerah rawan pelanggaran Perda dan Perkada.
2. Mensosialisasikan penegakan Perda dan Perkada.
3. Melaksanakan patroli wilayah.
4. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
5. Meningkatkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung dengan mengikuti diklat.
6. Melaksanakan kegiatan Yustisi dan Non Yustisi.
7. Membentuk Linmas di setiap desa/kelurahan dan memberikan pembinaan serta pelatihan kepada anggota Linmas.
8. Melakukan koordinasi dengan babinsa, babinkamtibmas, dan adat.
9. Melaksanakan koordinasi dengan kepala desa agar biaya operasional anggota Linmas dianggarkan melalui dana desa.
10. Memberikan simulasi dan pelatihan kepada anak usia dini dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran.
11. Membentuk relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan.
12. Membentuk Tim Satuan Reaksi Cepat.

Kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
2. Masih lemahnya penegakan Perda dan Perkada.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan bahaya kebakaran.



Partisipasi Masyarakat

Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu dijadikan dasar dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat. Pada tahun 2023 persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu adalah 0%. Hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya Pemilu, baik itu Pileg, Pilpres, Pilkada maupun Pemilihan Perbekel di tahun 2023. Namun, penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan melibatkan KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Selain itu, dilaksanakan juga pemantauan terhadap pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan pengembangan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat dengan menysasar generasi muda, dalam hal ini adalah Siswa SMA sebagai pemilih pemula. Pendidikan politik dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Penyelenggaraan pendidikan politik juga menysasar organisasi perempuan, dalam hal ini yang tergabung pada PAKIS (Paiketan Krama Istri). Penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk melahirkan kesadaran dan memberikan pengetahuan akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan politik sesuai ketentuan yang berlaku yang pada akhirnya akan melahirkan pemilih rasional. Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan lapangan bahwasanya partai politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2023 juga telah menyelenggarakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Klungkung.
2. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 kepada para Perbekel dan Bendesa Adat se-Kecamatan Klungkung dan para Perbekel serta Bendesa Adat se-Kecamatan Nusa Penida. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan menysasar para Perbekel dan Bendesa adat dimaksudkan agar menjadi sarana efektif dan efisien dalam transfer informasi dan pengetahuan kepada masyarakat yang diharapkan mampu menjadi pemilih yang rasional dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Klungkung untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat, yaitu dengan melibatkan penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat dan pelaksanaan Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
4. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan perkembangan politik di daerah dengan Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah. Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menindaklanjuti permasalahan yang muncul, memahami situasi dan kondisi di masyarakat yang berpengaruh atau berkaitan dengan politik dan upaya pengembangan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Melaksanakan verifikasi atas persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Klungkung. Minimal 50% lebih dari dana bantuan keuangan partai politik harus digunakan untuk pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.



Faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik itu dinas atau instansi terkait, KPU, Bawaslu, Partai Politik, masyarakat, dan pihak terkait lainnya sesuai tugas dan peran masing-masing.
- 2. Perkembangan teknologi informasi dan media social yang cepat dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat membawa pengaruh positif yaitu mampu memberikan rangsangan dan pengaruh untuk masyarakat agar sadar dan melek politik.

Tantangan atau permasalahan yang muncul dalam upaya meningkatkan kesadaran politik adalah sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari kelompok sasaran yang bisa dijangkau memiliki persentasenya sangat kecil disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan SDM.
- 2. Fenomena sosial politik masyarakat yang dinamis dapat dijangkau berbagai kalangan masyarakat sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Hal tersebut berdampak positif yakni dapat mempengaruhi animo masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi. Sehingga penyelenggaraan pendidikan politik kepada masyarakat perlu dilakukan dengan lebih intensif.

Pada tahun 2024 penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yaitu :

- 1. Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung adalah sebagai leading sektor pelaksanaan kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*)

Kebebasan lembaga demokrasi merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Demokrasi Daerah. Untuk melihat capaian kinerja pada kebebasan lembaga demokrasi ini diantaranya dapat dilihat dari gambar di bawah ini :



Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2025
Gambar 2.26 Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Berdasarkan Umur dan Gender

Anggota DPRD Kabupaten Klungkung berjumlah 30 orang dengan 27 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Apabila dilihat dari umur, maka tidak terdapat anggota DPRD pada rentang umur 26-30 tahun. Namun terdapat 2 orang anggota DPRD dengan umur 31-35 tahun, 1 orang anggota



DPRD dengan umur 41-45 tahun, 5 orang anggota DPRD dengan umur 46-50 tahun, 2 orang anggota DPRD dengan umur 51-55 tahun, 7 orang anggota DPRD dengan umur 56-60 tahun, dan 7 orang anggota DPRD dengan umur 61-65 tahun. Hal tersebut dapat menunjukkan kinerja kaderisasi di partai politik peserta pemilu. Kaderisasi merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi dalam penghitungan Indeks Demokrasi Daerah. Selain kaderisasi, peran serta perempuan juga merupakan salah satu komponen penilaian kinerja lembaga demokrasi. Untuk melihat kinerja lembaga demokrasi dapat dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dikeluarkan. Dibawah ini diuraikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Klungkung Tahun 2024:

Tabel 2.35
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kab. Klungkung Tahun 2024

NO	TANGGAL	NOMOR SK	TENTANG
1	04 Januari 2024	1 Tahun 2024	Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024
2	22 Januari 2024	2 Tahun 2024	Penetapan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024
3	25 Maret 2024	3 Tahun 2024	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
4	25 Maret 2024	4 Tahun 2024	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2024-2025
5	02 April 2024	5 Tahun 2024	Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Klungkung Tahun Anggaran 2023
6	22 April 2024	6 Tahun 2024	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
7	10 Juni 2024	7 Tahun 2024	Rekomendasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023
8	25 Juni 2024	8 Tahun 2024	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 Untuk Dievaluasi Oleh Gubernur Bali
9	08 Agustus 2024	9 Tahun 2024	Persetujuan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Kua) Tahun Anggaran 2025
10	08 Agustus 2024	10 Tahun 2024	Persetujuan Penetapan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025
11	08 Agustus 2024	11 Tahun 2024	Persetujuan Penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2024
12	08 Agustus 2024	12 Tahun 2024	Persetujuan Penetapan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2024



NO	TANGGAL	NOMOR SK	TENTANG
13	08 Agustus 2024	13 Tahun 2024	Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045
14	08 Agustus 2024	14 Tahun 2024	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024
15	30 Agustus 2024	15 Tahun 2024	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Klungkung Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sesuai Evaluasi Dari Gubernur Bali Untuk Ditetapkan Sebagai Peraturan Daerah
16	13 September 2024	16 Tahun 2024	Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Jabatan Tahun 2024-2029
17	13 September 2024	17 Tahun 2024	Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung
18	20 September 2024	18 Tahun 2024	Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Masa Jabatan Tahun 2024-2029
19	20 September 2024	19 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung
20	30 September 2024	20 Tahun 2024	Pembentukan Alat Kelengkapan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung
21	30 September 2024	21 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024
22	30 September 2024	22 Tahun 2024	Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025



NO	TANGGAL	NOMOR SK	TENTANG
23	01 Oktober 2024	23 Tahun 2024	Persetujuan Penetapan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Bupati Klungkung Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Sesuai Evaluasi Dari Gubernur Bali Untuk Ditetapkan Sebagai Peraturan Daerah
24	11 November 2024	24 Tahun 2024	Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung
25	11 November 2024	25 Tahun 2024	Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung
26	19 November 2024	26 Tahun 2024	Penetapan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024
27	29 November 2024	27 Tahun 2024	Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerahtentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025untuk Dikirim Ke Gubernur Bali Guna Memperoleh Evaluasi
28	02 Desember 2024	28 Tahun 2024	Persetujuan Penetapan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 Sesuai Evaluasi Dari Gubernur Bali Untuk Ditetapkan Sebagai Peraturan Daerah
29	27 Desember 2024	29 Tahun 2024	Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025
30	30 Desember 2024	30 Tahun 2024	Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024
31	31 Desember 2024	31 Tahun 2024	Persetujuan Penetapan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Klungkung Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Sesuai Evaluasi Dari Gubernur Bali Untuk Ditetapkan Sebagai Peraturan Daerah

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2024 terdapat 31 persetujuan serta keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan.



Dalam melaksanakan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Klungkung senantiasa dituntut untuk melaksanakan pelayanan dengan efektif dan efisien. Untuk mengukur tingkat efisiensi pencapaian sasaran, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi. Analisis efisiensi difokuskan pada indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur dari kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/atau lebih besar, atau persentase capaian *output* sama tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Dibawah ini disajikan analisis tingkat efisiensi sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap sebagai berikut :

Tabel 2.36
Tingkat Efisiensi
Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik Tahun 2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)=(6)/(7)	(9)=((5)-(8))/(8)	(10): >=0 Efisien
Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung	80,09	97,27	5,9	82,5	100	4	0,48	Efisien

Sumber : data diolah, 2025

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, tingkat efisiensi sasaran Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik adalah sebesar 0,48 dimana indeks efisiensi lebih tinggi dari standar efisiensi. Pada tahun 2024 sasaran Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik dicapai dengan efisien. Sasaran Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik didukung dengan program pendukung sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.37
Efisiensi Anggaran
Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap Tahun 2024

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	23.217.000	767.500,00	22.449.500	3,31
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.853.321.520	1.586.746.021,00	266.575.499	85,62
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.159.976.440	1.123.236.790,00	36.739.650	96,83
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	14.829.557.820	14.325.424.211,00	504.133.609	96,60



Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	29.135.713.285	28.917.050.205,00	218.663.080	99,25
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.034.489.725	2.716.804.932,00	317.684.793	89,53
Jumlah	50.036.275.790	48.670.029.659	1.366.246.131	97,27

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Klungkung, 2025

Pada tahun 2024, Sasaran Terciptanya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Stabilitas Politik yang Mantap didukung dengan 6 program pendukung dengan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 50.036.275.790 dan terealisasi sebesar Rp. 48.670.029.659 atau terealisasi sebesar 97,27 persen. Sasaran ini didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

DOKUMENTASI PENCAPAIAN SASARAN



kegiatan penegakan Perda yang dilakukan pada tahun 2024



Pelaksanaan Sosialisasi
Pilkada kepada Generasi
Muda



Pemantauan pengiriman
logistik Pemilu 2024



Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Klungkung





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sesuai Pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan yang bersifat mutlak/absolut meliputi:

1. Politik Luar Negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
6. Agama.

Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal tugas pembantuan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagai urusan yang menjadi kewenangan provinsi. Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program tugas pembantuan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan program kegiatan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD).

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2024 **tidak melaksanakan** Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Klungkung **tidak melaksanakan** tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.



BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM



maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada daerah kabupaten dan kota namun juga pada daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di daerah provinsi juga tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

4.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Dan beberapa jenis pelayanan minimal yang harus disediakan khususnya oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah di atur pada bab II pasal 5 dalam peraturan tersebut terdiri dari: Pelayanan Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Sejalan dengan peraturan tersebut maka Dinas Pendidikan selaku salah satu organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun 2024 telah berusaha dalam memenuhi ke tiga jenis pelayanan dasar pendidikan diatas yang memang menjadi tanggung jawab penuh Dinas Pendidikan bersama dengan pemerintah Kabupaten Klungkung. adapun fokus penerima daripada ke tiga jenis layanan dasar tersebut diataranya: Pelayanan pendidikan anak usia dini merupakan suatu pelayanan difokuskan untuk penduduk yang berada pada rentang usia 5 sampai dengan 6 tahun, pelayanan pendidikan dasar untuk penduduk yang berada pada rentang usia 13 sampai dengan 15 tahun dan pelayanan pendidikan kesetaraan memfokuskan pada pelayanan pendidikan untuk penduduk pada rentang usia 7 sampai dengan 18 tahun.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung telah menyiapkan beberapa indikator yang disertai dengan target kinerja daripada masing-



masing jenis layanan dasar tersebut. Dimana diharapkan nantinya capaian kinerja ini dapat dipakai sebagai patokan dan bahan evaluasi untuk peningkatan penyediaan layanan dasar khususnya dalam bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung.

Dengan tersusunnya Laporan standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

- Sebagai acuan dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan,
- Sebagai acuan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kab.Klungkung,

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan dan pelaksanaan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diatas diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan :

1. Jenis Pelayanan Dasar
2. Mutu Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar bidang pendidikan sebagaimana dimaksud diatas untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b) Pelayanan Pendidikan Dasar
- c) Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud diatas diatur sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan,
- c) tata cara pemenuhan standar



4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan anak usia dini dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2024, target penerima layanan serta mutu layanan pendidikan anak usia dini tercantum seperti di bawah ini:

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total
		Yang Harus Dilayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		6457
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
1 . Angka partisipasi sekolah	orang	5156
2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	PAUD	124
3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	orang	374
4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	orang	6
5 . Kecukupan formasi guru ASN	orang	128
6 . Indeks distribusi guru	nilai	0.23
7 . Proporsi PTK bersertifikat	orang	374
8 . Proporsi PTK penggerak	orang	8
9 . Pengalaman pelatihan guru	%	25

b. Pelayanan Pendidikan Dasar

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan dasar dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2024, target penerima layanan serta mutu layanan pendidikan dasar tercantum seperti di bawah ini :



PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total
		Yang Harus Dilayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	25942
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
SD		
1 . Angka partisipasi kasar	Orang	16720
2 . Angka partisipasi sekolah	Orang	16720
3 . Angka partisipasi murni	Orang	16720
4 . Kemampuan literasi	Nilai	61.82
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	45.74
6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2.54
7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1.02
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.37
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	56.83
10 . Kecukupan formasi guru ASN	Orang	141
11 . Indeks distribusi guru	%	0.71
12 . Proporsi PTK bersertifikat	Orang	1136
13 . Proporsi PTK penggerak	Orang	73
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	25
SMP		
1 . Angka partisipasi kasar	Orang	9222
2 . Angka partisipasi sekolah	Orang	9222
3 . Angka partisipasi murni	Orang	9222
4 . Kemampuan literasi	Nilai	73.77
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	69.74
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.84
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.92
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.88
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	55
10 . Kecukupan formasi guru ASN	Orang	104
11 . Indeks distribusi guru	%	0.72
12 . Proporsi PTK bersertifikat	Orang	574
13 . Proporsi PTK penggerak	Orang	50
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	25

- c. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan
- Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah serta tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan



data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024, target penerima layanan serta mutu layanan pendidikan kesetaraan tercantum seperti di bawah ini:

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total
		Yang Harus Dilayani
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		118
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
1. Angka partisipasi kasar	%	118
2. Angka partisipasi sekolah	%	118
3. Angka partisipasi murni	%	118
4. Kemampuan literasi	Nilai	66.67
5. Kemampuan numerasi	Nilai	33.33
6. Perbedaan skor literasi	Nilai	51.41
7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	5.44
8. Indeks iklim keamanan	Nilai	65.71
9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	63.85
10. Kecukupan formasi guru ASN	%	2
11. Indeks distribusi guru	%	0.55
12. Proporsi PTK bersertifikat	%	1
13. Proporsi PTK penggerak	%	1
14. Pengalaman pelatihan guru	%	10

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi pencapaian SPM tahun 2024 diuraikan seperti dibawah ini:

a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan anak usia dini dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2024, realisasi penerima layanan serta mutu layanan pendidikan anak usia dini tercantum seperti di bawah ini:



PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	% Capaian
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	71.25 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		6457	5156	1301	79,85 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.55 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	87.77 %
1 . Angka partisipasi sekolah	%	6457	5156	1301	79,85 %
2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	124	100	24	80.65 %
3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	374	271	103	72.45 %
4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	6	6	0	100.00 %
5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	128	128	0	100.00 %
6 . Indeks distribusi guru	%	0.23	0.23	0	100.00 %
7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	374	170	204	45.45 %
8 . Proporsi PTK penggerak	%	0.55	0.55	0	100.00 %
9 . Pengalaman pelatihan guru	%	25	25	0	100.00 %

b. Pelayanan Pendidikan Dasar

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan dasar dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2024, realisasi penerima layanan serta mutu layanan pendidikan dasar tercantum seperti di bawah ini:



PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	Capaian %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	78.98 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		25942	25175	766	97.04 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.52 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	97.60 %
SD					
1 . Angka partisipasi kasar	%	16720	17142	-422	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	16720	16933	-213	99.66 %
3 . Angka partisipasi murni	%	16720	15443	1287	100.00 %
4 . Kemampuan literasi	Nilai	61.82	62.4	0	100.00 %
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	45.74	47.07	0	100.00 %
6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	2.54	2.54	0	100.00 %
7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	1.02	1.02	0	100.00 %
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.37	72.37	0	100.00 %
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	56.83	56.83	0	100.00 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	141	141	0	100.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0.71	0.71	0	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1136	712	424	62.67 %
13 . Proporsi PTK penggerak	%	73	73	0	100.00 %
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	25	25	0	100.00 %
SMP					
1 . Angka partisipasi kasar	%	9222	8791	431	95.32 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	9222	7604	1618	82.45 %
3 . Angka partisipasi murni	%	9222	7182	2040	77.87 %
4 . Kemampuan literasi	Nilai	73.77	74.82	0	100.00 %
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	69.74	64.76	0	92.85 %
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.84	3.84	0	100.00 %
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.92	0.92	0	100.00 %
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.88	70.88	0	100.00 %
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	%	55	55	0	100.00 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	104	104	0	100.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0.72	0.72	0	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	574	362	212	63.06 %
13 . Proporsi PTK penggerak	%	50	50	0	100.00 %
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	25	25	0	100.00 %



C. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Jumlah yang harus dilayani pada jenis pelayanan pendidikan kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah serta tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Klungkung minimal selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024, realisasi penerima layanan serta mutu layanan pendidikan kesetaraan tercantum seperti di bawah ini:

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Satuan	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	Capaian %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		118	118	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	118	118	0	100.00 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	118	118	0	100.00 %
3 . Angka partisipasi murni	%	118	118	0	100.00 %
4 . Kemampuan literasi	Nilai	66.67	66.67	0	100.00 %
5 . Kemampuan numerasi	Nilai	33.33	33.33	0	100.00 %
6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	51.41	51.41	0	100.00 %
7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	5.44	5.44	0	100.00 %
8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	65.71	65.71	0	100.00 %
9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusi	Nilai	63.85	63.85	0	100.00 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	2	2	0	100.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0.55	0.55	0	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	1	1	0	100.00 %
13 . Proporsi PTK penggerak	%	1	1	0	100.00 %
14 . Pengalaman pelatihan guru	%	10	10	0	100.00 %



4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk menunjang pencapaian SPM terdiri dari belanja pegawai yang digunakan untuk pemenuhan gaji dan tunjangan bagi para guru yang mengajar di satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain belanja pegawai juga dialokasikan belanja barang jasa serta belanja modal untuk pelaksanaan kegiatan belajar dan meng

ajar di sekolah, dengan rincian sub kegiatan penunjang seperti Tabel di bawah ini :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	283.027.880.103,00	274.390.012.628,32	96,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	283.027.880.103,00	274.390.012.628,32	96,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.381.980.621,00	217.698.315.681,00	97,02
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.238.220,00	52.325.184,00	86,86
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.195.900,00	16.078.320,00	88,36
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.042.320,00	36.246.864,00	86,22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	221.660.114.826,00	215.357.738.509,00	97,16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	221.622.386.226,00	215.320.104.709,00	97,16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.728.600,00	37.633.800,00	99,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.802.124.224,00	1.651.992.921,00	91,67
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.802.124.224,00	1.651.992.921,00	91,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.244.268,00	147.562.068,00	83,73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.318.768,00	138.254.568,00	83,13
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.390.600,00	3.107.500,00	91,65
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.034.900,00	2.700.000,00	88,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.091.168,00	375.130.899,00	77,49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.461.000,00	155.029.731,00	80,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.630.168,00	220.101.168,00	75,21



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.167.915,00	113.566.100,00	57,02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.227.915,00	83.966.100,00	56,65
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.940.000,00	29.600.000,00	95,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.561.389.242,00	56.608.121.947,32	96,66
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.852.767.020,00	27.120.237.050,00	97,37
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	298.026.200,00	256.082.000,00	85,93
Pengadaan Mebel Sekolah	512.837.100,00	484.205.000,00	94,42
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	426.308.800,00	415.447.800,00	97,45
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	428.410.069,00	390.478.000,00	91,15
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.375.700,00	463.577.164,00	99,19
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.132.180.591,00	4.127.618.471,00	99,89
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.542.880,00	4.022.420,00	38,15
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	38.424.580,00	32.077.000,00	83,48
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.357.050.000,00	17.357.050.000,00	100
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	581.033.300,00	581.033.300,00	100
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3.008.700,00	2.990.000,00	99,38
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.583.100,00	1.260.000,00	14,68
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.098.700,00	1.985.000,00	64,06
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.999.800,00	10.569.750,00	96,09
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	30.000.000,00	29.822.500,00	99,41
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	81.700.000,00	0	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	358.437.822,00	358.437.822,00	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	267.000.000,00	267.000.000,00	100
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang	5.978.700,00	0	0



Pendidikan				
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	19.014.380,00	3.116.500,00	16,39	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.812.756.598,00	2.333.464.323,00	82,96	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.382.143.569,00	18.067.737.254,00	98,29	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	485.681.850,00	460.419.000,00	94,8	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	84.800.000,00	84.093.557,00	99,17	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	419.650.000,00	419.650.000,00	100	
Pembangunan Laboratorium	780.070.200,00	780.070.200,00	100	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	413.462.400,00	413.462.400,00	100	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	128.000.000,00	0	0	
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	949.006.050,00	949.006.050,00	100	
Pengadaan Mebel Sekolah	243.882.892,00	228.405.000,00	93,65	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	174.788.000,00	168.600.000,00	96,46	
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	28.100.000,00	0	0	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	607.374.823,00	552.317.500,00	90,94	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.889.261.874,00	2.882.480.717,00	99,77	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.797.000,00	2.269.080,00	9,95	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.806.920.000,00	10.806.920.000,00	100	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	13.588.700,00	465.000,00	3,42	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.025.580,00	3.219.000,00	64,05	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.998.700,00	1.875.000,00	31,26	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.926.800,00	9.284.750,00	93,53	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	8.608.700,00	0	0	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	305.200.000,00	305.200.000,00	100	
Pengelolaan Pendidikan Anak	11.435.799.793,00	10.691.375.816,50	93,49	



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Usia Dini (PAUD)				
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	557.132.909,00	455.074.284,50	81,68	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	212.000.000,00	211.220.876,00	99,63	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	261.069.740,00	243.069.740,00	93,11	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	385.000.000,00	381.860.000,00	99,18	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.655.244.753,00	3.461.906.524,00	94,71	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	906.818.451,00	873.328.092,00	96,31	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.346.300,00	1.281.340,00	23,97	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.897.480.700,00	1.670.314.300,00	88,03	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.174.840.000,00	3.174.840.000,00	100	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.503.700,00	6.351.000,00	97,65	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	12.048.700,00	10.980.000,00	91,13	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.999.840,00	9.351.000,00	93,51	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	291.500.000,00	136.404.660,00	46,79	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	12.814.700,00	12.674.000,00	98,9	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	48.000.000,00	42.720.000,00	89	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	890.678.860,00	728.771.826,82	81,82	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	106.000.000,00	20.500.000,00	19,34	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.094.480,00	0	0	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	40.209.000,00	24.330.000,00	60,51	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	348.060.000,00	348.060.000,00	100	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.718.300,00	1.718.300,00	100	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.432.920,00	0	0	
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	19.080.000,00	3.157.000,00	16,55	
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	212.000.000,00	211.551.026,82	99,79	
Bimbingan Teknis, Pelatihan,	7.775.200,00	947.500,00	12,19	



dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	153.308.960,00	118.508.000,00	77,3	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	77.273.840,00	77.125.500,00	99,81	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.348.320,00	5.347.500,00	99,98	
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.348.320,00	5.347.500,00	99,98	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	71.925.520,00	71.778.000,00	99,79	
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	71.925.520,00	71.778.000,00	99,79	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.236.400,00	6.449.500,00	89,13	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.236.400,00	6.449.500,00	89,13	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.518.700,00	2.934.500,00	83,4	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.717.700,00	3.515.000,00	94,55	

Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik dilakukan melalui beberapa sumber dana antara lain:

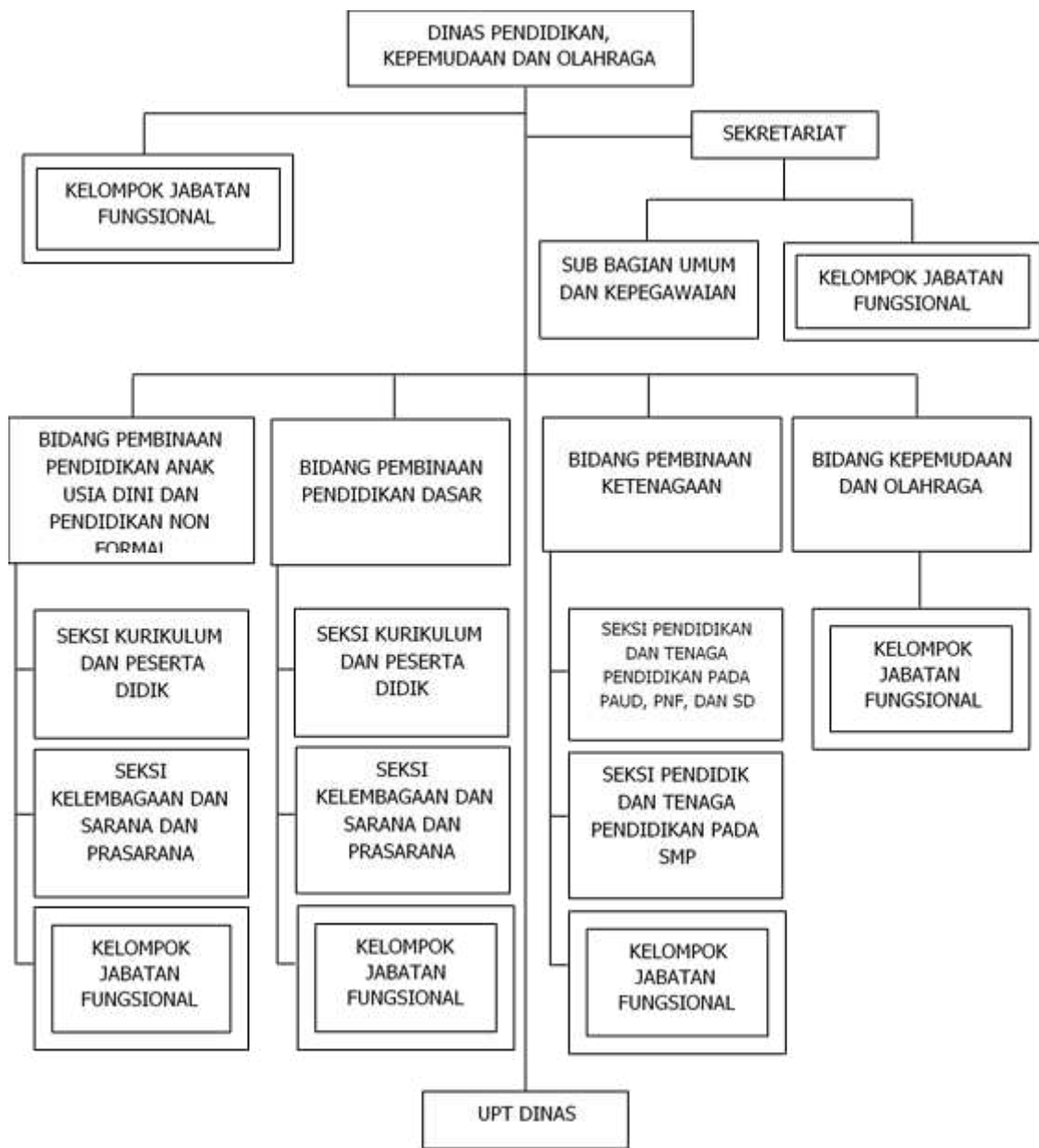
1. Untuk jenjang PAUD penyediaan perlengkapan dasar berupa buku gambar dan alat mewarnai dialokasikan dari dana Bantuan Operasioal Pendidikan (BOP) PAUD.
2. Untuk jenjang SD dan SMP penyediaan perlengkapan dasar berupa buku teks pelajaran dialokasikan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP. Untuk perlengkapan belajar berupa buku dan alat tulis hanya diberikan kepada siswa miskin dalam bentuk beasiswa.
3. Untuk jenjang Pendidikan Kesetaraan penyediaan perlengkapan dasar berupa modul belajar dan perlengkapan belajar dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Pedidikan (BOP) Kesetaraan



4.1.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang terbagi dalam beberapa eselon jabatan dan keahlian. Untuk melihat lebih rinci tentang sumber daya tersebut berikut disajikan struktur organisasi serta tabel sumber daya manusia pelaksana standar pelayanan minimal bidang pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung :

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga





Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

JABATAN	ESELON	JUMLAH PERSONIL
Kepala Dinas (KADIS)	II/b	1 orang
Sekretaris (SEKDIS)	III/a	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF	III/b	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Pendidikan Dasar (PPD)	III/b	1 orang
Ka.Bid Kepemudaan dan Olahraga	III/b	1 orang
Ka.Si Kurikulum dan Peserta Didik Bid. PPD	IV/a	1 orang
Ka.Sub.Bag Umum dan Kepegawaian (SEKDIS)	IV/a	1 orang
Ka.Si Kelembagaan, Sarana dan Prasarana	IV/a	1 orang
Ka.Bid Pembinaan Ketenagaan	III/b	1 orang
Ka.Si PTK PAUD,PNF,& SD	IV/a	1 orang
Ka.Si Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	IV/a	1 orang
Ka.Si Kurikulum dan Peserta Didik (PAUD&PNF)	IV/a	1 orang
Ka.Si Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bid.PPD	IV/a	1 orang
JF Pengawas Sekolah Utama	JFT	2 orang
JF Pengawas Sekolah Muda	JFT	14 orang
JF Perencana Muda (Sub Koordinator)	JFT	1 orang
JF Widyaprada Muda (Sub Koordinator)	JFT	2 orang
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	JFT	1 orang
JF Analis Kebijakan Muda (Sub Koordinator)	JFT	2 orang
JF Penilik	JFT	2 orang
Analis Kepemudaan	JFU	1 orang
Analis Pengembangan Karir PTK	JFU	2 orang
Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana	JFU	2 orang
Analis Pengembangan SarPras pembelajaran	JFU	1 orang
Analis Penyelenggaraan Ujian	JFU	1 orang
Bendahara	JFU	1 orang
Pembina Karakter	JFU	2 orang
Pengadministrasi Keuangan	JFU	1 orang
Pengadministrasi Umum	JFU	1 orang
Pengelola Data Tenaga Kependidikan (SMP)	JFU	1 orang
Pengelola Kepegawaian	JFU	3 orang
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	JFU	2 orang
Pranata Taman	JFU	4 orang
Verifikator Keuangan	JFU	2 orang
Staf Pembantu	Tenaga Honorer Daerah	76 orang

Untuk melaksanakan layanan urusan pendidikan kepala dinas dibantu oleh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang bertempat pada satuan pendidikan negeri sebagai unit pelaksana



teknis daerah serta lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (lembaga swasta) dengan rincian jumlah dan kuaifikasi pendidikan sebagai berikut :

Data Guru dan Kepala Sekolah PAUD

KECAMATAN	Status Kepegawaian										KEPALA SEKOLAH	
	GTY		Honor Daerah		Honor Sekolah		PNS		PPPk			JML GURU
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
BANJARANGKAN	0	44	0	10	0	0	1	15	1	23	94	34
DAWAN	0	14	0	11	0	0	0	4	0	37	66	18
KLUNGKUNG	3	39	3	23	1	1	0	14	3	44	131	40
NUSA PENIDA	0	24	4	18	1	1	2	11	1	6	68	32
JUMLAH	3	121	7	62	2	2	3	44	5	110	359	124

Data Guru dan Kepala Sekolah SD

KECAMATAN	Status Kepegawaian										KEPALA SEKOLAH	
	GTY		Honor Daerah		Honor Sekolah		PNS		PPPk			JML GURU
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
BANJARANGKAN	0	0	2	3	6	16	57	78	28	56	246	31
DAWAN	0	0	0	0	4	10	39	59	15	40	167	23
KLUNGKUNG	0	0	2	2	7	28	55	99	30	69	292	26
NUSA PENIDA	0	0	3	8	8	20	196	93	51	52	431	53
JUMLAH	0	0	7	13	25	74	347	329	124	217	1136	133

Guru dan Kepala Sekolah SMP

KECAMATAN	Status Kepegawaian										KEPALA SEKOLAH	
	GTY		Honor Daerah		Honor Sekolah		PNS		PPPk			JML GURU
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
BANJARANGKAN	0	0	0	1	7	5	37	45	9	22	126	5
DAWAN	0	0	0	2	2	4	28	39	9	11	95	3
KLUNGKUNG	0	0	0	1	3	7	48	57	17	39	172	4
NUSA PENIDA	0	0	3	2	12	5	72	40	23	24	181	10
JUMLAH	0	0	3	6	24	21	185	181	58	96	574	22

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi baik karena faktor eksternal dan faktor internal beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :



1. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD yang berdampak pada kesiapan anak didik bersekolah ke jenjang SD. Hal ini terjadi karena tingkat partisipasi orang tua/masyarakat untuk mengikutsertakan anaknya ke PAUD masih rendah. Pendidikan anak usia dini dipandang sebagai tingkat pendidikan yang kurang penting dan masih berbiaya tinggi.
2. Selain hal tersebut diatas masih rendahnya proporsi jumlah satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi B. Belum tersedianya sumber daya serta sarana prasarana pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional menjadi faktor internal bagi pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak.
3. Mutu kinerja dan kompetensi pendidik di satuan PAUD kurang baik, karena proporsi pendidik dengan kualifikasi minimal S1/D4 relatif rendah. Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / DIV yang baru mencapai 72,45%.
4. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal Angka partisipasi sekolah pada masyarakat kelompok umur 7-15 tahun masih perlu ditingkatkan.
5. Program dan kebijakan sekolah belum berorientasi pada mutu pembelajaran Nilai komposit guru dan kepala sekolah terhadap pengelolaan pengembangan kurikulum sekolah dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik masih rendah .

Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa kebijakan strategis dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Interaksi terencana antara orang tua dan lembaga PAUD untuk membangun kesinambungan stimulasi dari lembaga PAUD sehingga orang tua memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendidikan di usia dini. Dengan dilaksanakannya interksi ini diharapkan terjadi penguatan peran dan kapasitas orang tua sebagai mitra pengajar dan sumber belajar bagi anak usia dini.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah serta meningkatkan ketersediaan guru sesuai kualifikasi yang sesuai. Langkah yang dilakukan antara lain meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran dengan cara meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan serta menyediakan sarana dan prasarana esensial yang mendukung proses belajar pada satuan PAUD tersedia secara merata.
3. Mendorong peningkatan kualifikasi tenaga pendidik/guru PAUD yang berkualitas dan sesuai kompetensi langkah yang dilakukan antara lain fasilitasi kerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi guru PAUD.
4. Mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke pendidikan formal/non formal dengan cara meningkatkan jangkauan layanan pendidikan SD dan SMP yang



berkualitas kepada anak usia 7-15 tahun serta meningkatkan jangkauan layanan pendidikan kesetaraan bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-18 tahun.

5. Mendorong sekolah untuk menerapkan kurikulum yang adaptif dengan cara mendorong sekolah agar menerapkan program dan kebijakan yang berorientasi pada mutu pembelajaran yang meliputi : visi misi berorientasi belajar, manajemen kurikulum, serta pemanfaatan sumber daya yang tepat.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1 Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dikatakan bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan maka pada SPM ini pencapaian target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014, maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai / tidaknya indikator-indikator ini. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

Manfaat penyusunan laporan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2024 Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung:

1. Sebagai acuan dalam mengevaluasi Pembangunan Daerah di Bidang Kesehatan;
2. Sebagai acuan dalam mengevaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kab.Klungkung;
3. Sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis.

4.2.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Penerapan dan Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sebagai berikut :



1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Anak Balita
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hiperten
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10. Pelayanan Kesehatan Dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolusis
12. Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV

4.2.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.2
Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100
3	Pelayanan	3 Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	2	3	4
	Kesehatan Bayi Baru Lahir	yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar.	
4	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	4 Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	6 Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7 Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8 Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	9 Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
10	Pelayanan Kesehatan Dengan Gangguan Jiwa Berat	10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang	11 Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai	100



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Target (%)
1	2	3	4
	Terduga Tuberkolusis	standar	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV	12 Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100

4.2.1.3. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama tahun 2024 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan Sesuai dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 76/40/HK/2024 tentang Jumlah Sasaran dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024. Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 4.2.3
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	2562	2342	91,41
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai	100	2562	2327	90,83



Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
	standar di fasilitas pelayanan kesehatan				
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3 Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar.	100	2440	2440	100
Pelayanan Kesehatan Balita	4 Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	11782	11782	100
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	26226	26226	100



Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	6 Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100	110655	99612	90,02
Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	7 Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100	34000	34000	100
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8 Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100	42278	33188	78,50
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	9 Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang	100	4538	4538	100



Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Penyebut	Pembilang	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	10 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	548	548	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	11 Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	100	1172	1172	100
Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi Virus HIV	12 Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	2934	2934	100
Jumlah					95,9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2024 ada 4 Jenis Layanan Pelayanan dasar yang belum mencapai 100 % sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil capaiannya sebesar 91,41 % karena sasaran ibu hamil lebih besar dari pada jumlah ibu hamil riil karena penetapan sasaran menggunakan sasaran estimasi (pusdatin), selain itu juga disebabkan adanya kasus abortus sebesar 72 kasus (2,9 %) dan mobilitas ibu hamil ke luar wilayah kab.Klungkung serta pencatatan dan pelaporan yang belum optimal.



2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin capaiannya sebesar 90,83 % karena sasaran ibu bersalin lebih besar daripada jumlah ibu bersalin riil karena penetapan sasaran menggunakan sasaran estimasi (pusdatin), dari 2562 ibu bersalin (sasaran estimasi) ada 2327 ibu bersalin riil dan 99,96 % persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif capaiannya sebesar 90,02 % karena mobilitas penduduk usia produktif tinggi banyak masyarakat dengan usia produktif bekerja dan menetap di luar daerah sehingga susah untuk melakukan skrining dan saat di laksanakan Posbindu masyarakat yang hadir dominan orang yang sama setiap bulannya.
4. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi capaiannya sebesar 78,50 % karena Perhitungan sasaran menggunakan prevalensi riskesdas th 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan sedangkan Definisi operasional penderita hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar salah satunya mendapatkan farmakologi yang secara otomatis yang di laporkan adalah kasus berdasarkan diagnosa dokter, sehingga terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara sasaran dan kasus yang di laporkan.

4.2.1.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2024 dalam menunjang kegiatan dalam bidang kesehatan khususnya dalam pencapaian SPM di Kabupaten Klungkung bersumber dari Dana APBD dan DAK Non Fisik Sebesar Rp. 4,502,642,934,- dengan realisasinya sebesar Rp. 3,888,853,992,- (86,37%). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2.4

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	922,033,925	593,799,310	64.40 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	103,721,920	101,360,000	97.72 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	204,591,889	110,240,250	53.88 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	417,991,120	343,363,400	82.15 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	205,127,420	191,550,000	93.38 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Produktif	576,540,800	549,873,500	95.37 %



7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	117,796,200	107,183,150	90.99 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	83,032,168	73,895,000	89.00 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabet Melitus	450,072,458	429,524,500	95.43 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODG) Berat	56,469,209	54,373,000	96.29 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	807,830,644	807,830,600	100.00 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus (HIV)	557,435,181	525,861,282	94.34 %
	TOTAL	4,502,642,934	3,888,853,992	86,37 %

4.2.1.5 Dukungan Personil

Dalam rangka pelaksanaan Penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan di dukung oleh SDM Puskesmas , RSU baik yang Pemerintah maupun Swasta dan Dinas Kesehatan terdiri dari :

- 1. Dokter Spesialis : 175 orang
- 2. Dokter Umum : 168 orang
- 3. Dokter Gigi : 43 orang
- 4. Perawat : 800 orang
- 5. Bidan : 373 orang
- 6. Kesehatan Masyarakat : 25 orang
- 7. Apoteker : 36 orang
- 8. Laboratorium : 62 orang
- 9. Gizi : 44 orang
- 10. Radiografer : 6 orang

4.2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di Kabupaten Klungkung:

- 1. Permasalahan
 - a. Masih rendahnya penemuan ibu hamil sedini mungkin
 - b. Pemantauan wilayah setempat KIA belum optimal



- c. Masih tingginya ibu hamil resti meningkatkan kejadian komplikasi kehamilan termasuk abortus dan premature
- d. Pencatatan dan pelaporan belum optimal
- e. Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular
- f. Pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi ASIK belum optimal
- g. Sasaran untuk hipertensi terlalu tinggi sebesar 28,9 % dari jumlah penduduk $\geq$ 15 tahun
- h. Masih banyak penderita hipertensi tidak melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan jika tidak ada keluhan

2. Solusi

- a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi jejaring dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
- b. Optimalisasi PWS KIA
- c. Meningkatkan skrining layak hamil pada catin dan PUS
- d. Pendampingan ke fasilitas kesehatan primer dan rujukan
- e. Menyasar instansi pemerintah maupun swasta dan kelompok – kelompok masyarakat untuk di lakukan deteksi dini.
- f. Melibatkan klinik pratama dan tempat praktek mandiri dokter untuk melakukan deteksi dini penyakit tidak menular.
- g. Mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi ASIK secara real time
- h. Melibatkan klinik pratama dan tempat praktek mandiri dokter untuk melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar.
- i. Menggunakan prevalensi SKI tahun 2023 berdasarkan diagnosa dokter sebagai perhitungan sasaran hipertensi.

4.2 .2 RSUD Kabupaten Klungkung

Berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung RSUD berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian.



RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas RSUD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD;
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
4. Penyelenggaraan penelitian, pendidikan dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

4.2.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Jenis – jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh RSUD Kabupaten Klungkung meliputi:

1. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan rawat jalan
3. Pelayanan rawat inap
4. Pelayanan bedah
5. Pelayanan persalinan dan perinatologi
6. Pelayanan intensif
7. Pelayanan radiologi
8. Pelayanan laboratorium patologi klinik
9. Pelayanan rehabilitasi medik
10. Pelayanan farmasi
11. Pelayanan gizi
12. Pelayanan transfusi darah
13. Pelayanan keluarga miskin
14. Pelayanan rekam medis
15. Pengelolaan limbah
16. Pelayanan administrasi manajemen
17. Pelayanan ambulans/kereta jenazah
18. Pelayanan pemulasaraan jenazah
19. Pelayanan laundry



- 20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
- 21. Pencegah Pengendalian Infeksi.

4.2.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Sesuai Peraturan bupati klungkung No. 80 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2012 tentangan Standar Pelayanan Minimal BLUD RSUD Kabupten klungkung, maka target pencapaian perunit layanan sebagai berikut:

Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Kabupaten Klungkung
Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
1	GAWAT DARURAT	1	Kemampuan menangani live saving	100%
		2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam
		3	Pemberi pelayanan ke rawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	100%
		4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim
		5	Waktu tanggap pelayanan dokter di UGD	≤ 5
		6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %
		7	Kematian pasien < 24 Jam	≤ 2 /1000
		9	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
		8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%
2	RAWAT JALAN	1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis
		2	Ketersediaan Pelayanan	a.Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah
		3	Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%
		4	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit
		5	Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90 %
		6	Rawat Inap TB a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %
3	RAWAT INAP	1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	100%
		2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
		3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidan d. Bedah
		4	Jam Visite Dokter Spesialis	100%
		5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %
		6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %
		7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%
		8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %
		9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %
		10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %
		11	Rawat Inap TB	
			a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	
4	BEDAH SENTRAL	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari
		2	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %
		3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%
		4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%
		5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%
		6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%
		7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %
5	PERSALINAN DAN PERINATOLOGI	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	≤ 1 %
				≤ 30 %
				≤ 0,2 %
		2	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%
		3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih
		4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
		5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%
		6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%
		7	Keluarga Berencana	
			a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih	100%
			b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%
		8	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %
6	INTENSIF	1	Rata-Rata Pasien Yang Kembali Ke Perawatan Intensif Dengan Kasus Yang Sama < 72 Jam intensif	≤ 3 %
		2	Pemberi pelayanan unit	100%
7	RADIOLOGI	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	<1 Jam
		2	Pelaksana ekspertisi	100%
		3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	<3 %
		4	Kepuasan pelanggan	> 80%
8	LAB. PATOLOGI KLINIK	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit
		2	Pelaksanaan ekspetis	100%
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%
9	REHABILITASI MEDIK	1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %
10	FARMASI	1	Waktu tunggu pelayanan	
			a. obat jadi	20 menit
			b. Racikan	45 menit
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%
		4	Penulisan resep sesuai formularium	100%
11	GIZI	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 12%
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
12	TRANSFUSI DARAH	1	Kebutuhan darah bagi setiap palayanan transfusi	100%
		2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %
13	PELAYANAN GAKIN	1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%
14	REKAM MEDIK	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%
		2	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 4 menit
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 6 menit
15	PENGELOLAAN LIMBAH	1	Baku mutu limbah cair	100%
		2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%
16	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	≥ 60%
		6	Cost recovery	≥ 40 %
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%
		8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%
17	AMBULANCE / KERETA JENAZAH	1	Waktu Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah	24 jam
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance kereta jenazah di rumah sakit	100%
18	PEMULASARAN JENAZAH	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam
19	PELAYANAN LAUNDRY	1	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%
		2	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%
20	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	1	Kecepatan Waktu Menanggapi Kerusakan Alat	≥ 80%
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%
		3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	1	Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	≥50%
		2	Ketersedianya APD di setiap instalansi/departemen	≥70%



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2023
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	100%

4.2.2.3 Realisasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan dari Bagian/Bidang/Unit terdapat 89 indikator (96,84%) yang tercapai dan masih ada 13 indikator (3,16%) yang belum tercapai. dari 89 Indikator SPM tahun 2024 Hasil capaian secara keseluruhan seperti pada tabel berikut ini

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Kabupaten Klungkung
Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	TAHUN 2024		KET.
			TERCAPAI	%	
1	UGD	8	7	99,05%	
2	RAWAT JALAN	6	5	99,25%	
3	RAWAT INAP	11	9	91,43%	
4	BEDAH SENTRAL	7	7	100,00%	
5	PERSALINAN PERINATOLOGI	8	6	87,74%	
6	PELAYANAN INTENSIF	2	1	90,46%	
7	RADIOLOGI	4	3	99,75%	
8	LAB. PATOLOGI KLINIK	4	3	93,20%	
9	REHABILITASI MEDIK	3	3	100,00%	
10	FARMASI	4	4	100,00%	
11	GIZI	3	3	100,00%	
12	TRANSFUSI DARAH	2	2	100,00%	
13	PELAYANAN GAKIN	1	1	100,00%	
14	REKAM MEDIK	4	2	96,18%	
15	PENGELOLAAN LIMBAH	2	2	100,00%	
16	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	9	9	92,12%	
17	AMBULANCE /KERETA JENAZAH	2	2	100,00%	
18	PEMULARASAN JENAZAH	1	1	100,00%	
19	PELAYANAN LAUNDRY	2	2	100,00%	
20	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	3	1	84,48%	
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	3	3	100,00%	
	JUMLAH	89	76	96,84 %	Target 100 %

Secara rinci hasil pencapaian SPM pada setiap Unit Pelayanan di RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2024 adalah seperti tertera dalam tabel berikut ini :



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2024	CAPAI AN TAHUN 2024	KETERANGAN
1	GAWAT DARURAT	1	Kemampuan menangani live saving	100%	100,00%	Tercapai
		2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam	Tercapai
		3	Pemberi pelayanan ke rawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/AL S	100%	93,23%	Tidak Tercapai
		4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	1 tim	1 tim	Tercapai
		5	Waktu tanggap pelayanan dokter di UGD	≤ 5	2,03 menit	Tercapai
		6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	84,31%	Tercapai
		7	Kematian pasien< 24 Jam	≤ 2 /1000	0,0004 permil	Tercapai
		8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100,00%	Tercapai
2	RAWAT JALAN	1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100,00%	Tercapai
		2	Ketersediaan Pelayanan	a.Klinik Anak b. Klinik Penyakit dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah	100,00%	Tercapai
		3	Buka pelayanan sesuai ketentuan	100%	100,00%	Tercapai
		4	Waktu tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 menit	22,22 Menit	Tercapai
		5	Kepuasan Pelanggan pada Rawat Jalan	≥ 90 %	94,76%	Tercapai
		6	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	100,00%	Tercapai
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	100,00%	Tercapai
3	RAWAT INAP	1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	100%	100,00%	Tercapai
		2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100,00%	Tercapai



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2024	CAPAI AN TAHUN 2024	KETERANGAN
		3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidan d. Bedah	Ada	Tercapai
		4	Jam Visite Dokter Spesialis	100%	97,06%	Tidak Tercapai
		5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	0,00%	Tercapai
					100,00%	Tercapai
		6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	0,00%	Tercapai
					100,00%	Tercapai
		7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%	100,00%	Tercapai
		8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	2,04%	Tidak Tercapai
		9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	0%	Tercapai
		10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	86,24%	Tidak Tercapai
		11	Rawat Inap TB a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	100,00%	Tercapai
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60 %	100,00%	Tercapai
4	BEDAH SENTRAL	1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1 hari	Tercapai
		2	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	0,00	Tercapai
		3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%	Tercapai
		4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100,00%	Tercapai
		5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100,00%	Tercapai
		6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100,00%	Tercapai
		7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	0,00%	Tercapai
5	PERSALINAN	1	Kejadian kematian ibu	a. Perdarah	0,02%	Tercapai



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2024	CAPAI AN TAHUN 2024	KETERANGAN
	DAN PERINATOLOGI		karena persalinan	an ≤ 1 %		
				b. Pre eklamsia ≤ 30 %	0,01%	Tercapai
				c. Sepsis ≤ 0,2 %	0,00%	Tercapai
		2	Pemberi pelayanan persalinan normal	100%	100,00%	Tercapai
		3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK yang terlatih	Tersedia	Tercapai
		4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	100%	100,00%	Tercapai
		5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%	84,72%	Tidak Tercapai
		6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	66,65%	Tidak Tercapai
		7	Keluarga Berencana			
			a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih	100%	100,00%	Tercapai
			b. Presentse peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%	100,00%	Tercapai
		8	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	90,50%	Tercapai
6	INTENSIF	1	Rata-Rata Pasien Yang Kembali Ke Perawatan Intensif Dengan Kasus Yang Sama < 72 Jam intensif	≤ 3 %	0,09%	Tercapai
		2	Pemberi pelayanan unit	100%	80,92%	Tidak Tercapai
7	RADIOLOGI	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	<1 Jam	24,75 menit	Tercapai
		2	Pelaksana ekspertisi	100%	99,00%	Tidak Tercapai
		3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	<3 %	0,5%	Tercapai
		4	Kepuasan pelanggan	> 80%	84,60%	Tercapai
8	LAB. PATOLOGI KLINIK	1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit	56 menit	Tercapai
		2	Pelaksanaan ekspetis	100%	73%	Tidak Tercapai
		3	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100,00%	Tercapai



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2024	CAPAI AN TAHUN 2024	KETERANGAN
		4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	86,67%	Tercapai
9	REHABILITASI MEDIK	1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %	22,47%	Tercapai
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100,00%	Tercapai
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	89,15%	Tercapai
10	FARMASI	1	Waktu tunggu pelayanan			
			a.obat jadi	20 menit	12,40 menit	Tercapai
			b.Racikan	45 menit	38,10 menit	Tercapai
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100,00%	Tercapai
		3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%	90,07%	Tercapai
		4	Penulisan resep sesuai formularium	100%	100,00%	Tercapai
11	GIZI	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	100%	100,00%	Tercapai
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	12%	4,00%	Tercapai
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100,00%	Tercapai
12	TRANSFUSI DARAH	1	Kebutuhan darah bagi setiap palayanan transfusi	100%	100,00%	Tercapai
		2	Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %	0,00%	Tercapai
13	PELAYANAN GAKIN	1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%	100,00%	Tercapai
14	REKAM MEDIK	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	90%	92,21%	Tercapai
		2	Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas	100%	92,53%	Tidak Tercapai
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 4 menit	0,20 menit	Tercapai
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 6 menit	0,29 menit	Tercapai



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2024	CAPAI AN TAHUN 2024	KETERANGAN
15	PENGELOLAAN LIMBAH	1	Baku mutu limbah cair	100%	100,00%	Tercapai
		2	Pengolahan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100,00%	Tercapai
16	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100,00%	Tercapai
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100,00%	Tercapai
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100,00%	Tercapai
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100,00%	Tercapai
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam/tahun	≥ 60%	100,00%	Tercapai
		6	Cost recovery	≥ 40 %	151%	Tercapai
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100,00%	Tercapai
		8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	20 menit	Tercapai
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%	100,00%	Tercapai
17	AMBULANCE / KERETA JENAZAH	1	Waktu Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah	24 jam	24 jam	Tercapai
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance kereta jenazah di rumah sakit	100%	100,00%	Tercapai
18	PEMULASARAN JENAZAH	1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	< 2 Jam	Tercapai
19	PELAYANAN LAUNDRY	1	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%	Tercapai
		2	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%	Tercapai
20	PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT	1	Kecepatan Waktu Menanggapi Kerusakan Alat	≥ 80%	99,13%	Tercapai
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	95,07%	Tidak Tercapai



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		TARGET 2024	CAPAI AN TAHUN 2024	KETERANGAN
		3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	58,36%	Tidak Tercapai
21	PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)	1	Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	≥50%	100,00%	Tercapai
		2	Ketersedianya APD di setiap instalansi/ departemen	≥70%	100,00%	Tercapai
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nasokomial/HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	100%	100,00%	Tercapai

Sumber: RSUD Kab. Klungkung, 2024

Sedangkan resume hasil capaian indikator yang tidak tercapai sesuai target adalah sebagai berikut

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pemberi pelayanan ke rawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS di Gawat Darurat tidak mecapai target 100% yaitu sebesar 93,23%. Hal ini disebabkan karena bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS sudah habis masa berlakunya sehingga menimbulkan target tidak tercapai

2. Pelayanan Rawat Inap

a. indikator Jam Visite Dokter Spesialis

Indikator ini baru mencapai 97,06% yang seharusnya memberikan pelayanan mulai pukul 08.00 sd. pk.14.00 Wita setiap hari kerja tetapi masih ada jadwal visite dokter tidak sesuai jam kerja tersebut dikarenakan masih melakukan pelayanan di Poliklinik atau sedang ada Tindakan operasi.

b. Kematian pasien > 48 jam

Tidak tercapai target sebesar <0,24% yaitu tercapai 2,32% karena RSUD Kabupaten Klungkung sebagai rumah sakit rujukan di Bali Timur dan pada umumnya pasien datang dalam kondisi buruk.

c. Kepuasan Pelanggan

Tidak tercapainya kepuasan pelanggan di Rawat Inap, yang hanya mencapai 86,24% dari standar ≥90%. Data dari IKP menunjukkan nilai IKP rawat inap terendah ada pada Kualitas Sarana dan Prasarana yang hanya mencapai 83,75%.



3. Persalinan Perinatalogi

a. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr

Capaian Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr sebesar 84,72% dari target 100%, hal ini disebabkan oleh karena beberapa kasus yg tidak mampu ditangani memerlukan dokter konsultan anak sedangkan RSUD Kab Klungkung belum memiliki dokter konsultan anak sehingga beberapa kasus harus dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap baik lengkap dari SDM maupun dari alat-alatnya.

b. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

Tidak tercapai target sebesar <20% yaitu tercapai 66,65% karena RSUD Kabupaten Klungkung sebagai rumah sakit rujukan dan pada umumnya pasien datang adalah pasien hamil dengan kegawatdaruratan sehingga memerlukan penanganan dg SC.

4. Pelayanan Intensif

Capaian Pemberi pelayanan unit sebesar 80,92% karena perawat yang merawat diintensif belum semuanya mempunyai sertifikat perawat mahir ICU/setara.

5. Radiologi

Pada pelayanan radiologi indikator Pelaksana ekspertisi tidak tercapai target 100% baru tercapai sebesar 99% hal ini terjadi karena pasien rujukan praktek swasta yang datangnya sore atau malam hari selesai rontgentnya belum terbaca atau tertunda.

6. Lab. Patologi Klinik

Pada pelayanan Patologi Klinik indikator Pelaksana ekspertisi tidak tercapai target 100% baru tercapai sebesar 73% hal ini terjadi karena jumlah dr.Sp.PK belum bisa memenuhi layanan 24 jam sehingga pada luar jam kerja ekspertise hasil hanya dilakukan untuk hasil kritis. Sedangkan hasil yang dalam batas normal tidak dilakukan ekspertise.

7. Rekam Medik

a. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan. Pada indikator Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan capaian tahun 2024 sebesar 92,21% sedangkan targetnya sebesar 100% dikarenakan dokter tidak tertib melakukan pengisian rekam medis

b. Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas. Kelengkapan informed consent setelah mendapat informasi yang jelas berdasarkan rekam medik yang di survey baru tercapai 92,53% sedangkan target tahun 2024 sebesar 100% disebabkan karena dokter tidak tertib melakukan pengisian informed consnt.

8. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Dua indikator pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit yang capaiannya dibawah 100% yaitu Ketepatan waktu pemeliharaan alat sebesar 95,07 %, dan Peralatan laboratorium dan alat ukur



yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi capainnya 58,36% disebabkan karena :

1. Respon Time kurang karena adanya sdm yang mengajukan cuti kemudian order banyak sehingga repon lebih dari 15 menit.
2. Triwulan I masih proses pendataan alat Kesehatan.
3. Keterbatasan Alokasi Anggaran Biaya Kalibrasi.

4.2.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 terdiri dari beberapa sumber sebagaimana tabel dibawah ini :

Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	JASA LAYANAN (FUNGSIONAL)	APBD	APBN	TOTAL
BELANJA DAERAH	Rp 180.040.822.611	Rp 4.585.144.467		Rp 214.625.967.078
BELANJA OPERASI	Rp 176.629.630.670	Rp 33.085.144.467		Rp 189.477.689.628
BELANJA PEGAWAI	Rp 69.086.624.991	Rp 32.785.144.467		Rp 101.871.769.458
BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 107.543.005.679	Rp 300.000.000		Rp 107.843.005.679
BELANJA MODAL	Rp 3.411.191.941	Rp 1.500.000.000		Rp 7.920.127.985
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	Rp 3.411.191.941	Rp. 1.500.000.000		Rp 4.911.191.941
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	Rp -	Rp -		Rp -

Belanja rumah sakit pada Tahun 2024 sebesar Rp.165.141.000.000,- dari dana fungsional, yang berasal dari dana APBD Rp.34.585.144.467,- Sedangkan belanja rumah sakit yang menggunakan dana SILPA (Sisa Lebih Pagu Anggaran) tahun 2023 sebesar Rp 14.899.822.611,-,-

Dalam menyelenggarakan urusan kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi RSUD. Program dan kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2024 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan
pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2024

NO.			KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
P.	K.	SK.						RENCANA	REALISASI	CAPAIAN
			1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	214.625.967.078,00	208.936.678.266,00	97,35%
			1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	214.625.967.078,00	208.936.678.266,00	97,35%
1.			1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 212.825.967.078,00	Rp207.143.906.534,00	97,33%
	1.		1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 32.785.144.467,00	Rp 32.323.162.052,00	98,59%
		1.	1	2	1	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 32.785.144.467,00	Rp 32.323.162.052,00	98,59%
	2.		1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 180.040.822.611,00	Rp174.820.744.482,00	97,10%
		2.	1	2	1	2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 180.040.822.611,00	Rp174.820.744.482,00	97,10%
2.			1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 1.800.000.000,00	Rp 1.792.771.732,00	99,60%
	3.		1	2	2	2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.492.794.732,00	99,52%
		3.	1	2	2	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.492.794.732,00	99,52%
4.2.1			1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 300.000.000,00	Rp 299.977.000,00	99,99%
		4.	1	2	2	2.02	32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 300.000.000,00	Rp 299.977.000,00	99,99%



NO	JENIS TENAGA	JUMLAH TENAGA YANG ADA						
		PNS	HONOR DAERAH	KONTRAK BLUD PROFESIONAL	KONTRAK JASA NON PEGAWAI	KONTRAK PROVINSI	PELAYANAN KERJASAMA	PPPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dokter Spesialis	43	0	8	0	0	3	6
2	Dokter Sub Spesialis	1	0	1	0	0	1	0
3	Dokter Umum	16	0	16	0	1	0	0
4	Dokter Gigi	3	0	1	0	0	0	1
5	Sarjana Psikolog (S1)	0	0	1	0	0	0	0
6	Tenaga Keperawatan	198	1	62	104	0	0	14
7	Tenaga Farmasi	44	0	7	2	0	0	0
8	Tenaga Gizi	11	0	0	1	0	0	6
9	Tenaga Teknis Medis	21	0	1	2	0	0	10
10	Tenaga Analis Kesehatan	15	0	1	2	0	0	0
11	Tenaga Terapi Fisik	2	0	1	1	0	0	1
12	Sanitarian	17	0	1	0	0	0	0
13	Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	0	0	0	0	0	1
14	Manajemen	69	9	11	344	0	0	4
TOTAL		441	10	111	456	1	4	43
TOTAL KESELURUHAN PEGAWAI		1066						

- Sumber: Data Keperawatan
1. Kurangnya kebutuhan peralatan kesehatan dan penunjang layanan di rumah sakit;
 2. Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar yang berlaku;
 3. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi pada layanan dan administrasi rumah sakit yang makin dominan sehingga meningkatnya kebutuhan peralatan teknologi informasi;
 4. Pengembangan layanan yang dibutuhkan masyarakat yang makin spesialis /subspesialis, peran dokter umum/dokter gigi makin berkurang, sehingga perlu kompetensi yang lebih tinggi sesuai standar profesi tenaga kesehatan.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Pemenuhan alat kesehatan dan kedokteran yang mendesak karena kondisi tertentu harus dipenuhi kebutuhannya (*Cito*) dianggarkan melalui dana operasional pendapatan BLUD.
2. Pemenuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan, dan Pelatihan.
3. Pemenuhan sarana, prasarana dan sumber daya manusia mendukung digitalisasi layanan dan administrasi rumah sakit secara bertahap sesuai kemampuan keuangan BLUD.
4. Melakukan pengembangan layanan secara bertahap sesuai kebutuhan layanan dan kemampuan BLUD.



4.3 Urusan Pekerjaan Umum.

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 18 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya dalam pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 1) juga dijelaskan pengertian Standar pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dimana salah satu Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Adapun prinsip dalam penerapan SPM, sesuai dengan Undang-Undang tersebut diantaranya:



1. Kesesuaian Kewenangan, SPM ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota menurut pembagian Urusan Pemerintah terkait dengan Pelayanan Dasar,
2. Ketersediaan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam Rangka menjamin barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara Indonesia,
3. Keterjangkauan, SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar, mudah diperoleh oleh warga negara Indonesia,
4. Berkesinambungan, SPM memberikan memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia harus terukur, dan
5. Ketepatan Sasaran, pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara Indonesia oleh Pemerintah Daerah harus ditunjukkan pada warga Indonesia yang berhak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan strategis, juga untuk menunjukkan perkembangan penerapan SPM khususnya dalam bidang Pekerjaan Umum dan bidang Perumahan Rakyat.

1.2. Dasar Hukum

Dalam penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat;

1.3. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun



2024 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja (Renja SKPD) Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung Tahun 2024. Kebijakan Umum (KU-APBD) juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2024 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2024, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Klungkung yaitu “Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera “. Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD

1.4. Arah Kebijakan

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung 2024-2026, arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

Tujuan

Berdasarkan pada visi dan misi Kabupaten Klungkung tahun 2024–2026, maka disusun tujuan pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strategisnya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Adapun tujuan untuk mewujudkan misi ke-5 (Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup) yang akan dijalankan Dinas PUPRPKP Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

Tujuan RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir
Mengurangi ketimpangan	Terwujudnya peningkatan	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur	90,00%



Tujuan RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir
infrastruktur wilayah	pembangunan dan fungsi infrastruktur di Kabupaten Klungkung	layanan dasar	

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung (2024-2026)

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2024–2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-		
		2024	2025	2026
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi Masyarakat	Cakupan layanan air bersih (%)	90.00	95.00	95.00

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung (2024-2026)

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

- a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan
- b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.



Penyediaan air minum sehari-hari dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

Penyediaan sanitasi (pengolahan air limbah domestik) dengan indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2.Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Target SPM Penyediaan pelayanan air minum dengan indikator jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan air minum tahun 2024 adalah 90.00 %. Tahun 2024 Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

4.3.3. Realisasi

Capaian Cakupan Layanan Air Bersih yaitu jumlah penduduk yang terlayani air minum tahun 2024 sebanyak 150.502 jiwa (data jumlah Penduduk Disdukcapil Desember tahun 2024 sebanyak 222.763 Jiwa)==(67,56 %)

Indikator dan Nilai Serta Batas Waktu Pencapaian
SPM Pekerjaan Umum Secara Nasional

No	JENIS PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL			BATAS WAKTU PENCAPAIAN
			INDIKATOR		NILAI	
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun

Analisis realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pelayanan Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.



Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.

Definisi Operasional

Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Pengertian Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau,

4.3.4. Alokasi Anggaran

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

Pada tahun 2024, untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran Dana APBD sebesar Rp. 1.095.528.602,- dan realisasi sebesar Rp 963.377.431,-(87,93 %) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung :
Pagu : Rp. 1.095.528.602,-
Realisasi : Rp. 963.377.431,-

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024.



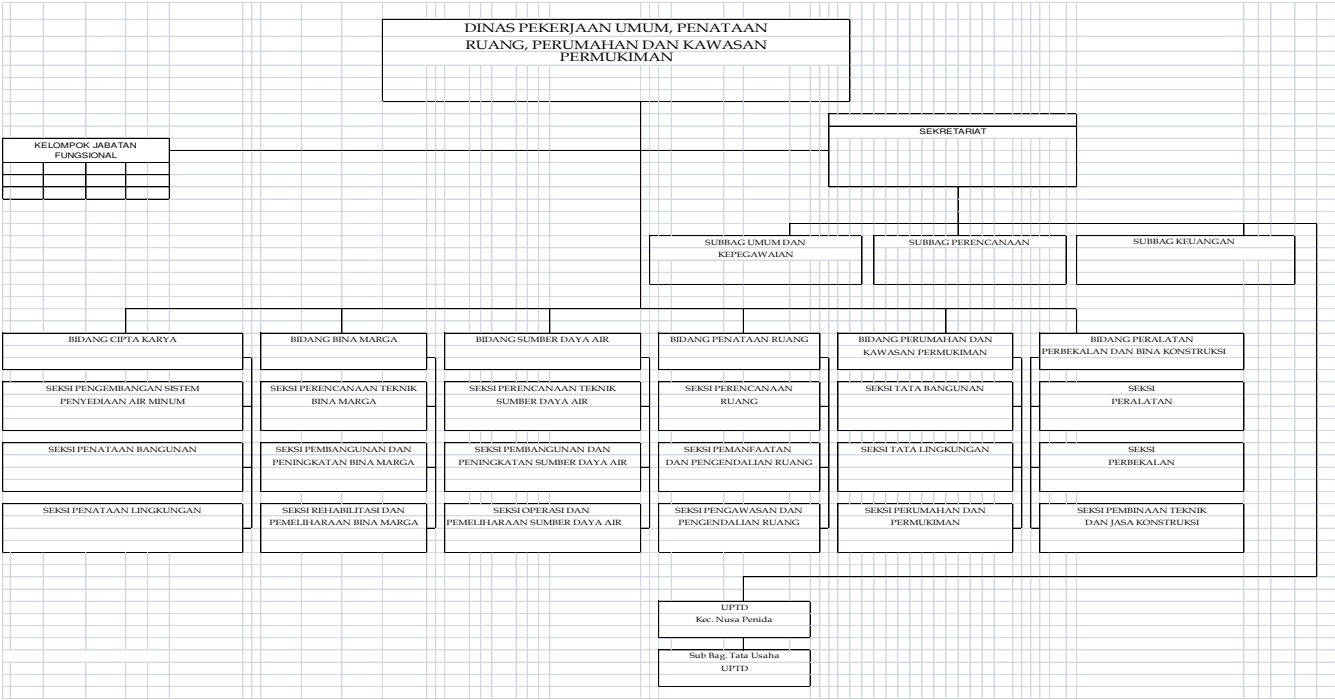
4.3.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu 1 Sekretaris, 6 Kepala Bidang, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida, 15 Kepala Seksi, 4 Kepala Sub Bagian dan 69 orang staf. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Enam Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Penataan Ruang;
 - b. Bidang Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Jasa Konstruksi;
 - f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung seperti pada Gambar dibawah ini.

Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.





JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN/RUANG PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH (8+13+18+23)	KET	
		IV						III					II					I						
		A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																							
		5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	
	JUMLAH :	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN																							
PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																							
NO	URAIAN	JENIS KELAMIN																				Jumlah (12+22)	KET
		LAKI - LAKI										PEREMPUAN											
		S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML	S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	PNS	8	34	-	-	-	-	32	8	4	86	-	4	-	-	-	-	2	1	-	7	93	
2	HARIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
3	KONTRAK	-	3	-	-	-	-	18	-	-	21	-	2	-	-	1	-	3	-	-	6	27	
	JUMLAH :	8	37	0	0	0	0	51	8	4	108	0	6	0	0	1	0	5	1	0	13	121	

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;
- b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
- c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM;

Solusi :

- a. Melakukan upaya peningkatan anggaran pemenuhan SPM dengan cara proaktif mengusulkan proposal/pemenuhan RC (Reasidines Criteria) ke kementerian PUPR.
- b. Identifikasi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum;



- c. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan implementasi SPM;

Pelayanan Sanitasi

Pengertian Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman. Pengertian Fasilitas sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septik/ MCK komunal) dan/atau berupa sistem pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dari sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

Air limbah rumah tangga merupakan sumber utama pencemaran badan air di daerah perkotaan. Air limbah rumah tangga termasuk dalam air limbah domestik. Yang dimaksud dengan air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Limbah rumah tangga memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Banyak orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem.

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2024-2026, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung berdasarkan visi, misi Bupati yang ke lima yaitu Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masuk dalam program prioritas daerah point ke lima untuk mewujudkan Program Universal Access (100-0-100).

Definisi Operasional

Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kabupaten/kota dengan jumlah masyarakat minimal 50.000 jiwa yang telah memiliki tangki septik (sesuai dengan standar teknis berlaku) diharapkan memiliki sebuah IPLT yang memiliki kualitas *efluen* air limbah domestik tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan. Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap



jumlah total masyarakat yang memiliki tangkiseptik diseluruh kota. Kriteria ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah bahwa pada kepadatan penduduk >300 jiwa/ha diharapkan memiliki sebuah sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat dengan kualitas efluen instalasi pengolahan air limbah tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan. Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam persentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah terpusat pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem pembuangan air limbah setempat merupakan sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat, yang meliputi cubluk, tangki septik dan resapan serta sistem setempat lainnya, sarana pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja.

Target SPM pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan indikator Persentase layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2024 adalah 98,46 %. Pada Tahun 2024 Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung tidak melaksanakan kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, hanya mengerjakan Perencanaan IPLT Jungutbatu dan IPLT Biaung dengan sumber dana APBD Kabupaten Klungkung. Sedangkan untuk capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, Kabupaten Klungkung mendapat bantuan Program ‘Sanimas’ dengan sumber danan APBN sebanyak 35 KK di desa Kamasan dan 35 KK di desa Aan. Sehingga pada tahun 2024 jumlah penduduk yang berakses sanitasi layak menjadi 58.893 KK dan data jumlah KK tahun 2024 sebanyak 59.815 KK, sehingga persentase capaian sebesar (98,46%).

4.3.4. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2024, untuk kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah domestic dalam Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 242.857.900.00,- dan realisasi sebesar Rp 198.969.720,00 (81,93 %) yang terdiri dari :

- Belanja Langsung :
Pagu : Rp 242.857.900,00,-
Realisasi : Rp 198.969.720,00,-



Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

4.3.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu 1 Sekretaris, 6 Kepala Bidang, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida, 15 Kepala Seksi, 4 Kepala Sub Bagian dan 69 orang staf. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, terdiri dari :

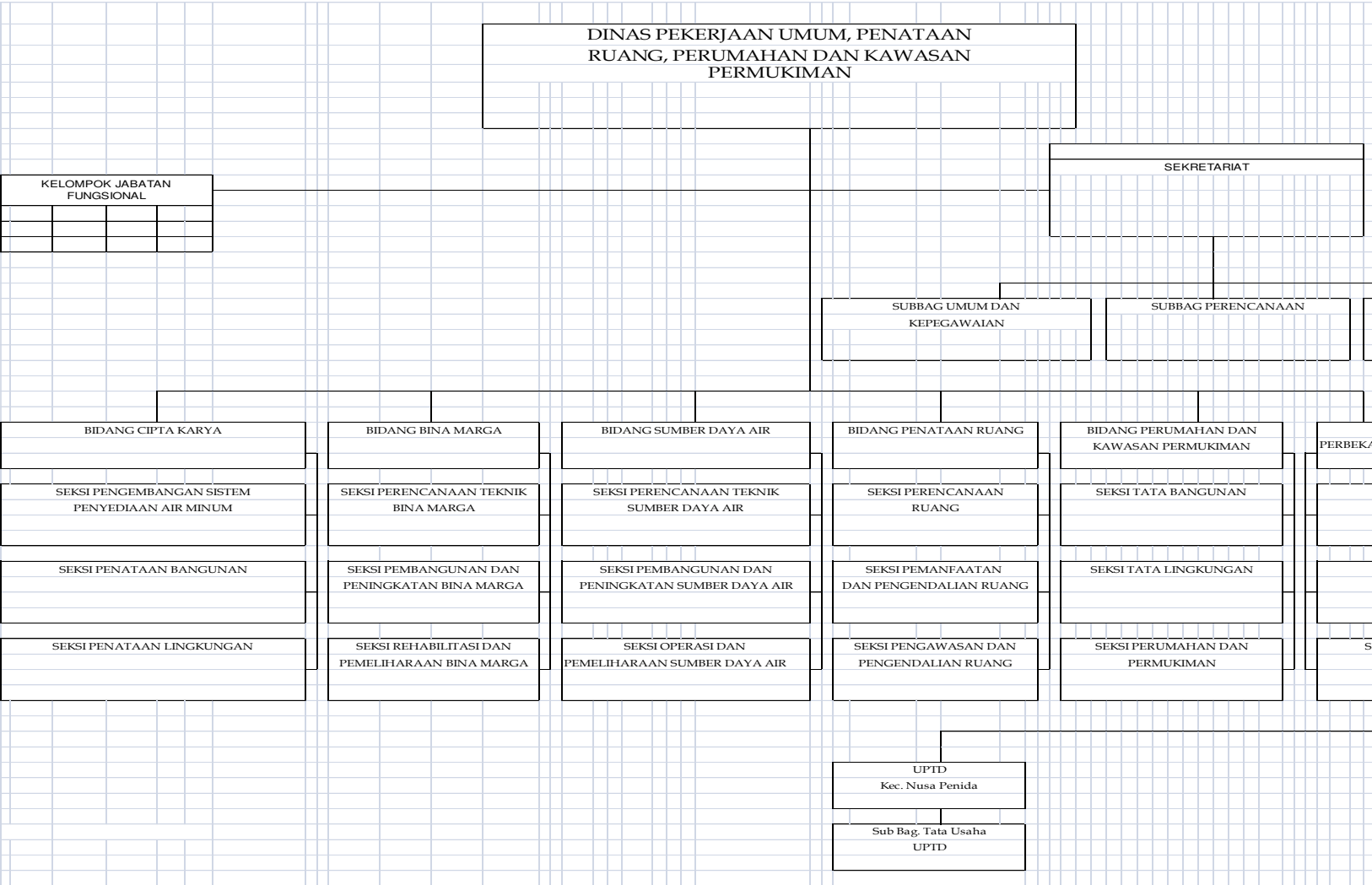
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Enam Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Penataan Ruang;
 - b. Bidang Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Jasa Konstruksi;
 - f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

4. Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung seperti pada Gambar dibawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG



Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN/RUANG PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																								
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH (8+13+18+23)	KET	
		IV						III					II					I						
		A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	
	JUMLAH :	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93	



JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																							
NO	URAIAN	JENIS KELAMIN																				Jumlah (12+22)	KET
		LAKI-LAKI										PEREMPUAN											
		S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML	S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	PNS	8	34	-	-	-	-	32	8	4	86	-	4	-	-	-	-	2	1	-	7	93	
2	HARIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
3	KONTRAK	-	3	-	-	-	-	18	-	-	21	-	2	-	-	1	-	3	-	-	6	27	
	JUMLAH :	8	37	0	0	0	0	51	8	4	108	0	6	0	0	1	0	5	1	0	13	121	

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan:
- Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:
- a. Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD;
 - b. Masih terbatasnya SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;
 - c. Belum sinerginya upaya implementasi SPM;
 - d. SPM Pekerjaan Umum melibatkan beberapa instansi/SKPD lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan stakeholder pemangku kepentingan lainnya sehingga dalam pencapaian beberapa sasaran SPM sulit terdata karena kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
 - e. Belum adanya kepastian lahan ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
 - f. Masih belum jelasnya tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang ataupun dengan instansi lain, sehingga mempersulit pencapaian sasaran SPM, seperti pada program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Solusi:



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- a. Melakukan upaya peningkatan anggaran pemenuhan SPM dengan cara proaktif mengusulkan proposal/pemenuhan RC (Reasidines Criteria) ke kementerian PUPR.
- b. Identifikasi jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan air minum;
- c. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan implementasi SPM;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM. Dan diharapkan instansi terkait pencapaian SPM memberikan laporan yang jelas tentang realisasi SPM setiap semesternya.
- e. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan status lahan, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan status lahan sudah jelas.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung melaksanakan urusan wajib Perumahan Rakyat.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kabupaten/kota dengan indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Dari kedua jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat untuk kabupaten klungkung belum ada kegiatan terhadap kejadian pada point b) tersebut diatas. Untuk Rumah layak huni dan terjangkau dengan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni

4.4.2Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM
SECARA NASIONAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas waktu nasional
1	Rumah layak huni dan terjangkau	a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	Setiap tahun



4.4.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Analisis realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator ini dilakukan dengan Pelayanan ketersediaan rumah layak huni, yaitu jumlah rumah layak huni di bagi dengan jumlah rumah yang ada. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan yang menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Tahun 2024 Dinas PUPRKP Kabupaten Klungkung untuk kegiatan perumahan mendapatkan bantuan berupa Peningkatan Kualitas sebanyak 15 unit di Desa Banjarangkan. Update terbaru Jumlah Rumah di Kabupaten Klungkung adalah 58.866 unit rumah, jumlah Rumah Tidak Layak Huni 3.523 unit rumah sehingga jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Klungkung adalah 55.343 unit rumah. Persentase untuk Rumah Layak Huni di Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 menjadi 94,02%.

Pada penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten yang ditangani pada tahun 2024 sebanyak 2 unit. Capaian penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten tahun 2024 sebanyak 2 unit (100%). *(Data dari BPBD Kabupaten Klungkung, 2024)*

4.4.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2024, untuk kegiatan Rumah Layak Huni dan Penanganan untuk kawasan kumuh, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 662.173.950,00 dan realisasi sebesar Rp 515.746.498,00 (77,89%) yang terdiri dari:

• Belanja Langsung	:	
Pagu	: Rp	662.173.950,00
Realisasi	: Rp	515.746.498,00

Anggaran tersebut dipergunakan juga untuk mendukung kegiatan yang termasuk SPM nasional. Tidak ada kontribusi swasta dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

4.4.5 Dukungan Personil

SPM Bidang Perumahan Rakyat dukungan personil yaitu Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan dibantu oleh 2 orang Jabatan Fungsional Muda dan 5 Staf.



4.4.6 Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan:

- Sering berubahnya penerima bantuan peningkatan kualitas rumah ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.
- Penerima bantuan memiliki keterbatasan dalam baca tulis sehingga kesulitan untuk mengurus persyaratan administrasi
- Keterbatasan staf pada bidang perumahan dan kawasan perkukiman untuk melakukan verifikasi terhadap usulan dari masyarakat
- Terjadi pemahaman ganda mengenai aturan teknis program.

Solusi:

- Bekerjasama dengan aparat terkait, sehingga sebelum pelaksanaan kegiatan penerima bantuan sudah jelas dan tidak berubah-ubah.
- Disediakan tenaga pendampingan kepada masyarakat penerima untuk mengurus persyaratan administrasi.
- Penambahan SDM pada bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam melakukan pendataan sesuai dengan *roadmap* usulan masuk.
- Pembuatan petunjuk teknis mengenai kriteria dan alur pengajuan usulan peningkatan kualitas perumahan, memberikan pelatihan penanganan rumah tidak layak huni kepada desa.

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dikatakan bahwa Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan kebutuhan setiap manusia dan merupakan hak setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kenyamanan. SPM dengan konsep baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Bila pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program ketertiban umum maka pada SPM ini pencapaian target tersebut lebih diarahkan kepada kinerja Pemda. Pencapaian target SPM, bersama-sama dengan program prioritas lain, menjadi indikator apakah kinerja Kepala Daerah dinilai baik atau tidak dan sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka ada konsekuensi tertentu atas tercapai / tidaknya indikator-indikator ini. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.



4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal, adapun Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung terdiri atas;

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sedangkan yang berhak menerima pelayanan dasar dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten / kota dan peraturan kepala daerah kabupaten / kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Untuk menjamin pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal, diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Indikator dan Nilai SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Indikator SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah seperti table dibawah ini:

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat



No.	Jenis Dasar & Kegiatan Pelayan Sub	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Nilai (%)
1	2	3	4
I	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100
II	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2. Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama kurun waktu tertentu dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah. Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama tahun 2024 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemenuhan pelayanan dasar sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara di Kabupaten Klungkung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sedangkan Standar Teknis Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal, diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota,

4.5.3 Realisasi

Realisasi SPM pada Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Profil SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal				
	Indikator	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100	0	0	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2 Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100	0	0	100%
Jumlah					100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2024 , capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung telah tercapai 100 %.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2024 dalam menunjang kegiatan dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung khususnya dalam pencapaian SPM di Kabupaten Klungkung dibiayai oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana (SiLPA) sebesar Rp. 2.476.874.759,00, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 15.174.387.262,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan rincian belanja operasional berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa sebesar Rp. 17.545.452.021,00 dan belanja modal berupa belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 130.810.000,00 dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 17.676.262.021,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.615.854.251,00. Adapun alokasi anggaran di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung tahun 2024 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.			KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
P.	K.	SK.							RENCANA	REALISASI	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)
			1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.676.262.021,00	16.615.854.251,00	94%
			1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.676.262.021,00	16.615.854.251,00	94%
1			1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.103.799.688,00	12.629.638.022,00	96%
	1		1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.333.616,00	101.798.236,00	86%
		1	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.288.936,00	98.143.436,00	86%
		2	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.044.680,00	3.654.800,00	90%
	2		1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.189.312.968,00	11.937.822.527,00	98%
		3	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.133.339.144,00	11.901.131.943,00	98%
		4	1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	55.973.824,00	36.690.584,00	66%
	3		1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	277.744.164,00	220.212.199,00	79%
		5	1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	277.744.164,00	220.212.199,00	79%
	4		1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.349.420,00	42.327.500,00	61%
		6	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.647.700,00	36.701.000,00	75%
		7	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.730.600,00	3.388.500,00	19%
		8	1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.971.120,00	2.238.000,00	75%
	5		1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.690.000,00	73.599.093,00	83%
		9	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.690.000,00	73.599.093,00	83%
	6		1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.369.520,00	253.878.467,00	70%



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.			KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
P.	K.	SK.							RENCANA	REALISASI	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)
		10	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.000.000,00	18.323.800,00	57%
		11	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	239.053.520,00	149.183.555,00	62%
		12	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.316.000,00	86.371.112,00	97%
2			1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.034.489.725,00	2.664.462.908,00	88%
	7		1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.642.418.353,00	2.408.434.568,00	91%
		13	1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	58.366.500,00	40.080.045,00	69%
		14	1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	87.465.528,00	73.607.268,00	84%
		15	1	05	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	153.973.084,00	116.028.179,00	75%
		16	1	05	02	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	2.342.613.241,00	2.178.719.076,00	93%
	8		1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	392.071.372,00	256.028.340,00	65%
		17	1	05	02	2.02	10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	110.720.244,00	89.190.596,00	81%
		18	1	05	02	2.02	11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	281.351.128,00	166.837.744,00	59%



NO.			KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
P.	K.	SK.							RENCANA	REALISASI	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)
3			1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.537.972.608,00	1.321.753.321,00	86%
	9		1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.537.972.608,00	1.321.753.321,00	86%
		19	1	05	04	2.02	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.055.368.408,00	998.544.316,00	95%
		20	1	05	04	2.03	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Dir	482.604.200,00	323.209.005,00	67%

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klungkung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung melaksanakan sinkronisasi dalam hal penyusunan anggaran. Sinkronisasi dilaksanakan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui APBD yang dapat digunakan untuk menunjang penerapan dan pelaksanaan SPM.

4.5.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan dengan dibantu 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang, 7 Kepala Seksi, 2 Kepala Sub Bagian, Anggota PNS : 66 orang, Pegawai Kontrak : 152 orang, THD : 1 orang, dan THL : 3 orang dengan kualifikasi pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung seperti berikut ini, Kualifikasi Pendidikan PNS, SMP : 0 orang, SMA : 42 orang, Diploma/S1 : 35 orang, S2 : 5 orang. Kualifikasi Pendidikan Pegawai Kontrak, SMP: 3, SMA: 116 orang, D1: 1 orang, D3: 1 orang, S1: 32 orang, S2: 1 orang. Menurut Golongan/pangkat, Gol.II: 12 orang, Gol.III: 65 orang, Gol.IV: 5 orang.



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klungkung:

1. Permasalahan
 - a. Belum optimalnya mutu Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena Kurangnya Sumber daya Aparatur, Baik jumlah maupun yang memiliki sertifikat kompetensi.
 - b. Belum optimalnya Pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana baik yang dimiliki Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
 - c. Masih tingginya kejadian kebakaran di Kabupaten Klungkung karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
2. Solusi
 - a. Mengoptimalkan anggota yang ada dan bekerjasama dengan BKPSDM untuk Mendiklatkan anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang kompetensinya, seperti diklat PPNS, Diklat Dasar, Diklat Intelejen dan Pemadam Kebakaran
 - b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan merencanakan penganggarannya
 - c. Mensosialisasikan, mengaktifkan tupoksi anggota linmas didesa/kelurahan dan membentuk relawan pemadam kebakaran.
 - d. Mensosialisasikan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

4.6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.5.2 Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung telah dimasukan pada RPJMD dengan 1 (satu) program yaitu: Program Penanggulangan Bencana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Klungkung dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Target,Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terkait Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I.	Program Penanggulangan Bencana			
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Secara Tatap Muka	200 orang	16.290.420,00
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 orang	16.290.420,00
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk di Kab.Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	238.555.680,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	164.087.600,00
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	74.468.080,00
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.087.415.596,00
-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	252.909.070,00
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan,ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	1 orang	834.506.526,00
	Total			1.342.261.696,00



4.5.3 Realisasi Capaian SPM

Tabel 2 Capaian SPM pada BPBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

No	Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	% tase realisasi
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) awan Bencana Secara Tatap Muka	200 orang	200 orang	100%
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Ko ta (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 orang	200 orang	100%
2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah penduduk di Kab.Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	200 orang	100%
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	200 orang	100%
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 doku men	1 dokumen	100%
		Pencarian, Pertolonga n dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 orang	1 orang	100%

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran BPBD Kabupaten Klungkung untuk mendukung percepatan penerapan SPM tahun 2024 sebesar Rp. 1.342.261.696,00 yang seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Klungkung

Tabel 4. Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada BPBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
I.	Program Penanggulangan Bencana				
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) awan Bencana Secara Tatap Muka	16.290.420,00	8.331.750,00	51,15 %
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	16.290.420,00	8.331.750,00	51,15%



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk di Kab.Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	238.555.680,00	126.550.563,00	53,05%
-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	164.087.600,00	105.464.313,00	64,27%
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	74.468.080,00	21.086.250,00	28,32%
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.087.415.596,00	775.515.154,00	71,32%
-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	252.909.070,00	43.383.020,00	17,15%
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	834.506.526,00	732.132.134,00	87,73%
	Total		1.342.261.696,00	910.397.467,00	67,83 %

4.5.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

Jumlah pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebanyak 42 orang, yang terdiri atas 22 orang PNS , 1 orang Pegawai Harian Daerah dan 20 orang tenaga kontrak. Dari 22 orang PNS tersebut ditugaskan pada beberapa jabatan yaitu 4 orang menduduki jabatan Eselon III b yaitu yang ditugaskan sebagai Sekretaris 1 orang, sebagai



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Bidang 3 orang dan 6 orang menduduki jabatan Fungsional, yang terdiri dari 1 orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah, 1 orang Perencana Ahli Muda dan 4 orang sebagai Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dan 1 orang menduduki jabatan struktural eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta 11 orang staf. Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari 37 orang Laki-laki dan 5 orang Perempuan.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut :

1. Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai.
2. Secara umum masyarakat di Kabupaten Klungkung memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bencana dan upaya penanggulangannya.
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana.
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi daerah yang rawan bencana.
5. Sarana dan prasarana BPBD masih belum optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan daerah rawan bencana.
2. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Tujuan dari mitigasi bencana adalah mengurangi risiko kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa.
3. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi antar pihak yang berkepentingan untuk saling mengisi dan mendukung program-program adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dan mengintegrasikan keduanya pada program-program yang sedang dijalankan.
4. Mengupayakan pembelajaran dan pemahaman kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi informasi rawan bencana. Langkah seperti ini sebagai edukasi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana sehingga mampu melakukan penyelamatan diri dan mengurangi risiko korban jiwa.
5. Mengusulkan rencana pengadaan pada tahun berikutnya.

4.6. Bidang Urusan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.



Program adalah penjabaran kebijakan yang terdiri dari satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara sistematis dan terpadu berupa (Outcome) hasil yang terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai hasil yang diharapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada Thun 2024 telah menyusun 5 (lima) program urusan sosial meliputi penanganan masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial dan pelayanan bantuan sosial.

Program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 antara lain:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program pemberdayaan sosial
3. Program rehabilitasi sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program penanganan Bencana

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai hasil yang diharapkan, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung telah menyusun 10 (sepuluh) kegiatan.

Kegiatan Urusan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 antara lain:

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
5. Kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota
6. Kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan social daerah Kabupaten/Kota
7. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti social.
8. Kegiatan rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti social.
9. Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
10. Kegiatan perlindungan social korban bencana alam dan social Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2024, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung telah merinci sub-sub kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) sub kegiatan urusan sosial sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
2. Evaluasi kinerja perangkat daerah
3. Penyediaan gaji dan tunjangan asn
4. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd
5. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penatausahaan arsip dinamis pada skpd
8. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang.
9. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan social kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota
10. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (lk3)
11. Penyediaan permakanan
12. Penyediaan alat bantu
13. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
14. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
15. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
16. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota
17. Penyediaan makanan

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial Kabupaten/Kota meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
- 2) Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- 3) Rehabilitasi Sosial lanjut usia terlantar di luar panti.
- 4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar panti.
- 5). Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana .



4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Keterangan Keadaan dan pemenuhan Barang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50 org	Pemberian Sembako kepada Penyandang Disabilitas berupa : - Beras : 20 Kg - Telur : 10 butir. - Gula Pasir : 1 kg -kopi : 1 bungkus
			40 buah	Bantuan kursi roda 30 buah,alat bantu dengar 10 buah
			40 org	Pemberian sembako untuk (ODGJ) berupa - Beras : 20 kg - Telur : 10 butir. - Gula Pasir : 1 kg Kopi : 1 bungkus
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
3.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 orang	Pemberian sembako untuk lanjut usia berupa : -Beras : 20 kg. -Telur : 10 butir. -Gula Pasir : 1 kg. -Kopi : 1 bungkus.



4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	

4.6.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan Keadaan dan pemenuhan Barang
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	50 org	50 org	Pemberian Sembako kepada Penyandang Disabilitas berupa: - Beras: 20 Kg - Telur: 10 butir. - Gula Pasir: 1 Kg -Kopi: 1 bungkus.
			40 buah	40 buah	Bantuan kursi roda 30 buah, bantuan nalat bantu dengar 10 buah
			40 org	40 org	Pemberian sembako untuk (ODGJ) berupa - Beras: 20 kg - Telur: 10 butir. - Gula Pasir 1 kg. - Kopi: 1bungkus



2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	0%	Standar Pelayanan Minimal untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024 memang tidak ada sehingga pelayan juga tidak ada
3.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	40 orang	40 orang	Pemberian sembako untuk lanjut usia berupa: -beras: 20 kg. -Telur: 10 butir. -Gula Pasir: 1 kg. Kopi: 1 bungkus.
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	100%	Standar Pelayanan Minimal untuk Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024, memang tidak ada,sehingga pelayanan juga tidak ada
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	Anggaran meliputi dana untuk keadaan insidentil, persediaan permakanan sebanyak 15 paket dan peralatan dapur



4.6.4 Alokasi Anggaran

Jumlah total alokasi anggaran untuk urusan sosial adalah Rp 1.209.291.132,00 dengan realisasi sebesar Rp 770.785.482,00 dengan capaian 63,74%

No	Jenis pelayanan dasar	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program : rehabilitasi sosial	727.871.680,00	486.193.982,00	66,80%
		Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	727.871.680,00	486.193.982,00	66,80%
		Sub kegiatan : penyediaan permakanaan	287.276.360,00	283.064.700,00	98,53%
		Sub kegiatan : penyediaan alat bantu	58.804.960,00	30.296.299,00	51,52%
3.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	204.474.072,00	59.467.684,00	29,08%
4.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Sub kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	177.316.288,00	113.365.299,00	63,93%



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Program: penanganan bencana	481.419.452,00	284.591.500,00	59,15%
		Kegiatan : perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	481.419.452,00	284.591.500,00	59,15%
		Sub kegiatan: penyediaan makanan	481.419.452,00	284.591.500,00	59,15%

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tersebar di 2 (dua) bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu terdiri dari : 10 (sepuluh) PNS, 6 (enam) orang tenaga kontrak dan dukungan dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan sebanyak 4 (empat) orang.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal bidang sosial terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1. Kendaraan roda 4 (empat) untuk pengantaran gepeng dan Orang Denga Gangguan Jiwa (ODGJ) belum ada.
- 2. Data Penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar yang sering tercecer atau tidak terdata

Solusi yang akan dilaksanakan terkait masalah tersebut diatas adalah:

- 1. Untuk kelancaran kegiatan dalam pengantaran gepeng dan ODGJ sementara waktu kami pergunakan kendaraan roda 4 (empat) carry yang ada walaupun tidak memenuhi standar.
- 2. Merlaksnakan validasi data dengan desa terkait

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	283.027.880.103,00	274.390.012.628,32	96,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	283.027.880.103,00	274.390.012.628,32	96,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	224.381.980.621,00	217.698.315.681,00	97,02



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.238.220,00	52.325.184,00	86,86
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.195.900,00	16.078.320,00	88,36
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.042.320,00	36.246.864,00	86,22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	221.660.114.826,00	215.357.738.509,00	97,16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	221.622.386.226,00	215.320.104.709,00	97,16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.728.600,00	37.633.800,00	99,75
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.802.124.224,00	1.651.992.921,00	91,67
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.802.124.224,00	1.651.992.921,00	91,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.244.268,00	147.562.068,00	83,73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	166.318.768,00	138.254.568,00	83,13
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.390.600,00	3.107.500,00	91,65
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.034.900,00	2.700.000,00	88,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.091.168,00	375.130.899,00	77,49
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.461.000,00	155.029.731,00	80,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.630.168,00	220.101.168,00	75,21
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.167.915,00	113.566.100,00	57,02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.227.915,00	83.966.100,00	56,65
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.940.000,00	29.600.000,00	95,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.561.389.242,00	56.608.121.947,32	96,66
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.852.767.020,00	27.120.237.050,00	97,37
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	298.026.200,00	256.082.000,00	85,93
Pengadaan Mebel Sekolah	512.837.100,00	484.205.000,00	94,42
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	426.308.800,00	415.447.800,00	97,45
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	428.410.069,00	390.478.000,00	91,15
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	467.375.700,00	463.577.164,00	99,19
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.132.180.591,00	4.127.618.471,00	99,89
Pengembangan Karir Pendidik dan	10.542.880,00	4.022.420,00	38,15



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	38.424.580,00	32.077.000,00	83,48
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.357.050.000,00	17.357.050.000,00	100
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	581.033.300,00	581.033.300,00	100
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3.008.700,00	2.990.000,00	99,38
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.583.100,00	1.260.000,00	14,68
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	3.098.700,00	1.985.000,00	64,06
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.999.800,00	10.569.750,00	96,09
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	30.000.000,00	29.822.500,00	99,41
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	81.700.000,00	0	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	358.437.822,00	358.437.822,00	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	267.000.000,00	267.000.000,00	100
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.978.700,00	0	0
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	19.014.380,00	3.116.500,00	16,39
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.812.756.598,00	2.333.464.323,00	82,96
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.382.143.569,00	18.067.737.254,00	98,29
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	485.681.850,00	460.419.000,00	94,8
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	84.800.000,00	84.093.557,00	99,17
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	419.650.000,00	419.650.000,00	100
Pembangunan Laboratorium	780.070.200,00	780.070.200,00	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	413.462.400,00	413.462.400,00	100
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	128.000.000,00	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	949.006.050,00	949.006.050,00	100
Pengadaan Mebel Sekolah	243.882.892,00	228.405.000,00	93,65
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	174.788.000,00	168.600.000,00	96,46
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	28.100.000,00	0	0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	607.374.823,00	552.317.500,00	90,94
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.889.261.874,00	2.882.480.717,00	99,77
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah	22.797.000,00	2.269.080,00	9,95



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Pertama			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.806.920.000,00	10.806.920.000,00	100
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	13.588.700,00	465.000,00	3,42
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.025.580,00	3.219.000,00	64,05
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	5.998.700,00	1.875.000,00	31,26
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.926.800,00	9.284.750,00	93,53
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	8.608.700,00	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	305.200.000,00	305.200.000,00	100
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.435.799.793,00	10.691.375.816,50	93,49
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	557.132.909,00	455.074.284,50	81,68
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	212.000.000,00	211.220.876,00	99,63
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	261.069.740,00	243.069.740,00	93,11
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	385.000.000,00	381.860.000,00	99,18
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	3.655.244.753,00	3.461.906.524,00	94,71
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	906.818.451,00	873.328.092,00	96,31
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5.346.300,00	1.281.340,00	23,97
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.897.480.700,00	1.670.314.300,00	88,03
Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.174.840.000,00	3.174.840.000,00	100
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.503.700,00	6.351.000,00	97,65
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	12.048.700,00	10.980.000,00	91,13
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.999.840,00	9.351.000,00	93,51
Pembangunan Ruang Kelas Baru	291.500.000,00	136.404.660,00	46,79
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	12.814.700,00	12.674.000,00	98,9
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	48.000.000,00	42.720.000,00	89
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	890.678.860,00	728.771.826,82	81,82
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	106.000.000,00	20.500.000,00	19,34
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.094.480,00	0	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	40.209.000,00	24.330.000,00	60,51



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Nonformal/Kesetaraan			
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	348.060.000,00	348.060.000,00	100
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.718.300,00	1.718.300,00	100
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.432.920,00	0	0
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	19.080.000,00	3.157.000,00	16,55
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	212.000.000,00	211.551.026,82	99,79
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.775.200,00	947.500,00	12,19
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	153.308.960,00	118.508.000,00	77,3
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	77.273.840,00	77.125.500,00	99,81
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.348.320,00	5.347.500,00	99,98
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5.348.320,00	5.347.500,00	99,98
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	71.925.520,00	71.778.000,00	99,79
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	71.925.520,00	71.778.000,00	99,79
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.236.400,00	6.449.500,00	89,13
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.236.400,00	6.449.500,00	89,13
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.518.700,00	2.934.500,00	83,4
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.717.700,00	3.515.000,00	94,55



4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Indikator SPM	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten Kota
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + persentase balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar
6	Persentase warga negara usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
7	Persentase warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Persentase penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Persentase penderita Diabetes melitus usia >15 tahun di dalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang sesuai standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Persentase orang dengan berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV



Program Kegiatan Bidang Kesehatan di RSUD Klungkung Tahun 2024

NO.			KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
P.	K.	SK.						RENCANA	REALISASI	CAPAIAN
			1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	214.625.967.078,00	208.936.678.266,00	97,35%
			1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	214.625.967.078,00	208.936.678.266,00	97,35%
1.			1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 212.825.967.078,00	Rp207.143.906.534,00	97,33%
	1.		1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 32.785.144.467,00	Rp 32.323.162.052,00	98,59%
		1.	1	2	1	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 32.785.144.467,00	Rp 32.323.162.052,00	98,59%
			1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 180.040.822.611,00	Rp174.820.744.482,00	97,10%
			1	2	1	2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 180.040.822.611,00	Rp174.820.744.482,00	97,10%
2.			1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 1.800.000.000,00	Rp 1.792.771.732,00	99,60%
	3.		1	2	2	2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.492.794.732,00	99,52%
			1	2	2	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.492.794.732,00	99,52%
	4.		1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 300.000.000,00	Rp 299.977.000,00	99,99%
		4.	1	2	2	2.02	32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 300.000.000,00	Rp 299.977.000,00	99,99%

4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Adapun Program dan Kegiatan Kerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi
1	Bidang Cipta Karya		
	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.095.528.602,-	963.377.431,-

Sumber: DPA- SKPD DPUPRPK P2024

4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat



Adapun Program dan Kegiatan Kerja Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 adalah sebagai berikut

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Keterangan	
	URUSAN WAJIB						
II	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT						
1	Meningkatkan perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah yang layak huni (%)	254.845.950	134.901.468		
		Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah penanganan rumah layak huni (dok)	254.845.950	134.901.468	Mendukung Pencapaian SPM	
2		Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan kumuh (%)	407.328.000	380.845.030		
		Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah penanganan kawasan kumuh (dok)	407.328.000	380.845.030	Mendukung Pencapaian SPM	

4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Indikator SPM	Program yang terkait
1	Cakupan Warga Negara yang terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Cakupan Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran



4.7.6 Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Klungkung terkait Pelayanan SPM Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I.	Program Penanggulangan Bencana			
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Secara Tatap Muka	200 orang	16.290.420,00
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 orang	16.290.420,00
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk di Kab.Klungkung mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	238.555.680,00
-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	164.087.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	200 orang	74.468.080,00
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.087.415.596,00
-	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	252.909.070,00
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan,ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	1 orang	834.506.526,00
	Total			1.342.261.696,00



4.7.7 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung terkait pelayanan SPM Tahun
2024

No	Jenis pelayanan dasar	Program/kegiatan/sub kegiatan	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program : rehabilitasi sosial	727.871.680,00	486.193.982,00
		Kegiatan : rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	727.871.680,00	486.193.982,00
		Sub kegiatan : penyediaan permakanan	287.276.360,00	283.064.700,00
		Sub kegiatan : penyediaan alat bantu	58.804.960,00	30.296.299,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Sub kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	204.474.072,00	59.467.684,00
4.	Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti	Sub kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	177.316.288,00	113.365.299,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana	Program : penanganan bencana	481.419.452,00	284.591.500,00
		Kegiatan : perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	481.419.452,00	284.591.500,00
		Sub kegiatan : penyediaan makanan	481.419.452,00	284.591.500,00



BAB V PENUTUP

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024, telah tercatat sejumlah pencapaian yang signifikan dalam berbagai sektor. Melalui upaya bersama dari berbagai pihak terkait, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, tercapailah beragam program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klungkung berterima kasih kepada seluruh instansi, lembaga, dan individu yang telah berperan aktif dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kehadiran partisipasi yang konstruktif dan kolaboratif menjadi landasan kuat bagi kemajuan dan pembangunan Kabupaten Klungkung ke arah yang lebih baik. Tidak lupa, apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung atas kesadaran dan dukungan yang diberikan dalam setiap program yang dilaksanakan. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, diharapkan Kabupaten Klungkung dapat terus bergerak maju menuju cita-cita pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selama tahun 2024, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Capaian kinerja yang telah diraih mencerminkan upaya bersama seluruh perangkat daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung. Kami menyadari bahwa masih terdapat tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus menjadi komitmen kami untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Klungkung selama tahun 2024. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 ini kami sampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja pemerintah daerah dan menjadi dasar perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Semarapura, 27 Maret 2025
BUPATI KLUNGKUNG,

MADE SATRIA

